KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan II Tahun 2023

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROV. KEPULAUAN RIAU

HAnDAL

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Tanah melayu tradisi berpantun
Kepulauan Riau, negeri kaya adat
KFR Triwulan II Tahun 2023 telah disusun
Semoga pembaca beroleh manfaat

KATA PENGANTAR

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Prov. Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kajian Fiskal Regional merupakan aktivitas telaah makro pelaksanaan anggaran yang menjadi salah satu *output* pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian *output* dan *outcome* yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

KFR diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan perekonomian daerah dan menjadi referensi yang kredibel atas implementasi kebijakan fiskal di daerah untuk peningkatan kualitas tata kelola fiskal pusat dan daerah.

Penyusunan kajian ini juga akan meningkatkan sinergi antar *stakeholders* untuk bersama-sama berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. KFR Triwulan II Tahun 2023 ini mencakup informasi perkembangan fiskal regional (APBN, APBD dan konsolidasian) dengan analisis tematik Penguatan *Local Taxing Power*.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan KFR ini, terutama kepada Gubernur Kepulauan Riau, Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Khusus Provinsi Kepulauan Riau, KPU BC Batam, KPKNL Batam, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, OJK Provinsi Kepulauan Riau, KADIN Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Suyono sebagai *Local Expert* dan akademisi dari Universitas Internasional Batam, Mata Garuda Kepulauan Riau dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Harapannya kedepan sinergi yang telah terbangun dengan baik ini dapat semakin ditingkatkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun pelaporan masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada KFR Triwulan II Tahun 2023 ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas kajian kedepannya. Besar harapan kami Kajian Fiskal Regional yang disusun dapat memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Agustus 2023

Indra Soeparjanto

Kepala Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau

SELAYANG PANDANG

Tanah Melayu, Kepulauan Riau

KEPULAUAN RIAU

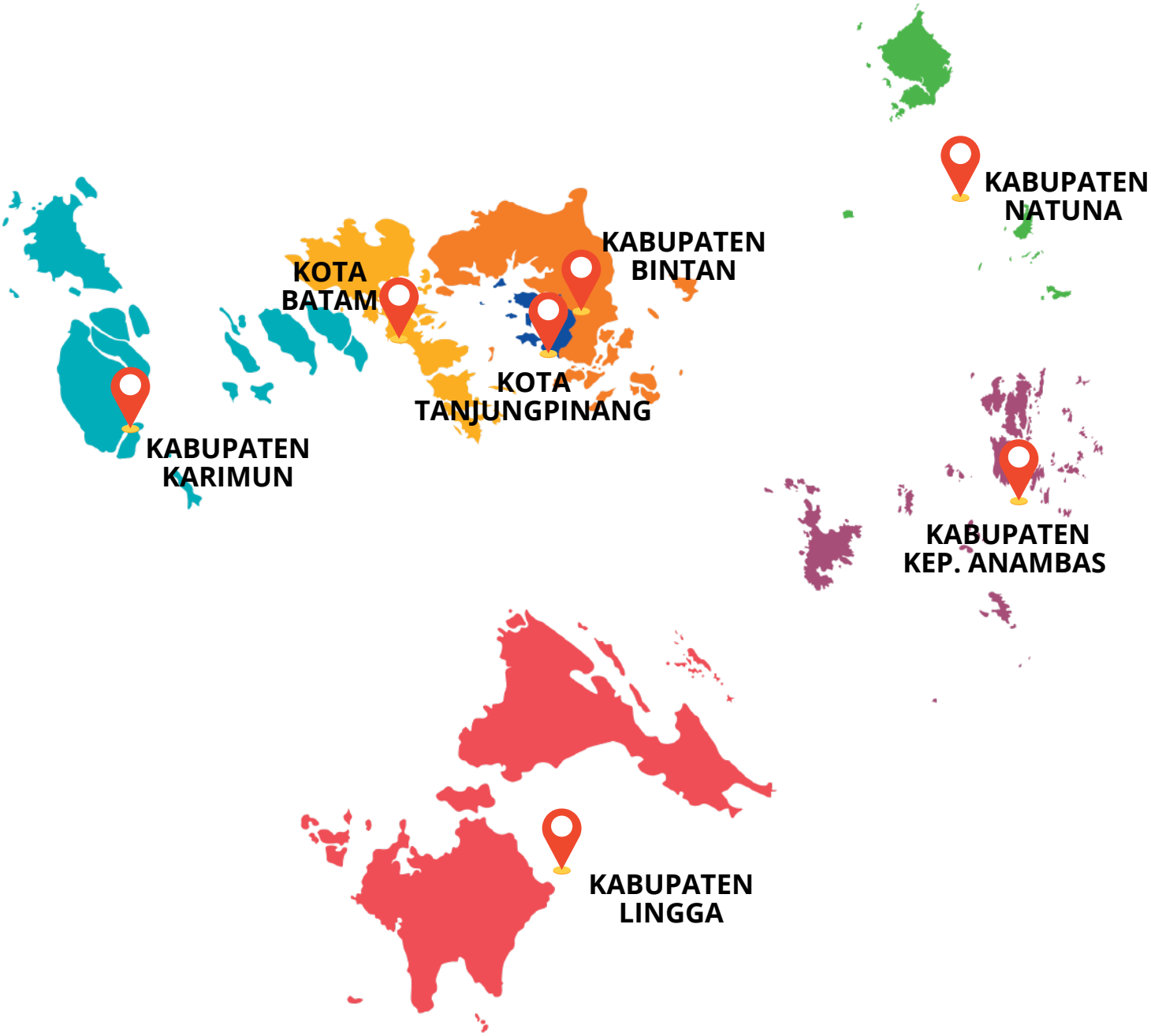

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.

Baju Tradisional Teluk Belanga dan Kebaya Labuh

TIM PENYUSUN

Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2023

Penanggung Jawab

Indra Soeparjanto
(Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau)

Ketua Tim

Anggrainy
(Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II)

Kontributor

Rolly Indra
(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A)

Ibrohim Husin
(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B)

Penyunting

Achmad Fajar Setiawan
(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C)

Kontributor

Bastian P.
(Pelaksana OJT)

M. Safarin R. P.
(Pelaksana Seksi PPA II C)

Joshua Harris
(Pelaksana Seksi PPA II A)

Erika Krissanta
(Pelaksana Seksi PPA II B)

Kontributor & Desain

Lorensia Kristina
(Pelaksana Seksi PPA II A)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Selayang Pandang iv
Tim Penyusun vi
Daftar Isi viii
Daftar Tabel x
Daftar Grafik xiii
Daftar Gambar xiv
Dashboard Makro Ekonomi xv
Ringkasan Eksekutif xvii

BAB 1 **Analisis Ekonomi Regional**

Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi 2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2
Kontribusi Fiskal terhadap Pembentukan PDRB 6
Inflasi 7
Ekspor Impor 9

Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan 11
Tingkat Kemiskinan 11
Tingkat Pengangguran 13
Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) 13
Nilai Tukar Petani (NTP) 14
Nilai Tukar Nelayan (NTN) 16
Indeks Pembangunan Manusia 17

BAB 2 **Analisis Fiskal Regional**

Analisis Laporan Realisasi APBN 22
Pendapatan Negara 24
Belanja Negara 31
Analisis Prognosis APBN Regional 35

Analisis Laporan Realisasi APBD 36
Pendapatan Daerah Konsolidasi 36
Belanja Daerah Konsolidasi 39

Analisis Anggaran Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah 40
Konsolidasi APBN dan APBD 40
Kontribusi Belanja Konsolidasi Pemerintah Terhadap PDRB 41
Analisis Belanja Konsolidasi per Kapita 41

Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah **41**
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 41
Kontribusi Belanja Pemerintah Dalam Pembentukan Aset Tetap (BMN) dari Belanja Modal 42
Realisasi dan Potensi PNBP dari BMN 43

BAB 3 **Pengembangan Ekonomi Daerah**

Sektor Unggulan Daerah **45**
Profil dan Kondisi Eksisting Sektor Unggulan Daerah 45
Dukungan Pemerintah Terhadap Perkembangan Sektor Industri Pengolahan 49
Analisis Potensi Pengembangan Sektor Unggulan 53

Sektor Potensial Daerah **54**
Perkembangan Sektor Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau 54
Dukungan Pemerintah terhadap Sektor Perdagangan 56
Analisis Pengembangan Sektor Perdagangan 59

Rekomendasi Kebijakan Sektor Unggulan dan Potensial **60**
Rekomoendasi Kebijakan Sektor Unggulan 60
Rekomendasi Kebijakan Sektor Potensial 60

BAB 4 **Analisis Tematik**

Analisis Kemandirian Fiskal Daerah **62**
Perkembangan Total PAD Pemprov Kepulauan Riau 62
Perkembangan Realisasi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov 2017 s.d 2023 69
Perkembangan *Local Taxing Ratio* Pemerintah Provinsi Kepri dan Konsolidasi Pemerintah Kab/Kota Tahun 2017 s.d. Triwulan II Tahun 2023 77

Reviu Kesiapan Daerah Dalam Penguatan *Local Taxing Power* **78**

BAB 5 **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kesimpulan **85**
Rekomendasi **91**

DAFTAR TABEL

1.1	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran di Provinsi Kepri Tahun 2022-2023	4
1.2	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kepri Tahun 2022-2023	5
1.3	Perkembangan IPM per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022	18
2.1	Perkembangan *I-Account* APBN di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023 (Rp. Miliar)	23
2.2	Perbandingan *Tax Ratio* Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Nasional	27
2.3	Klaster Tingkat Kemandirian Fiskal	28
2.4	Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi Tw II-2023	32
2.5	Realisasi Belanja Berdasarkan Kementerian Lembaga Tw II-2023	33
2.6	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh Satker dan 10 K/L Terbesar	33
2.7	Realisasi PN di Provinsi Kepulauan Riau s.d. Juni 2023	33
2.8	Deviasi Realisasi APBN s.d Triwulan II Tahun 2023 Lingkup Prov Kepulauan Riau (Rp. Miliar)	35
2.9	Prognosis Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup Prov Kepulauan Riau (Rp. Miliar)	36
2.10	Perkembangan *I-Account* APBD di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023 (Rp. Miliar)	36
2.11	Perkembangan *I-Account* APBN dan APBD di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023 (Rp. Miliar)	40
2.12	Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah di Prov. Kepri terhadap PDRB	41
2.13	Rasio Belanja Pemerintah di Prov. Kepri per Kapita	41
2.14	Perkembangan Neraca per 30 Juni 2022, 31 Desember 2022, dan 30 Juni 2023	42
2.15	Rasio Penambahan Aset Tetap terhadap Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Aset Tetap Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023	43
2.16	Realisasi PNBP dari Pemanfaatan Aset Tetap di Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2023 (Rupiah)	43
3.1	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2020-2023 (persen)	45
3.2	Dukungan Fiskal Pemerintah untuk sektor Industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Riau TA 2023 (Rp Miliar)	50
3.3	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (2021-2022)	55
3.4	Realisasi Penyaluran Kredit Subsidi Bunga Pemerintah Provinsi Kepri s.d. Mei Tahun 2023 (Rp miliar)	58

DAFTAR GRAFIK

1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kepri dan Nasional Tahun 2019-2023 (yoy)	2
1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kepri dan Nasional Tahun 2019-2023 (q-to-q)	2
1.3	Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Regional Sumatera (%yoy)	3
1.4	Distribusi Pertumbuhan Ekonomi di Regional Sumatera (%yoy)	3
1.5	Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Regional Sumatera Tw II-2023 (%ctc)	3
1.6	Jumlah Investasi Per Sektor di Provinsi Kepri Triwulan II Tahun 2023 (miliar Rp)	4
1.7	Jumlah Investasi Pada Sektor Tersier di Provinsi Kepri Triwulan II Tahun 2023 (miliar Rp)	4
1.8	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepri Berdasarkan Pintu Masuk Tahun 2022-2023 (orang)	5
1.9	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepri Triwulan II-2023 (orang)	5
1.10	Inflasi di Regional Sumatera Tw II-2023 (yoy)	7
1.11	Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota di Kepulauan Riau dan Nasional (yoy)	7
1.12	Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2021-2023 (yoy)	8
1.13	Inflasi pada Dua Kota IHK Provinsi Kepri Tahun 2022-2023 (yoy)	8
1.14	Perkembangan Inflasi Kepri s.d. Tw II-2023 (ytd)	8
1.15	Perkembangan Net Ekspor Prov. Kepri Tahun 2019-2023 (yoy)	9
1.16	Perkembagan Total Ekspor Prov. Kepri Tahun 2021-2023 (yoy)	10
1.17	Perkembagan Total Impor Prov. Kepri Tahun 2021-2023 (yoy)	11
1.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Kepri Tahun 2019-2023 (ribu jiwa)	12
1.19	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2023 (ribu jiwa)	12
1.20	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepri Tahun 2020-2023	13
1.21	Perkembangan Rasio Gini Provinsi Kepri Tahun 2019-2022 (ribu jiwa)	14
1.22	Perkembangan NTP Provinsi Kepri Tahun 2022-2023 (yoy)	15
1.23	Perkembangan NTN Provinsi Kepri Tahun 2022-2023 (yoy)	16
1.24	Perkembangan IPM Provinsi Kepri dan Nasional (2017-2022)	18
1.25	Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepri Tahun 2020-2022	19
1.26	Alokasi dan Realisasi Program Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing di Kabupaten Lingga dan Anambas Tahun 2023	20

2.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tw II- 2023 (Rp. Miliar)	24
2.2	Porsi Realisasi Pendapatan NegaraTw II- 2023 (Rp. Miliar)	24
2.3	Penerimaan per Sektor Triwulan II Tahun 2023	26
2.4	Perbandingan *Tax Ratio* Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Nasional	27
2.5	Indeks Kemandirian Fiskal I	28
2.6	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah I	29
2.7	Indeks Kemandirian Fiskal II	29
2.8	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah II	30
2.9	Perkembangan Realisasi Belanja Negara Tw II- 2023 (Rp. Miliar)	31
2.10	Porsi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tw II- 2023	31
2.11	Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Output Belanja PN di Provinsi Kepulauan Riau s.d. Juni 2023 (Rp. Miliar)	34
2.12	Breakdown PAD per Kabupaten/Kota (Rp. Miliar)	37
2.13	Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Tanjungpinang dan Kota Batam	38
2.14	Porsi Belanja APBD di Provinsi Kepulauan Riau Tw II- 2023	39
2.15	Penggunaan SiLPA per Kabupaten/Kota (Rp)	40
2.16	Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 30 Juni 2022, 31 Desember 2022, dan 30 Juni 2023	42
2.17	Perkembangan RPATBM Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2023	43
3.1	Sektor-Sektor Penerimaan Pajak di Provinsi Kepulauan Riau (dalam miliar)	48
3.2	Pertumbuhan Jumlah Pekerja di Provinsi Kepulauan Riau (yoy, ribuan orang)	49
3.3	Anggaran Subsidi Indonesia tahun 2019 – 2023 (Rp Triliun)	50
3.4	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB, Periode Sem I Tahun 2020 – 2023 (%)	55
3.5	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Tahun 2020-2022 (%)	55
3.6	Investasi PMDN Sektor Perdagangan dan Reparasi di Kepri Tahun 2020-2023 (Rp. Juta)	56
3.7	Penerimaan Perpajakan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2020-2023 (Rp. miliar)	56

3.8	Penyaluran KUR di Provinsi Kepri per Sektor Usaha s.d. 30 Juni 2023	57
3.9	Penyaluran KUR pada Bulan Juni Tahun 2020 dan 2023	57
3.10	Debitur Penerima KUR pada Bulan Juni Tahun 2020 dan 2023	57
3.11	Realisasi Belanja APBD Fungsi Ekonomi Urusan Perdagangan Tahun 2020 – 2023 (Rp miliar	58
4.1	Perkembangan PAD Pemprov Kepri 2017 s.d. Tw II-2023 (Rp miliar)	62
4.2	Perkembangan Komponen PAD Pemprov Kepri Tahun 2017 s.d. 2023 (Rp miliar)	63
4.3	Perkembangan PAD Pemerintah Provinsi Kepri dan Komponennya Periode s.d Tw II, Tahun 2017 – 2023 (Rp Miliar)	65
4.4	Kontribusi Komponen PAD Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2017 s.d. Tw II-2023	66
4.5	Perkembangan PAD Konsolidasi Kota/Kabupaten Kepri Tahun 2017 s.d. Tw II-2023 (Rp miliar)	66
4.6	Perkembangan PAD Konsolidasi Kab/Kota Kepri Tahun 2017 s.d. 2022 (Rp miliar)	67
4.7	Perkembangan PAD Konsolidasi Kab/Kota di Provinsi Kepri Periode Tw II, Tahun 2017- 2023 (Rp miliar)	68
4.8	Kontribusi Komponen PAD Konsolidasi Kota/Kabupaten Kepri Tahun 2017 s.d. Tw II-2023	68
4.9	Kontributor PAD Konsolidasi Kota/Kabupaten Kepri per Tw II, Tahun 2017-2023	69
4.10	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2017 s.d. Tw II-2023	69
4.11	Perkembangan Pajak Daerah (Per Jenis) Tahun 2017 s.d. Tw II-2023	70
4.12	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2017 s.d. Tw II-2023	71
4.13	Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017 s.d. Tw II-2023	71
4.14	Perkembangan Retribusi Daerah Tahun 2017 – Tw II Tahun 2023 (Rp Miliar)	72
4.15	Perkembangan Retribusi Daerah (Per jenis) 2017 s.d. Tw II - 2023	72
4.16	Retribusi Daerah Tahun 2017 – 2023 (periode Triwulan II)	73
4.17	Kontribusi Retribusi Tahun 2017 Sampai Dengan Tw II-2023	73
4.18	Perkembangan Pajak Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017 s.d. Tw II Tahun 2023 (Rp miliar)	74
4.19	Perkembangan Pajak Daerah Konsolidasi Kab/Kota (Per jenis Pajak Daerah) Tahun 2017 – Tw II Tahun 2023	74
4.20	Perkembangan Pajak Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tw II Tahun 2017-2023 (Rp miliar)	75

4.21	Kontribusi Pajak Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017 s.d. Tw II Tahun 2023	75
4.22	Perkembangan Retribusi Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017-Tw II Tahun 2023 (Rp miliar)	75
4.23	Kontribusi Retribusi Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017- Q2 2023 (dalam Rp miliar)	76
4.24	Kontributor Retribusi Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017- Q2 2023 (%)	77
4.25	Perbandingan Penerimaan PAD dan Local Tax Ratio (LTR) Provinsi Kepri (2017-2023)	77
4.26	Perbandingan Penerimaan PAD dan Local Tax Ratio (LTR) Konsolidasi Pemerintah Kab/Kota Kepri (2017-2023)	77

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Dashboard Indikator Ekonomi dan Fiskal Regional Kepulauan Riau

Triwulan II Tahun 2023

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB	PDRB	Kontribusi
Rp49,16 T	Rp81,50 T	7,30%
ADHK	ADHB	terhadap Sumatera

Inflasi (Juni, *y-o-y*)

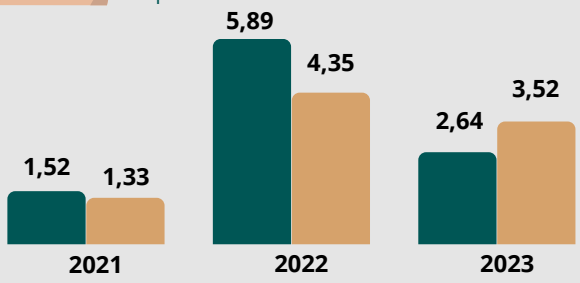

Andil Inflasi Terbesar

- Angkutan Udara 0,2041
- Telur Ayam Ras 0,0986
- Bayam 0,0650

Andil Deflasi Terbesar

- Bensin -0,0761
- Emas Perhiasan -0,0330
- Daging Ayam Ras -0,0285

Kondisi makro ekonomi pada Triwulan II-2023 membaik, ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan inflasi, serta peningkatan total ekspor dan impor secara *year on year*.

Pertumbuhan Ekonomi (*y-o-y*)

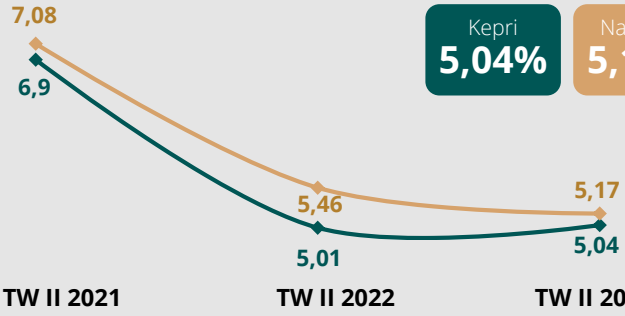

Kepri **5,04%** | Nasional **5,17%**

Ekspor (dalam juta US$)

	TW II 2022	TW II 2023	Growth
Migas	2.316,48	2.043,65	-11,78%
Nonmigas	7.286,65	7.628,44	4,69%
Total	**9.603,12**	**9.672,08**	**0,72%**

Negara Tujuan Ekspor Terbesar

Impor (dalam juta US$)

	TW II 2022	TW II 2023	Growth
Migas	1.693,61	1.675,63	-1,06%
Nonmigas	6.455,78	7.655,83	18,59%
Total	**8.149,39**	**9.331,46**	**14,51%**

Negara Asal Impor Terbesar

Sumber: BPS Kepri (diolah)

Perkembangan Indikator Kesejahteraan

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

ribu jiwa

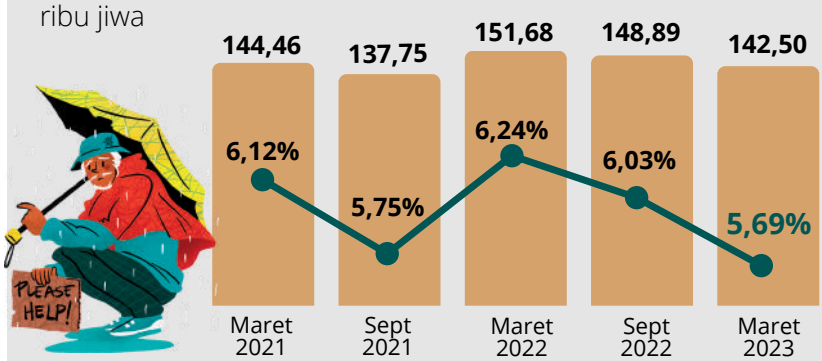

Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhaadp garis kemiskinan yaitu **beras, rokok kretek filter, daging ayam ras,** dan **telur ayam ras.**

Nilai Tukar Petani

▲1,11% Juni	105,66
Mei	104,51
April	105,01

Nilai Tukar Nelayan

▲0,41% Juni	110,64
Mei	110,21
April	110,63

Kondisi kesejahteraan Kepulauan Riau membaik ditandai dengan menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia, kenaikan nilai tukar petani, dan peningkatan nilai tukar nelayan.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Feb 2023	7,61%
Feb 2022	8,02%
Feb 2021	10,12%

Indeks Pembangunan Manusia

2022	76,46
2021	75,79
2020	75,59

Gini Rasio

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepulauan Riau yang pada periode Maret 2023 tidak dirasakan secara merata. Artinya, golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam menikmati "kue" suksesnya pertumbuhan ekonomi.

Sumber grafis: Canva

Sumber: BPS Kepri (diolah)

Kinerja Fiskal Kepulauan Riau

sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Miliar)

Pendapatan

5.858,60

51,06%

PNBP
Pajak

Growth (yoy) **-6,30%**

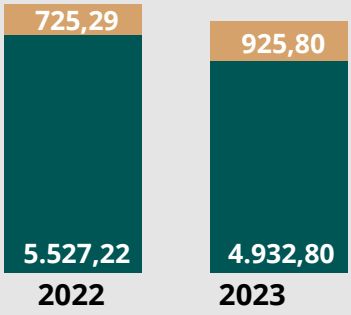

Realisasi	Belanja	Growth (yoy)
37,43%	**6.546,84**	14,68% ▲
31,01%	Bel. Pempus **2.956,10**	34,33% ▲
45,11%	TKDD **3.590,74**	2,36% ▲

Sumber: OM-SPAN, DJP, DJBC (diolah)

Konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Miliar)

Pendapatan

5.504,94

39,97%

Lain-lain
Transfer
PAD

Growth (yoy) **▲8,01%**

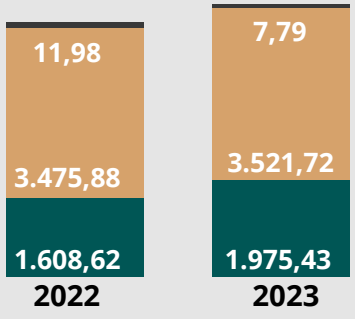

Realisasi	Belanja	Growth (yoy)
31,99%	**4.624,19**	7,11% ▲
37,67%	Operasi **4.044,83**	8,16% ▲
15,88%	Modal **389,88**	-3,07% ▼
4,97%	Tak Terduga **2,64**	75,39% ▲
15,42%	Transfer **186,84**	7,46% ▲

Sumber: GFS Kanwil DJPb Prov. Kepri (diolah)

Kredit Program

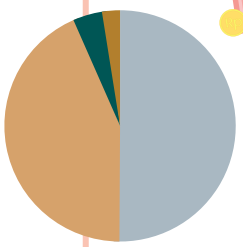

Penyaluran **Rp752,37M**

Debitur **14.311**

- KUR Kecil Rp379,99M **(50,09%)**
- KUR Mikro Rp328,57M **(43,31%)**
- KUR Supermi Rp31,03M **(4,09%)**
- Pemb. UMi Rp13,53M **(2,51%)**

Sumber: SIKP dan SIKP-UMi (diolah)

Kinerja fiskal regional tumbuh membaik ditandai dengan kenaikan pertumbuhan belanja APBN, pendapatan APBD Konsolidasi, dan belanja APBD Konsolidasi meskipun terjadi kontraksi pada pendapatan APBN. Selain melalui belanja, pemerintah turut menstimulasi perekonomian khususnya dari sisi pelaku UMKM melalui kredit program, yaitu KUR dan UMi.

Analisis Tematik
Local Taxing Power

Perbandingan Penerimaan PAD dan Local Tax Ratio (LTR) Provinsi Kepri (2017-2023)

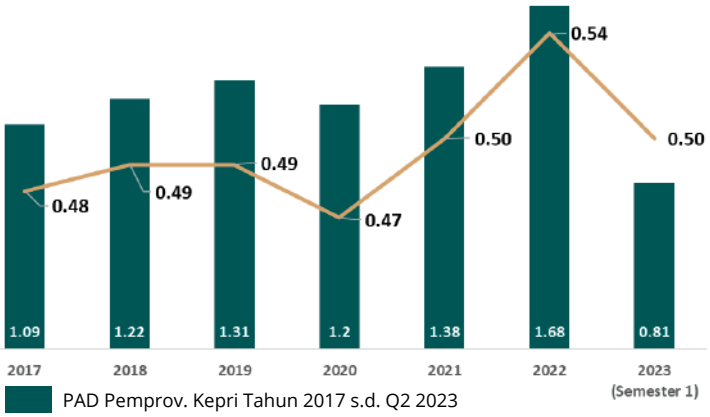

PAD Pemprov. Kepri Tahun 2017 s.d. Q2 2023
Tren Realisasi *LTR* Pemprov. Kepri Tahun 2017 s.d. Q2 2023 (%)

Perbandingan Penerimaan PAD dan Local Tax Ratio Konsolidasi Pemerintah Kab/Kota Kepri (2017-2023)

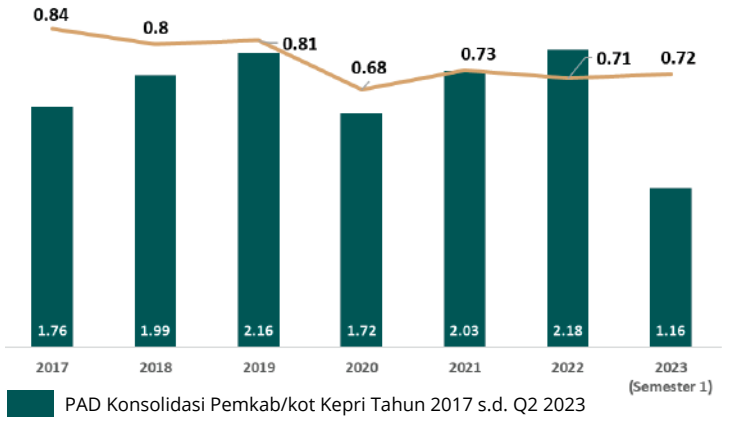

PAD Konsolidasi Pemkab/kot Kepri Tahun 2017 s.d. Q2 2023
Tren Realisasi *LTR* Konsolidasi Pemkab/kot Kepri Tahun 2017 s.d. Q2 2023 (%)

Sumber: BPKAD Pemprov Kepri dan Bapenda Pemkab/kota lingkup Kepri (diolah)

Rata-rata *Local Taxing Power* (LTR) Pemprov Kepri dari tahun 2017 sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 0,50%, sedangkan rata-rata LTR Konsolidasi Pemkab/kot sebesar 0,76%. Artinya tingkat kemandirian fiskal pemerintah provinsi dan kab/kota di Kepri masih sangat rendah. Diperlukan optimalisasi dalam meningkatkan kemandirian fiskal di Kepri melalui reformasi pendapatan daerah yang terdiri dari 4 aspek: Restrukturisasi Pajak Daerah, Kewenangan Pemungutan Opsen Pajak, Peluasan Basis Pajak Daerah, dan Penyederhanaan Retribusi Daerah.

Sumber grafis: Canva

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indikator Makro Ekonomi

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan II-2023 tumbuh sebesar 5,04% (*yoy*). Jika dibandingkan dengan Triwulan I-2023, perekonomian Kepri triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,72% (*qtq*). Secara spasial di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan II-2023 lebih tinggi dibandingkan dari wilayah Sumatera yakni sebesar 4,90 persen *(yoy)* dan berada pada urutan kelima dari struktur perekonomian Sumatera dengan *share* sebesar 7,38 persen. Sementara secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II-2023 adalah sebesar 5,77% (*ctc*), dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan kumulatif terbesar di Regional Sumatera triwulan II-2023.

Pada bulan Juni 2023, tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,64 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 3,52 persen. Secara spasial, dari 24 kota IHK di Sumatera, tercatat seluruh kota mengalami inflasi *yoy* di bulan Juni 2023. Tingkat Inflasi IHK secara tahun kalender *(ytd)* Provinsi Kepulauan Riau tercatat menjadi yang terendah secara Nasional selama tiga bulan berturut-turut yaitu bulan Mei s.d. Juli 2023.

Neraca perdagangan luar negeri provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni tercatat menghasilkan kinerja positif dengan surplus sebesar US$107,75 Juta. Surplus diperoleh dari perhitungan nilai ekspor bulan Juni sebesar US$1.464,66 Juta yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor pada bulan Juni sebesar US$1.356,91 Juta. Namun demikian, nilai tersebut tumbuh negatif sebesar 37,58% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 *(yoy)*.

Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun dari persentasenya. Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepri bulan Maret 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,55 persen poin atau menurun ±9,18 ribu jiwa *(yoy)* dan bila dibandingkan dengan bulan September 2022, Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepri mengalami penurunan sebesar 0,34 persen poin atau menurun ±6,4 ribu jiwa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan pada Maret 2023, diantaranya adalah turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2023 sebesar 0,41 poin bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022. TPT pada bulan Februari 2023 berada pada 7,61 persen. Penduduk yang bekerja pada Februari 2023 sebanyak 1.023 ribu orang, naik sebanyak 50 ribu orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Industri Pengolahan sebesar 41,8 ribu orang yang merupakan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan sinyalemen positif atas perkembangan Industri Pengolahan di Provinsi Kepri.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,88 persen menjadi 76,46 pada tahun 2022 dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 75,79. Capaian IPM Provinsi Kepulauan Riau tersebut mendapatkan peringkat ke 4 tertinggi tingkat nasional untuk tiga tahun berturut-turut.

IPM Provinsi Kepri masuk ke dalam IPM dengan capaian tinggi, namun apabila dilihat lebih rinci pada Kota/Kabupatennya, terjadi ketimpangan yang cukup lebar. Pada tahun 2022, capaian IPM Kota Batam sudah masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi yaitu 81,67, sedangkan IPM di Kabupaten Lingga baru mencapai kategori sedang dengan angka 66,57, selain itu Kepulauan Anambas juga masih masuk ke dalam kategori sedang dengan capaian 69,61, masih cukup jauh dengan capaian Kota Tanjungpinang, yaitu 79,64.

Analisis Fiskal Regional

Realisasi Pendapatan pada Semester I tahun 2023 sebesar Rp5.858 miliar atau 51,06 persen dari target tahun 2023. Pendapatan tersebut hanya bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri pada Semester I 2023, secara nominal mengalami pertumbuhan minus sebesar -6,30% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 (realisasi sebesar Rp6.252 miliar). Penerimaan Perpajakan memberikan kontribusi paling dominan yaitu sebesar 84,20% (Rp4.933 miliar) dibandingkan PNBP yang memberikan kontribusi sebesar 15,80% (Rp925 miliar).

Tax ratio pada Semester I Tahun 2023 sebesar 2,71%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2022 sebesar 3,73%. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara total, karena sebagian penerimaan pajak di Semester I Tahun 2022 ditopang oleh penerimaan PPh Final yang berasal dari program pengungkapan sukarela yang berakhir di bulan Juni 2022, walaupun penerimaan PPh pada periode Semester I Tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan pajak pada semester I tahun 2023 sebesar Rp4.933 miliar, mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,75% dibandingkan dengan semester I tahun 2022, sedangkan Semester I tahun 2023 terdapat realisasi PDRB sebesar Rp161.824 miliar, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,04%.

Belanja Negara dapat direalisasikan sebesar Rp6.546 miliar atau 37,43 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat memberikan kontribusi sebesar 45,15 persen dari total Belanja Negara sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) memberikan kontribusi sebesar 54,85 persen. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.956 miliar atau sebesar 31,01% dari pagu, Realisasi Belanja Negara tumbuh sebesar 14,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tumbuh 34,33 persen sedangkan realisasi TKD tumbuh 2,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp5.504 miliar atau sebesar 39,97 persen dari pagu anggaran. Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp3.521 miliar (64% dari pendapatan daerah) dibandingkan PAD sebesar Rp1.975 miliar (36% dari pendapatan daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumpang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp1.647,79 miliar. Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp244 miliar) dan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp206 miliar). Disisi retribusi daerah, retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi penyumbang realisasi terbesar, yaitu Rp21 miliar.

Pengembangan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan analisis sektor unggulan daerah yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau pada KFR Tahunan 2022 dengan menggunakan metode *Location Quotient, Shift-Share (Differential Shift),* dan analisis Tipologi *Klassen*, sektor unggulan daerah pada Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor Industri Pengolahan sedangkan sektor potensial adalah sektor Perdagangan.

Sampai dengan Semester I tahun 2023, Industri Pengolahan menyumbangkan 40,32% dari total PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, jauh lebih tinggi dari sektor penyumbang kedua yaitu sektor Konstruksi dengan persentase sebesar 19,20%. Sektor Industri Pengolahan terdiri dari beberapa sub sektor, dengan sub sektor penyumbang PDRB terbesar adalah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Logam Dasar dan Industri Alat Angkutan.

Terkait sektor potensial, sampai dengan semester I tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Kepri sebesar 9,22%. Capaian kontribusi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,07% dibandingkan dengan semester I tahun 2022. Jika dilihat pada beberapa tahun sebelumnya di periode yang sama kontribusi sektor perdagangan mengalami tren cenderung stabil walaupun terdapat penurunan kontribusi di tahun 2021.

Pada Provinsi Kepulauan Riau, terdapat dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mendukung perkembangan industri pengolahan, yaitu KEK Galang Batang yang berada pada Kabupaten Bintan dan KEK Batam Aero Technic yang berada pada Kota Batam.

Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat konektivitas dan perdagangan antar wilayah. Maka dari itu, dukungan pemerintah dalam meningkatkan industri pengolahan tidak hanya dukungan secara langsung, namun dukungan secara tidak langsung seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program pengembangan kawasan strategis.

Analisis Tematik

Perkembangan PAD Pemprov Kepri selama 6 tahun terakhir (2017-2022) mengalami tren peningkatan walaupun terdapat anomali yang terjadi khususnya di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Secara akumulasi dari tahun 2017 sampai dengan triwulan II tahun 2023, kontributor terbesar PAD Konsolidasi Kabupaten/Kota adalah Pajak Daerah (72,56%), lalu LLPAD yang sah (19,46%), Retribusi Daerah (5,98%), dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (2,00%).

Pajak Daerah Pemprov Provinsi Kepri mengalami perkembangan tren yang meningkat cukup baik dari tahun 2017 s.d 2022. Walaupun terdapat kontraksi karena pandemi Covid di Tahun 2020, di tahun 2021-2022 tren Pajak Daerah terus konsisten meningkat. Penerimaan daerah dari retribusi mengalami tren yang fluktuatif. Dengan capaian realisasi tertinggi di tahun 2018 (Rp 13,54 miliar) dan terendah di tahun 2017 (Rp3,19 miliar). Pertumbuhan retribusi daerah tertinggi berada pada tahun 2018 (325,01%).

Pajak Daerah Konsolidasi Pemda Kab/Kota mengalami tren pertumbuhan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, walaupun mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020, tren Pajak daerah Kembali mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, namun realisasi tahun 2022 belum dapat mencapai realisasi pajak daerah di tahun 2019 (sebelum pandemic Covid-19).

Rata-rata *Local Tax Ratio* Pemerintah Provinsi Kepri dari tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar 0,50%, sedangkan rata-rata *Local Tax Ratio* Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 0,76%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah provinsi dan Kab/Kota di Kepri masih sangat rendah.

Sehubungan dengan progress Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terdapat tiga pemda yang saat ini sedang dalam tahap evaluasi di Kemendagri dan Kemenkeu, yaitu Pemkab Natuna, Pemkab Karimun, dan Pemkab Lingga. Sedangkan lima pemda lainnya sedang dalam tahapan pembahasan dengan Pansus DPRD.

Salah satu tantangan dalam proses penyusunan Ranperda PDRD adalah penyesuaian Draft Raperda tersebut terhadap PP 35 tahun 2023 tentang Pedoman PDRD. Kanwil DJPb Kepri dan Bapenda Lingkup Kepri diharapkan dapat terus bersinergi dalam memberikan pemikiran dalam mendukung kemajuan Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam Upaya optimalisasi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Rekomendasi

Penurunan Harga CPO di pasar global menurunkan penerimaan Bea Keluar. Pemerintah perlu mendorong komoditas lain yang dapat meningkatkan ekspor yang akhirnya meningkatkan bea keluar. Misalnya dengan terus mendukung dan memfasilitasi agar pengusaha ayam yang melakukan ekspor perdana di Bulan Mei 2023 dapat melakukan ekspor secara rutin bulanan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan potensi komoditas ekspor lainnya, seperti hasil budidaya perikanan (ikan bawal bintang) karena karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan

Kebijakan untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif dan dapat dituangkan di dalam rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Kebijakan untuk menertibkan reklame ilegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame ilegal, misalnya penertiban izin Perizinan Bangunan Gedung.

Saat ini tiap pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait perpajakan untuk disahkan dan menjadi dasar pemungutan perpajakan, sesuai dengan undang-undang HKPD. Penetapan peraturan perpajakan dan retribusi disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing sehingga pendapatan pajak dan retribusi dapat optimal. Pemerintah daerah agar terus secara intensif melakukan percepatan penyelesaian peraturan terkait pajak dan retribusi

daerah, sehingga dapat segera diimplementasikan, yang akhirnya dapat meningkatkan PAD daerah masing-masing.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah agar memperkuat *linking and matching* kebutuhan pekerja di Kepulauan Riau dengan lulusan perguruan tinggi, sekolah vokasi, serta balai pendidikan dan sertifikasi profesi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang intensif kepada siswa dan mahasiswa terkait dengan *skill set* yang dibutuhkan dunia kerja. Sehingga kedepannya masyarakat Kepulauan Riau mampu untuk bekerja dan memiliki daya saing yang tinggi di industri yang sesuai dengan kebutuhan industri Kepulauan Riau.

Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Provinsi Kepri, sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat digunakan untuk memperkecil Human Capital Gap dan Infrastructure Gap yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepulauan Riau. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam mendukung sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, Pemerintah telah menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan daerah *Free Trade Zone* (FTZ) dengan berbagai kemudahan dan insentif fiskal yang diberikan. Saat ini hanya kota Batam yang merupakan wilayah FTZ secara menyeluruh, sehingga dalam upaya mengoptimalisasikan dukungan fiskal dan kemudahan berusaha untuk sektor unggulan, diharapkan pemerintah dapat memperluas FTZ di keseluruhan wilayah Kabupaten Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang agar dapat meningkatkan realisasi investasi dan mendorong pemerataan perekonomian di provinsi Kepri.

Untuk menekan biaya logistik, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman laut/shipping yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Selain itu, hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk meningkatkan PNBP, Kanwil DJPb sebagai Pembina BLU di daerah agar dapat segera melakukan pembinaan terhadap tiga BLU baru di Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan percepatan peningkatan penerimaan BLU dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLU.

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau dapat secara berkala melakukan FGD Raperda PDRD dengan mengundang unit eselon 1 Kementerian Keuangan lain dan Bapenda seluruh kabupaten kota dan provinsi untuk saling bertukar informasi dan memperoleh progress penyusunan serta kendala yang dihadapi masing-masing daerah. Forum tersebut diharapkan akan memacu seluruh pemda untuk dapat mengakselerasi penyelesaian Raperda PDRD yang selaras dengan UU HKPD dan kebijakan fiskal nasional.

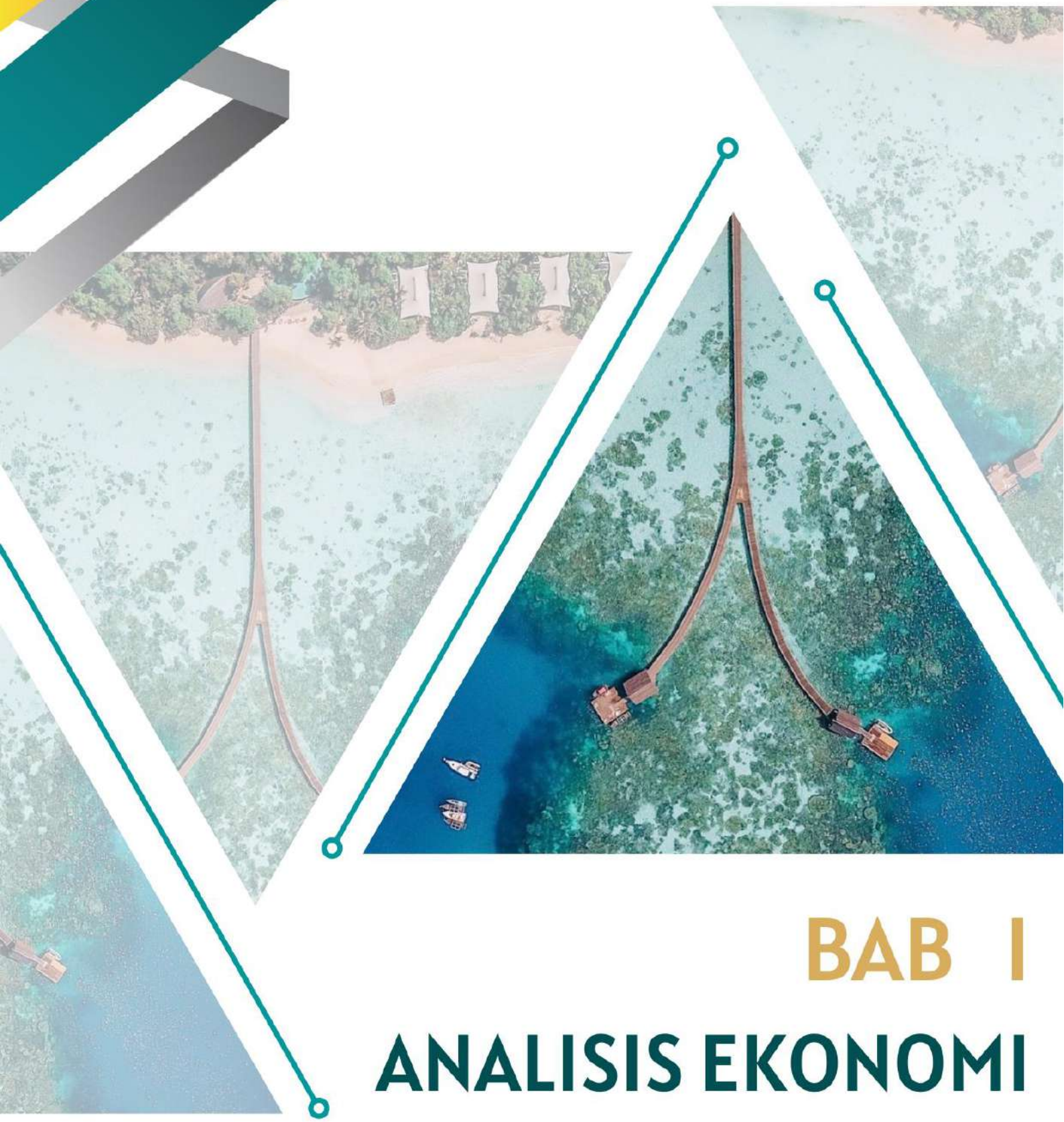

BAB I

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Pulau Bawah, Kab. Kep. Anambas
Sumber: Dinas Pariwisata Prov.Kepri

BAB I
ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada triwulan II-2023, sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,17% (*yoy*), perekonomian Kepri juga tumbuh sebesar 5,04% (*yoy*). Bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, perekonomian Kepri tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II-2022 yang tumbuh sebesar 5,01% (*yoy*). Kemudian, bila dibandingkan dengan triwulan I-2023, perekonomian Kepri pada triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,72% (*q-to-q*).

Grafik 1.1 - Pertumbuhan Ekonomi Kepri dan Nasional Tahun 2019-2023 (yoy)

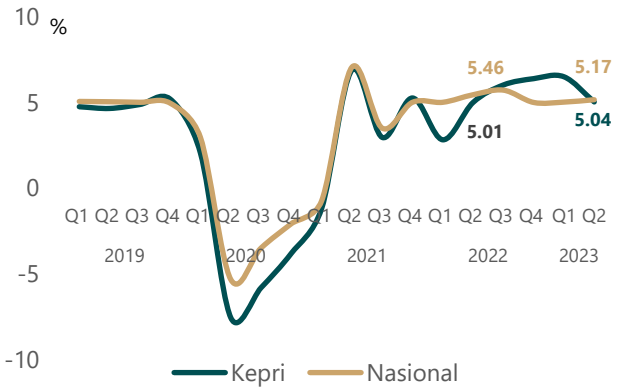

Grafik 1.2 - Pertumbuhan Ekonomi Kepri dan Nasional Tahun 2019-2023 (q-to-q)

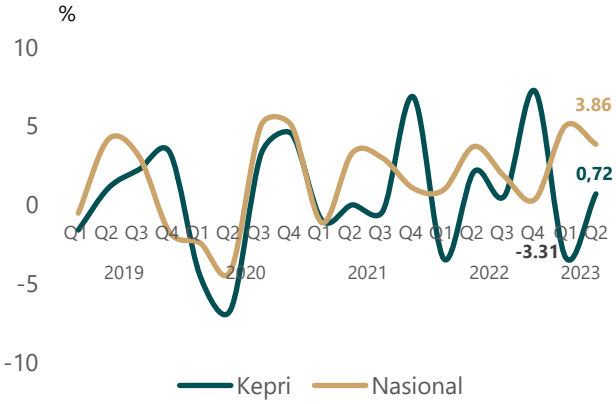

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Kepri 2019-2023 (diolah)

Kemudian, bila dilihat dari target RPJMD Provinsi Kepri tahun 2022-2026, pertumbuhan ekonomi di Kepri ditargetkan sebesar 4,9 - 5,8% (*yoy*), dan bila dilihat pada tingkat nasional, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 4,5 - 5,3% (*yoy*). Maka, pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini masih berada di dalam rentang target pertumbuhan Ekonomi di Kepri dan tingkat Nasional.

Secara spasial, di wilayah Sumatera pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan II-2023 lebih tinggi dibandingkan dari wilayah Sumatera sebesar 4,90% (*yoy*) dan berada pada urutan kelima dari struktur perekonomian Sumatera dengan share sebesar 7,38%.

Grafik 1.3 - Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Regional Sumatera (% yoy)

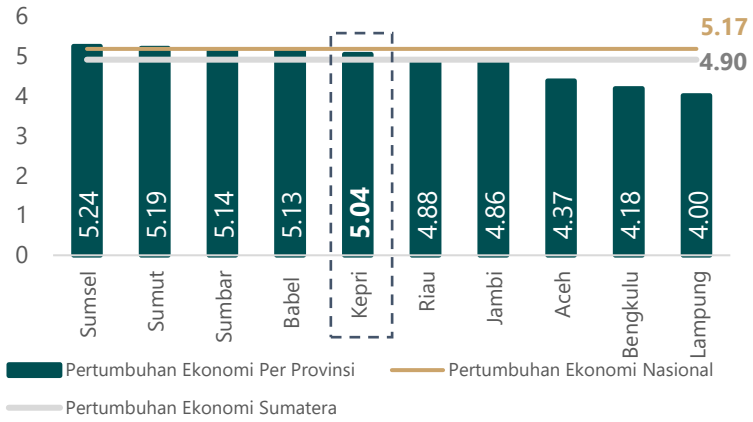

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Grafik 1.4 - Distribusi Pertumbuhan Ekonomi di Regional Sumatera (% yoy)

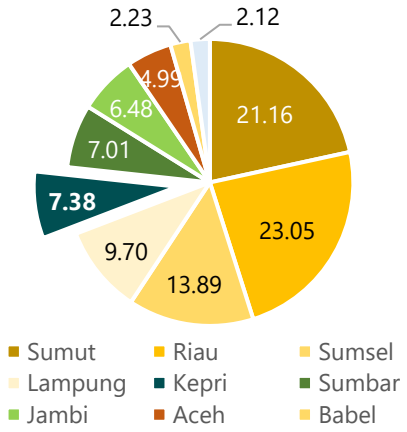

Grafik 1.5 - Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Regional Sumatera Tw II-2023 (% ctc)

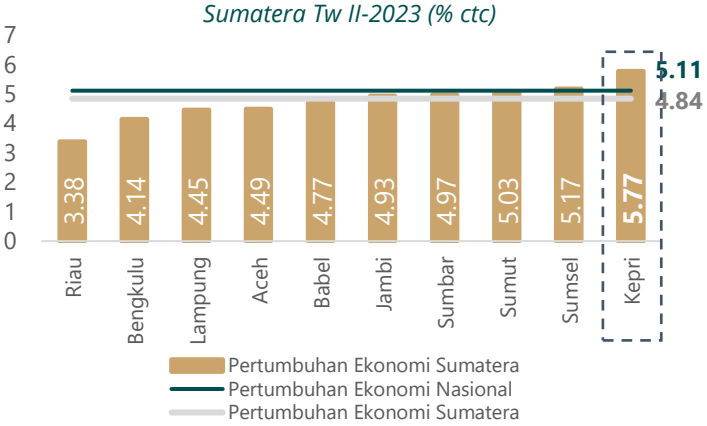

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Pertumbuhan tertinggi ada di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,24% (*yoy*), selanjutnya dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara 5,19% (*yoy*), dan Provinsi Sumatera Barat 5,14% (*yoy*). Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten mengalami akselerasi pertumbuhan sejak tahun 2022. Sementara secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II-2023 adalah sebesar 5,77% (*ctc*), dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan kumulatif terbesar di Regional Sumatera triwulan II-2023.

Percepatan tersebut didukung oleh kondisi mobilitas masyarakat yang terus membaik pasca pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak akhir Desember 2022. Kondisi tersebut selanjutnya meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong peningkatan kegiatan pada lapangan usaha transportasi, hotel, dan restoran. Selain itu, aktivitas produksi industri pengolahan juga terus mengalami pertumbuhan, terutama golongan barang elektronik dan perkapalan. Kondisi ini juga didukung oleh aktivitas masyarakat selama bulan Ramadhan 2023, termasuk pemberian THR. Selain itu arus mudik lebaran Idul Fitri dan Libur Semester anak sekolah juga menjadi faktor baiknya pertumbuhan ekonomi pada semester I 2023.

Nominal PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai yang dijadikan sebagai ukuran dalam mengukur kinerja perekonomian pada suatu region/wilayah tertentu. Perekonomian Kepri di triwulan II-2023 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp81,50 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp49,16 triliun.

PDRB Menurut Pengeluaran

Tabel 1.1 - Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran di Provinsi Kepri Tahun 2022-2023

No	Komponen	Harga Berlaku (triliun rupiah)						Harga Konstan (triliun rupiah)				
		Q2 2022	Kontribusi Q2 2022	Q1 2023	Kontribusi Q1 2023	Q2 2023	Kontribusi Q2 2023 (%)	Q2 2022	Q1 2023	Q2 2023	Growth (*q-to-q*)	Growth (*yoy*)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	31,14	41,07%	33,07	41,17%	33,77	41,43%	19,01	19,4	19,67	1,42%	3,46%
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,19	0,25%	0,19	0,23%	0,2	0,25%	0,11	0,1	0,11	7,42%	5,77%
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,35	4,42%	2,11	2,63%	3,78	4,64%	1,93	1,22	2,13	74,56%	10,35%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,06	40,96%	34,83	43,37%	34,95	42,88%	18,16	19,54	19,58	0,20%	7,81%
5	Perubahan Inventori	-0,14	-0,19%	0,67	0,84%	9,68	11,87%	-0,08	0,38	-0,59	-255,02%	607,31 %
6	Ekspor Barang dan Jasa	74,88	98,75%	115,35	143,61%	105,85	129,87%	49,37	78,97	76,2	-3,51%	54,34%
7	Impor Barang dan Jasa	63,05	83,14%	105,91	131,86%	95,98	117,77%	40,39	70,81	67,96	-4,03%	68,26%
8	Net Ekspor	-1,6	-2,11%	9,44	11,76%	9,87	12,10%	-1,32	8,16	8,24	1,01%	
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**75,83**	**100,00%**	**80,32**	**100,00%**	**81,5**	**100,00%**	**46,8**	**48,81**	**49,16**	**0,72%**	**5,04%**

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Pada triwulan II 2023, PDRB ADHB Kepri mencapai Rp81,50 triliun. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi memberikan kontribusi terbesar, yaitu Rp34,95 triliun (42,88%). PMTB juga mengalami pertumbuhan *year on year* sebesar 7,81% dibandingkan triwulan II tahun 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan investasi di provinsi Kepri secara *year on year* di triwulan II 2023. Investasi Kepri berdasarkan data dari BKPM terealisasi sebesar Rp1,76 triliun atau tumbuh 163,00% dibandingkan tahun 2022 pada periode yang sama. Realisasi investasi tersebut didominasi oleh sektor tersier (77,77%), dengan subsektor yang paling berkontribusi yaitu Hotel dan Restoran Rp306,77 miliar (22,38%), lalu subsektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi Rp304,78 miliar (22,24%), dan subsektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp293,75 miliar (21,43%).

Grafik 1.6 Jumlah Investasi Per Sektor di Provinsi Kepri Triwulan II Tahun 2023 (miliar Rp)

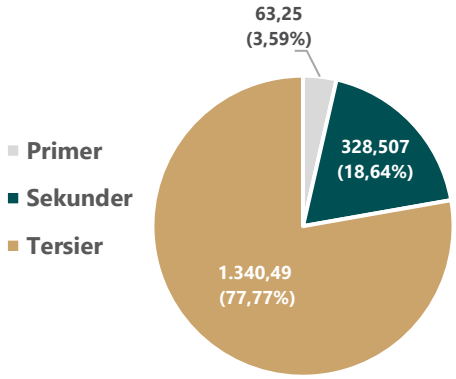

Grafik 1.7 Jumlah Investasi pada Sektor Tersier di Provinsi Kepri Triwulan II Tahun 2023 (miliar Rp)

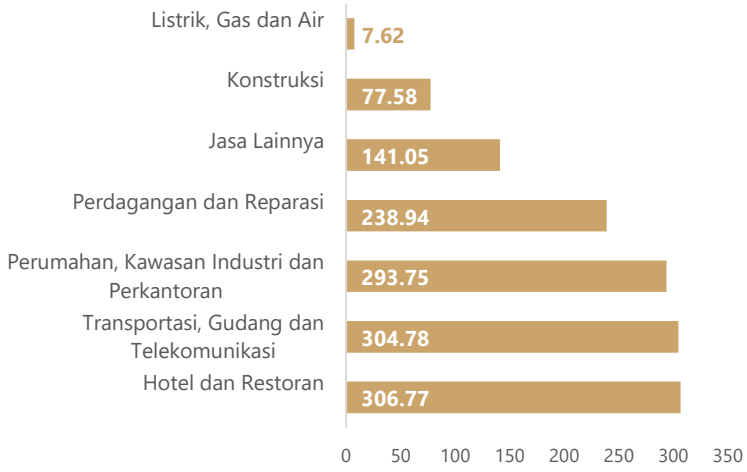

Sumber: NSWI BKPM, 2023 (diolah)

Kemudian, kontribusi terbesar kedua adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang telah terealisasi Rp33,77 triliun (41,43%). Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami

pertumbuhan 3,46% (*yoy*). Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah pada bulan April tahun 2023 turut mendorong kontribusi konsumsi terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat setelah sebagian masyarakat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

Grafik 1.8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepri Berdasarkan Pintu Masuk Tahun 2022-2023 (orang)

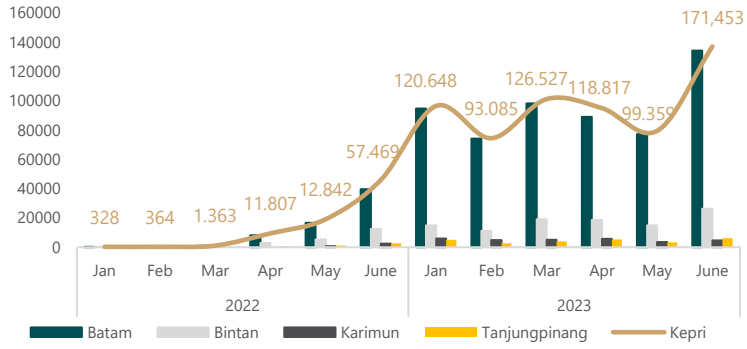

Grafik 1.9 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepri Triwulan II-2023 (orang)

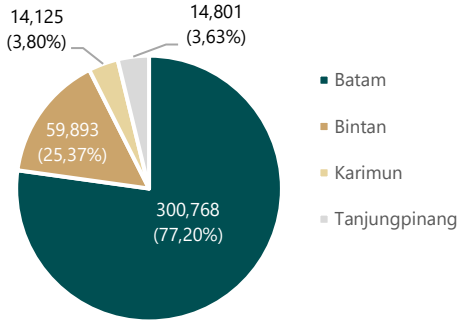

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Selain itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Triwulan II tahun 2023 sebanyak 389.587 orang juga turut mendorong kontribusi konsumsi terhadap PDRB di Provinsi Kepri. Kota Batam menjadi kota yang paling dominan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dengan total kunjungan 300.768 orang pada triwulan II tahun 2023 ini, diikuti Kabupaten Bintan (59.893 orang), Kota Tanjungpinang (14.801 orang), Kabupaten Karimun (14.125 orang).

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan data PDRB Triwulan II 2023 Perlapangan usaha atas harga berlaku, terdapat 3 sektor yang berkontribusi dominan terhadap perekonomian di Provinsi Kepri, yaitu Industri Pengolahan (38,23%), Konstruksi (19,26%), dan Pertambangan dan Penggalian (12,53%). Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,27% (*yoy*). Kontraksi juga terjadi sektor Pertambangan dan Penggalian (-0,51%). Namun berbeda dengan sektor konstruksi yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,48%. Pertumbuhan sektor konstruksi yang positif tersebut, sejalan dengan pelaksanaan proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan arteri yang mencapai 20 km untuk menghubungkan Batu Ampar hingga Batu Besar, Nongsa, kota Batam.

Tabel 1.2 - Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kepri Tahun 2022-2023

Lapangan Usaha	*Harga Berlaku (triliun rupiah)*				Harga Konstan *(triliun rupiah)*				
	Q1 2023	Kontribusi Q1 2023	Q2 2023	Kontribusi Q2 2023	Q2 2022	Q1 2023	Q2 2023	%Q2 (*q-to-q*)	%Q2 (*yoy*)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,37	2,95%	2,34	2,87%	1,38	1,36	1,34	-0,98%	-2,44%
Pertambangan dan Penggalian	8,34	10,38%	10,21	12,53%	6,3	5,18	6,27	21,04%	-0,51%
Industri Pengolahan	34,07	42,41%	31,16	38,23%	19,07	20,89	19,02	-8,95%	-0,27%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,87	1,08%	0,89	1,09%	0,47	0,51	0,52	2,64%	11,03%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,10%	0,07	0,09%	0,06	0,06	0,06	-6,90%	-3,28%
Konstruksi	15,38	19,15%	15,7	19,26%	8,21	8,87	9,07	2,16%	10,48%

Lapangan Usaha	*Harga Berlaku (triliun rupiah)*				Harga Konstan *(triliun rupiah)*				
	Q1 2023	Kontribusi Q1 2023	Q2 2023	Kontribusi Q2 2023	Q2 2022	Q1 2023	Q2 2023	%Q2 (*q-to-q*)	%Q2 (*yoy*)
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,09	8,82%	7,84	9,61%	4,16	3,88	4,25	9,44%	2,19%
Transportasi dan Pergudangan	1,63	2,03%	1,74	2,13%	0,86	0,99	1,04	5,62%	21,77%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	2,04%	1,66	2,03%	0,82	1,18	1,18	0,71%	44,71%
Informasi dan Komunikasi	2,31	2,88%	2,34	2,87%	1,27	1,91	1,93	1,31%	51,60%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,65%	2,13	2,61%	1,18	1,32	1,33	0,41%	12,83%
Real Estate	0,91	1,14%	0,92	1,13%	0,58	0,62	0,62	0,01%	7,51%
Jasa Perusahaan	0,003	0,00%	0,003	0,00%	0,001	0,002	0,002	0,01%	27,36%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,5	1,87%	2,52	3,09%	1,32	0,86	1,37	58,75%	3,39%
Jasa Pendidikan	1,12	1,39%	1,14	1,40%	0,56	0,59	0,6	1,61%	7,44%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,84%	0,57	0,69%	0,42	0,48	0,39	-17,69%	-7,37%
Jasa lainnya	0,21	0,26%	0,29	0,36%	0,15	0,12	0,17	42,68%	8,79%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	**80,32**	**100,00%**	**81,505**	**100,00%**	**46,798**	**48,81**	**49,16**	**0,72%**	**5,04%**

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi secara *year on year* adalah sektor Informasi dan Komunikasi (51,60%), lalu diikuti Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (44,71%). Pada triwulan II tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah penumpang angkutan udara dan angkutan laut yang dipengaruhi oleh adanya arus mudik lebaran Idul Fitri. Selain arus mudik, libur semester anak-anak sekolah juga terjadi pada triwulan II 2023 tepatnya pada bulan Juni. Maka dari itu, fenomena tersebut turut mendongkrak sektor penyediaan akomodasi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Selanjutnya terdapat Sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 21,77% sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan arus mudik lebaran idul fitri di triwulan II tahun 2023.

1.1.2 Kontribusi Fiskal Terhadap Pembentukan PDRB

Berdasarkan tabel 1.1, pengeluaran konsumsi pemerintah berkontribusi sebesar 4,64% atau telah terealisasi Rp3,78 triliun. Capaian realisasi Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut mengalami pertumbuhan 10,35% secara *year on year*. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan belanja APBN di Kepri yang telah mengalami pertumbuhan sebesar 14,68%. Peningkatan Belanja Negara karena terdapat peningkatan pada Belanja Modal (34,85%) dan Bantuan Sosial (32,91%). Selain itu, belanja daerah juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,11%, yang didorong oleh pertumbuhan belanja operasi (8,16%), belanja tidak terduga (75,39%), dan belanja transfer (7,46%). Penjelasan lebih dalam mengenai kontribusi APBN dan APBD akan dijelaskan secara rinci di Bab II.

1.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai dengan adanya kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara berkelanjutan. Secara nasional, tingkat inflasi *year on year* (*yoy*) Juni 2023 sebesar 3,52% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,67. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi year on year (*yoy*) sebesar 2,75%, dan Kota Tanjungpinang sebesar 1,78%.

Grafik 1.10 - Inflasi di Regional Sumatera Tw II-2023 (yoy)

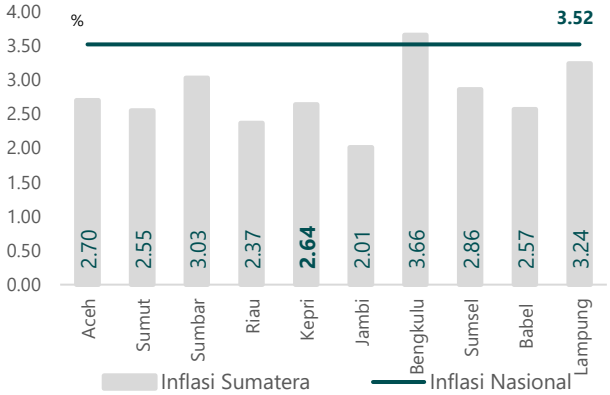

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Grafik 1.11 Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota di Kepulauan Riau dan Nasional (yoy)

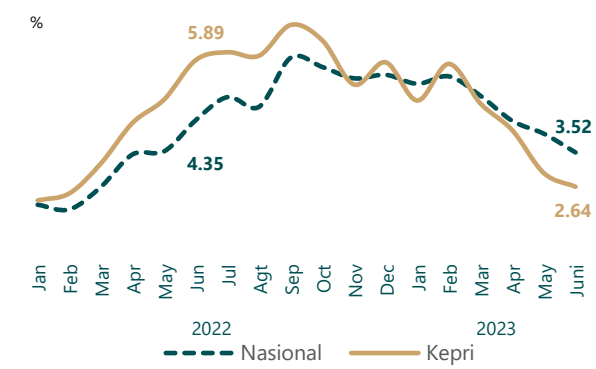

Sumber: BPS Kepri, Juni 2023

Pada Provinsi Kepulauan Riau, tingkat inflasi dari gabungan 2 kota di Provinsi Kepri (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) tercatat sebesar 2,64% (*yoy*) dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 113,99. Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 sebesar 5,89% (*yoy*) dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,52%.

Secara spasial, dari 24 kota IHK di Sumatera, tercatat seluruh kota mengalami inflasi *yoy* di bulan Juni 2023. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga sebesar 3,88% dan inflasi terendah ada di Kota Gunungsitoli sebesar 1,01%. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang berada di peringkat ke-10 dan ke-21 dari 24 kota yang mengalami inflasi di Sumatera. Di tingkat nasional pada 90 kota IHK di Indonesia, inflasi tertinggi ada di Kota Ambon sebesar 6,10%. Bila dibandingkan secara nasional, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang berada di peringkat ke-68 dan ke-87 dari 90 kota yang mengalami inflasi *yoy* se-Indonesia.

Perkembangan inflasi di Kepulauan Riau maupun di tingkat nasional pada bulan Juni 2023 mengalami penurunan yang signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Namun demikian, Inflasi Provinsi Kepri pada bulan Juni 2023 masih berada di dalam rentang target sasaran inflasi 2023, yakni 3%±1%. Inflasi cenderung bias ke bawah mempertimbangkan sejumlah indikator harga yang menunjukkan adanya penurunan pada sejumlah komoditas.

Grafik 1.12 - Perkembangan Inflasi Kepri Tahun 2021-2023 (yoy)

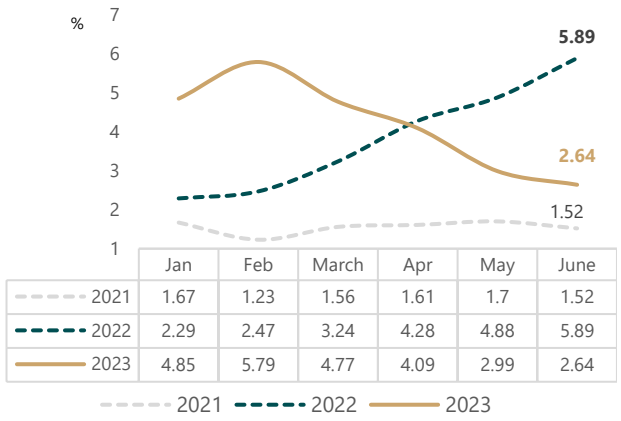

	Jan	Feb	March	Apr	May	June
2021	1.67	1.23	1.56	1.61	1.7	1.52
2022	2.29	2.47	3.24	4.28	4.88	5.89
2023	4.85	5.79	4.77	4.09	2.99	2.64

Grafik 1.13 - Inflasi pada Dua Kota IHK Provinsi Kepri Tahun 2022-2023 (yoy)

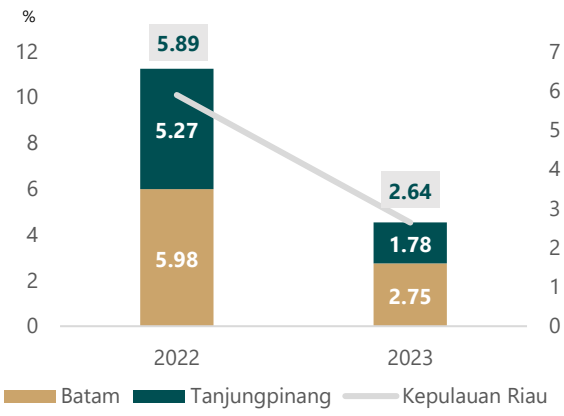

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Secara global, tekanan inflasi diperkirakan turun seiring dengan meredanya permintaan terhadap produk pangan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha. Penurunan tren inflasi juga sejalan dengan berkurangnya tekanan inflasi dari komoditas global dan membaiknya rantai pasok dunia, hal tersebut juga merupakan dampak *high based effect* dari penyesuaian BBM yang terjadi di tahun 2022 sehingga inflasi di tahun 2023 menjadi lebih rendah.

Komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar dari gabungan 2 kota IHK Kepri pada bulan Juni 2023 adalah angkutan udara 0,20%, telur ayam ras 0,09%, sawi hijau 0,06%, cabai rawit 0,02%, dan rokok kretek filter sebesar 0,02%. Kemudian, komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar pada bulan Juni 2023 adalah bensin (-0,07%), emas perhiasan (-0,03%), daging ayam ras (-0,03%), kacang panjang (-0,03%), dan ikan mujair (-0,01%).

Tingkat Inflasi IHK secara tahun kalender (ytd) Provinsi Kepulauan Riau tercatat menjadi

Grafik 1.14 - Perkembangan Inflasi Kepri s.d. Triwulan II Tahun 2023 (ytd)

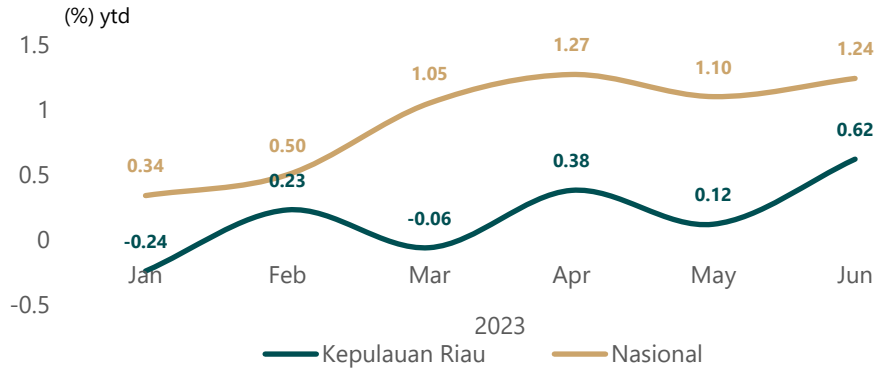

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

yang terendah secara Nasional selama tiga bulan berturut-turut yaitu bulan Mei s.d. Juli 2023. Hal ini tentunya merupakan hasil upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim TPID Kepri di tahun 2023, salah satunya melalui *Launching* Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Kepri tahun 2023 dengan tema Kepri "Bersahabat" (Berkolaborasi dalam Stabilisasi Harga dan Pasokan Bahan Pangan Antar Daerah).

GNPIP dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Kegiatan operasi pasar/pasar murah di lebih dari 84 titik, termasuk bantuan pangan bersubsidi sebanyak 106.000 paket di seluruh kabupaten/kota se-Kepri dengan melibatkan asosiasi distributor, koperasi, kelompok tani dan nelayan, BUMD, *modern retailer*, Bulog, dan TNI yang didukung oleh APBD dan BI Kepri. Selain itu, BULOG juga telah dilakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras melalui 285 titik jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) dan agen distributor di Batam dan Tanjungpinang.
2. Perluasan kerja sama antar daerah, penguatan alsintan dan saprodi pertanian, penguatan infrastruktur TIK dan digitalisasi data pangan melalui *dashboard* informasi harga.
3. Optimalisasi pupuk organik, pemberian bibit cabai, dan sekolah lapang pada demplot bibit cabai organik di Kabupaten Karimun dan Kota Batam.
4. Penguatan koordinasi dan sinergi program melalui *High Level Meeting* TPID se-Provinsi Kepri yang dirangkai dengan *online business matching* antara distributor se-Provinsi Kepri dengan produsen cabai dan telur di Kediri dan Sumatera. Kemudian, juga dilaksanakan kerjasama antar daerah Kepri dengan Lombok, Bukittinggi, Kediri, Blitar dan Lampung, untuk memperoleh pasokan cabai merah dan telur ayam ras dengan melibatkan distributor dan petani di Kepri.
5. Penyerahan bibit cabai sebanyak 25.000 paket (bibit dan pupuk) kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah Kepri, serta 2.000 paket kepada 5 Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kab. Lingga.

1.1.4 Ekspor Impor

Neraca Perdagangan

Grafik 1.15 - Perkembangan Net Ekspor Provinsi Kepri Tahun 2019-2023 (yoy)
(Juta USD)

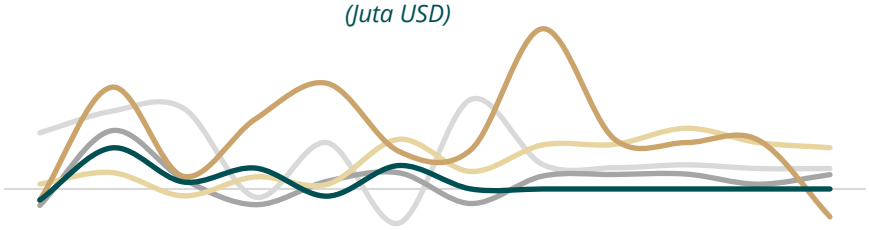

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec
2019	257.87	357.37	370.96	-37.71	212.65	-156.99	411.34	112.66	97.53	110.88	94.01	93.81
2020	-75.77	267.87	44.95	-72.19	35.31	74.02	-67.02	59.31	66.46	68.36	22.10	65.64
2021	22.35	75.66	-31.61	55.59	21.30	228.39	80.30	202.51	204.84	279.07	213.30	189.62
2022	-50.89	467.62	57.74	321.24	485.41	172.61	179.92	736.44	228.87	213.21	225.10	-128.24
2023	-51.15	188.73	31.92	95.96	-33.08	107.75						

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Neraca perdagangan luar negeri provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni tercatat menghasilkan kinerja positif dengan surplus sebesar US$107,75 Juta. Surplus diperoleh dari perhitungan nilai ekspor bulan Juni sebesar US$1.464,66 Juta yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor pada bulan Juni sebesar US$1.356,91 Juta. Namun demikian, nilai tersebut tumbuh negatif sebesar 37,58% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 (*yoy*).

Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan upaya terbaik dalam meningkatkan infrastruktur *Hub Logistik* dalam memajukan perekonomian dan pergerakan ekspor impor di Kepri. Dukungan ini diharapkan dapat membentuk keseimbangan antara impor dan ekspor produk demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan Ekspor

Nilai total ekspor luar negeri dari Provinsi Kepulauan Riau (migas dan non migas) pada bulan Juni 2023 sebesar US$1.464,66 Juta. Nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,11% bila dibandingkan dengan bulan Juni 2022 (*yoy*).

Grafik 1.16 - Perkembangan Total Ekspor Provinsi Kepri Tahun 2021-2023 (yoy)

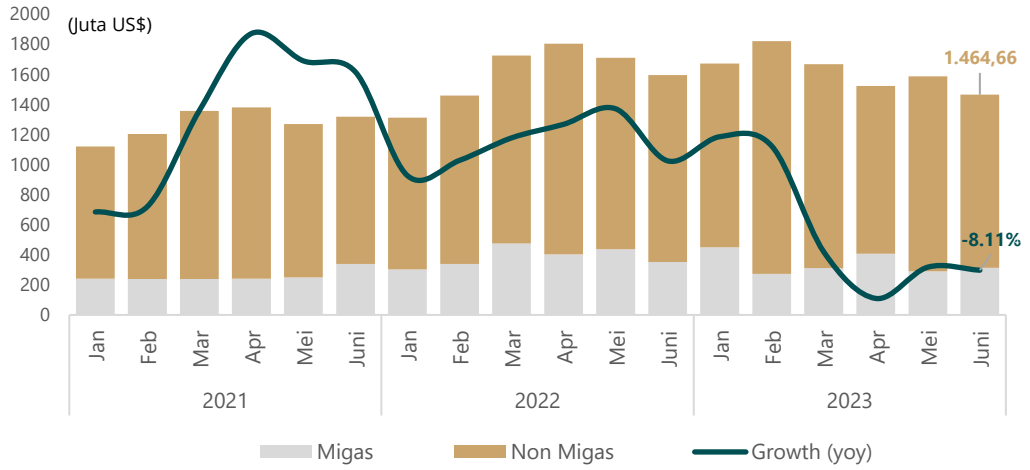

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Sektor nonmigas yang terdiri atas Hasil Industri, Hasil Pertanian, Hasil Tambang, dan Lainnya, menyumbang 78,65% atau US$1.151,99 juta dari total ekspor Provinsi Kepri pada bulan Juni 2023 yang didominasi oleh golongan mesin/peralatan listrik (mesin/pesawat mekanik, kapal laut). Kemudian, penurunan ekspor pada sektor non migas sebesar 8,11% (*yoy*) yang disebabkan oleh turunnya ekspor industri pembuatan mesin kapal laut yang cukup signifikan sebesar 94,31%.

Komoditas ekspor pada sektor migas di Provinsi Kepri terdiri atas Gas Alam, Hasil Minyak, dan Minyak Mentah. Pada bulan Juni 2023, sektor migas menyumbang 21,35% atau US$161,39 juta dari total ekspor Provinsi Kepri. Penurunan ekspor migas sebesar 4,85% (*yoy*) dipengaruhi oleh turunnya ekspor industri pengolahan hasil minyak di Kabupaten Anambas. Kemudian, penurunan nilai ekspor sektor migas juga didorong oleh harga minyak dan gas yang secara global mengalami perlambatan, khususnya harga minyak nabati dan *Crude Palm Oil* (CPO).

Nilai ekspor yang mengalami pertumbuhan negatif juga berdampak pada sektor fiskal, khususnya Bea Keluar. Sampai dengan bulan Juni 2023, perolehan Bea Keluar mencapai Rp92,76 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 75,23%.

Pada bulan Juni 2023, negara Singapura masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Kepulauan Riau dengan total nilai ekspor sebesar US$375,63 juta atau mencapai 25,65% dari total ekspor Provinsi Kepri bulan Juni 2023. Komoditas ekspor ke Singapura didominasi oleh mesin/peralatan listrik (33,78%), bahan bakar mineral (32,87%), dan mesin-mesin/pesawat mekanik (16,76%). Kemudian, disusul oleh Amerika (US$288,59 Juta) dan Tiongkok (US$66,37 juta).

Impor

Nilai total impor Provinsi Kepulauan Riau (migas dan non migas) pada bulan Juni 2023 sebesar US$1.356,91 Juta. Nilai impor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,85% bila dibandingkan dengan bulan Juni 2022 (*yoy*).

Grafik 1.17 - Perkembangan Total Imporr Provinsi Kepri Tahun 2021-2023 (yoy)

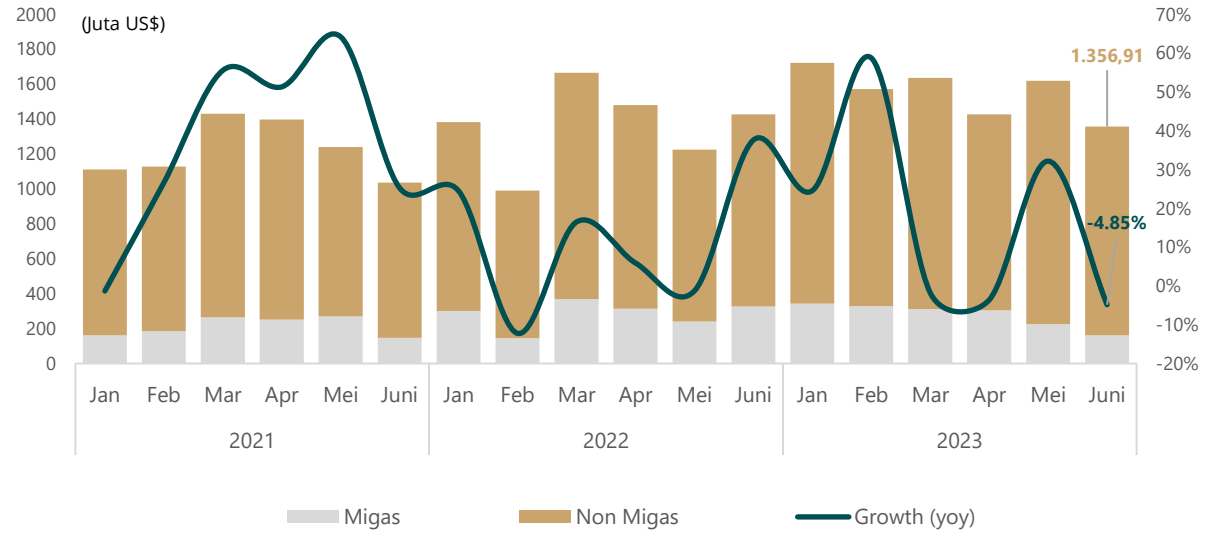

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Pada bulan Juni 2023, nilai impor terbesar di Provinsi Kepri bersumber dari Negara Tiongkok sebesar US$ 329,88 juta (24,31%), kemudian disusul oleh negara Singapura (15,71%) dan Jerman (11,51%). Kemudian, bila dilihat dari golongan penggunaan barang, impor di Provinsi Kepri masih didominasi oleh Barang Baku dan Penolong (80,67%), yang disusul oleh Barang Modal (14,98%) dan Barang Konsumsi (4,35%).

Barang Baku dan Penolong yang menjadi mayoritas produk impor ke Provinsi Kepri mencerminkan bahwa sektor unggulan di Provinsi Kepri, ada pada sektor industri manufaktur, khususnya pada produk mesin dan peralatan listrik yang nantinya akan kembali di ekspor ke luar negeri.

Namun demikian, kontraksi perolehan nilai impor sebesar 4,85% tidak memberikan dampak yang cukup signifikan pada perolehan bea masuk yang pada bulan Juni 2023 mencapai Rp446,55 miliar atau tetap tumbuh sebesar 4,95% bila dibandingkan dengan Juni 2022 (*yoy*).

1.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat penduduk miskin di sebuah daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.

Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69% dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun dari persentasenya.

Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepri bulan Maret 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,55% poin atau menurun ±9,18 ribu jiwa (*yoy*) dan bila dibandingkan dengan bulan September 2022, Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepri mengalami penurunan sebesar 0,34% poin atau menurun ±6,4 ribu jiwa.

Grafik 1.18 -Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Kepri Tahun 2019-2023 (ribu jiwa)

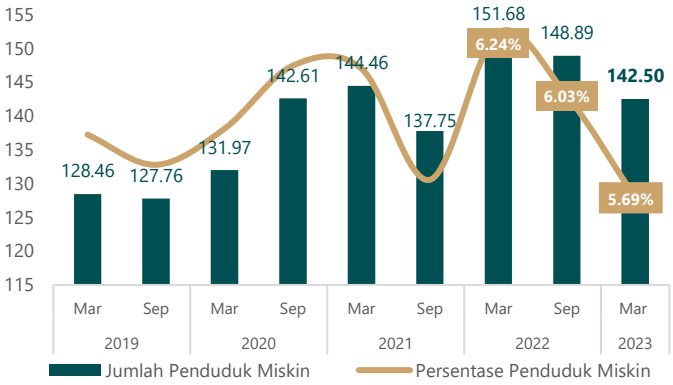

Grafik 1.19 - Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2023 (ribu jiwa)

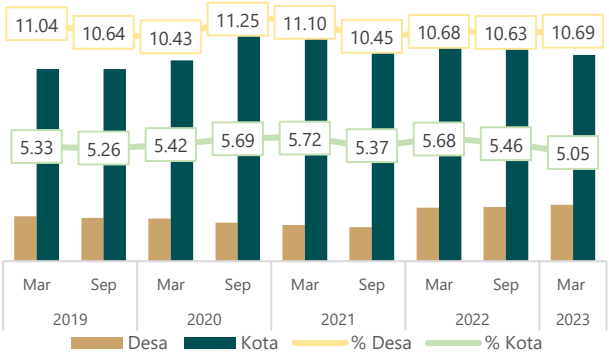

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di Kepri yang sebesar 5,69% menjadi persentase terendah keenam se-Indonesia, atau terendah kedua di Pulau Sumatera di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini juga berada di bawah angka kemiskinan Nasional yang sebesar 9,36%. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Provinsi Kepri yang menargetkan persentase penduduk miskin di Tahun 2023 sebesar 5,74%, persentase penduduk miskin di Kepri (5,59%) masih berada dalam rentang yang aman dan bahkan lebih dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan pada Maret 2023, diantaranya adalah turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2023 sebesar 0,41 poin bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022. TPT pada bulan Februari 2023 berada pada 7,61%. Penduduk yang bekerja pada Februari 2023 sebanyak 1.023 ribu orang, naik sebanyak 50 ribu orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Industri Pengolahan sebesar 41,8 ribu orang yang merupakan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan sinyalemen positif atas perkembangan Industri Pengolahan di Provinsi Kepri.

Beberapa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan adalah adanya operasi pasar murah yang merupakan kegiatan GNPIP bekerjasama dengan Bank Indonesia, program subsidi dengan bunga pinjaman nol% untuk UMKM, dan percepatan belanja pemerintah. Pemerintah juga turut mendorong daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang s.d. semester I tahun 2023 telah tersalurkan sebesar Rp18,29 miliar kepada 275 desa di lingkup Provinsi Kepri.

1.2.2 Tingkat Pengangguran

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak sebanyak 1.107.353 orang, turun 152.359 orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri pada Februari 2023 mencapai angka 7,61%, turun 0,41 poin dibandingkan dengan Februari 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.023.125 orang, meningkat sebanyak 50.000 orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak (berdasarkan sakernas Februari 2023) adalah Sektor Industri Pengolahan 27,42%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,24%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,63%.

Grafik 1.20 - Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepri Tahun 2020-2023

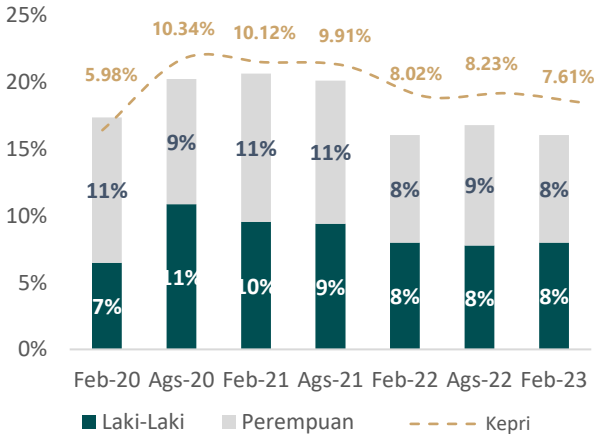

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Pada periode Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kepri lebih tinggi dibandingkan dengan persentase TPT nasional, yaitu 5,86% per Februari 2023 menyebabkan Kepulauan Riau masuk dalam provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ke-2 tingkat nasional. Namun, Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi salah satu wilayah dengan penurunan TPT tertinggi, yakni sebesar -1,68%.

Penurunan TPT tersebut dengan kembali bergeliatnya sektor ekonomi dan kreatif, khususnya hotel dan restoran. Pegawai hotel dan restoran yang semula dirumahkan sudah mulai terserap kembali seiring dengan diskresi pemerintah baik dari negara tetangga yaitu Singapura dan pemerintah pusat untuk kedatangan dan keberangkatan wisatawan asing serta dibukanya beberapa tempat wisata baru di Kepulauan Riau.

Kemudian, tumbuhnya seluruh komponen pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya PMTB yang tumbuh sebesar 7,81% secara *year on year* turut meningkatkan perluasan lapangan kerja baru. Hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya kesanggupan pihak swasta akan tenaga kerja dan berkontribusi atas penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kepri.

1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Koefisien Gini atau *Gini Ratio* adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi.

Peningkatan indikator kesejahteraan di Provinsi Kepri seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka nyatanya tidak diikuti dengan penurunan Rasio Gini di Provinsi Kepri. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepri yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,340, masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang pada Maret 2023 berada di angka 0,388 Meningkat 0,015 *point* dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran melebar

pada periode Maret 2023. Namun, bila dibandingkan dengan periode Maret 2022, Rasio Gini tercatat menurun sebesar 0,002 *point* (yoy).

Grafik 1.21 - Perkembangan Rasio Gini Provinsi Kepri Tahun 2019-2022 (ribu jiwa)

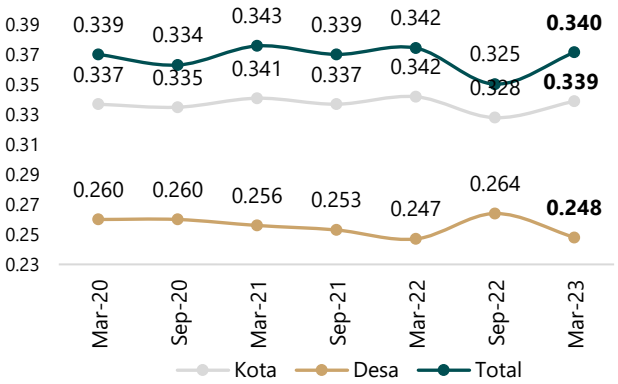

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepulauan Riau yang pada periode Maret 2023 tidak dirasakan secara merata. Artinya, golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam menikmati "kue" suksesnya pertumbuhan ekonomi.

Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah dengan upaya yang dilakukan, diantaranya dengan tetap menyalurkan bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja yang layak serta perbaikan standar pengupahan yang dibutuhkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut ketidakpastian ekonomi ke depan.

Apabila dilihat lebih rinci, tren ketimpangan Kepri di perkotaan mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tren ketimpangan di pedesaan. Pada Maret 2023, ketimpangan di perkotaan mencapai angka 0,339. Sedangkan angka gini rasio di desa per Maret 2023 sebesar 0,248, angka ini termasuk rendah selama periode tiga tahun terakhir.

Penurunan rasio gini di pedesaan tersebut juga didorong oleh adanya intensitas penyaluran bantuan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa), penciptaan lapangan kerja yang layak, serta sejalan dengan pemulihan ekonomi untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut potensi ketidakpastian ekonomi ke depan.

1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam memahami kondisi ekonomi dan kesejahteraan petani serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu regional. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara harga barang yang dihasilkan petani dengan harga barang yang harus mereka bayar sebagai konsumsi maupun input produksi. Nilai tersebut dipengaruhi oleh produktivitas, permintaan, harga komoditas, harga barang konsumsi, harga pupuk, serta biaya operasi/produksi lain seperti upah dan modal kerja.

Grafik 1.22 -Perkembangan NTP Provinsi Kepri Tahun 2022-2023 (yoy)

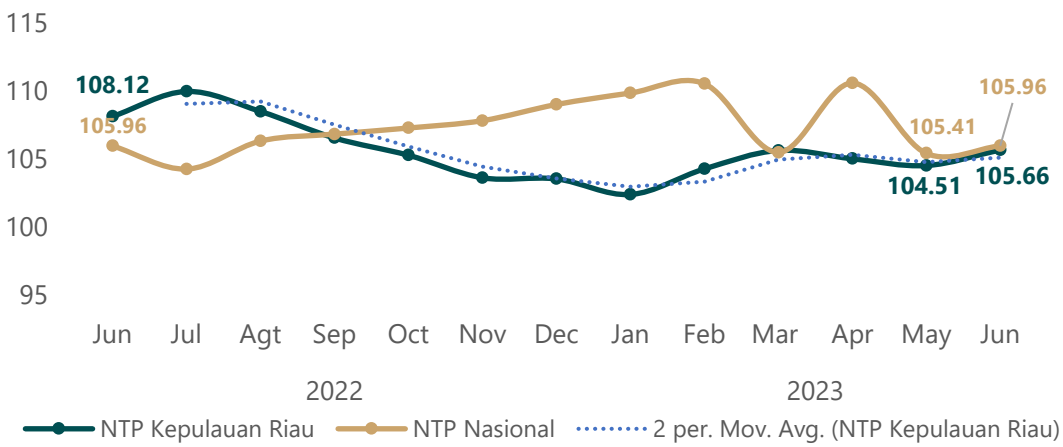

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

NTP Provinsi Kepri di bulan Juni 2023 adalah sebesar 105,66 dan menunjukkan tren yang meningkat di sepanjang tahun 2023. Nilai tersebut juga telah melebihi target NTP yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 99,91%. Namun demikian, bila dibandingkan dengan tahun 2022, NTP Provinsi Kepri s.d. bulan Juni 2023 cenderung mengalami penurunan sebesar 2,13% (*yoy*).

Dari lima subsektor yang tercatat, semua subsektor mengalami penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yaitu: Tanaman Pangan naik sebesar 0,30%; Hortikultura naik sebesar 1,97%; Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 2,23%; Peternakan naik sebesar 1,19%; dan Perikanan naik sebesar 0,56%. Kemudian, kondisi tersebut juga disebabkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang mengalami kenaikan di tahun 2023. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh biaya produksi dan penambahan barang modal yang turut naik sejalan dengan inflasi dari harga barang produksi.

Beberapa tantangan terkait pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kepri antara lain: (1) kurangnya dukungan infrastruktur kegiatan pertanian (irigasi, jalan usaha tani, bangunan pengolahan hasil pertanian); (2) belum optimalnya kapasitas petani dan pelaku perkebunan karena karakteristik geografis Provinsi Kepri yang dikelilingi oleh bakau dan tanah bauksit sehingga perlu SDM yang cakap dalam mengelola pertanian; (3) serta perlunya pengembangan penggunaan teknologi pertanian baik dalam pengolahan maupun keberlanjutan pemasaran. Selain itu, lahan pertanian yang tidak terlalu luas juga menjadi tantangan dalam mengembangkan sektor pertanian di Provinsi Kepri.

Pemerintah pusat turut mengupayakan perkembangan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan melalui beberapa program. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah merealisasikan belanja sebesar Rp17,81 miliar atau mencapai 34,34% dari total pagu Belanja. Belanja tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pertanian di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; (2) sarana pengembangan kawasan hortikultura; (3) penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian dan peternakan; (4)

peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat; (5) serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para petani untuk meningkatkan kualitas produksinya.

Dukungan pada sektor pertanian juga dilakukan oleh TPID Kepri. Pada tahun 2023, TPID Kepri telah membantu para petani melalui pemberian pupuk organic, pemberian bibit tanaman, dan penggunaan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi lokal.

1.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Provinsi Kepulauan Riau dengan panjang garis pantai 8.561,33 Km. Dengan Kondisi demikian, tentunya Provinsi Kepulauan Riau menyimpan Potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan posisi yang cukup kuat dalam membangkitkan kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan untuk kemajuan masyarakat Kepulauan Riau.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap dan budidaya yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghasilkan produksi perikanannya. NTN terdiri atas nilai tukar perikanan tangkap dan nilai tukar perikanan budidaya.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, NTN Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 110,64% dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTN Nasional yang berada pada angka 106,96%. Bila dilihat dari kurun waktu satu tahun terakhir, grafik NTN di Provinsi Kepri juga menunjukkan adanya peningkatan.

Grafik 1.23 - Perkembangan NTN Provinsi Kepri Tahun 2022-2023 (yoy)

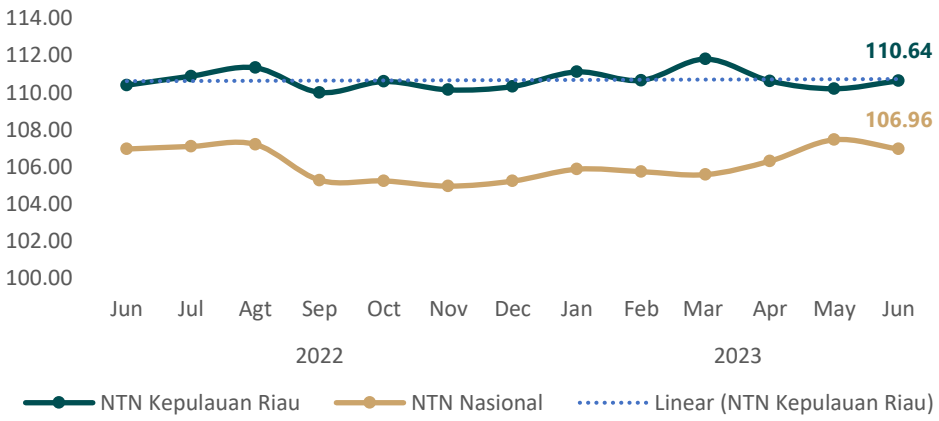

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Namun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah sasaran NTN pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepri yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 115,5. Maka dari itu pemerintah akan terus meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan.

Peningkatan NTN tersebut dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 0,56% lebih besar daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) sebesar 0,16%. Kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan secara garis besar didukung oleh naiknya harga komoditas tongkol (3,22%) untuk perikanan tangkap dan naiknya harga komoditas kepiting laut (5,41%) untuk perikanan budidaya.

Terdapat beberapa tantangan dalam mengembangan sektor perikanan di Provinsi Kepri, khususnya tantangan dari segi ekonomi dan industri. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) masih terdapat kasus *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* di pulau terluar Kepri seperti di Natuna dan berdampak pada hilangnya hasil laut Kepri yang seharusnya menjadi bagian nelayan lokal; (2) pencemaran laut oleh pembuangan limbah (minyak hitam) dari kapal internasional di perairan Selat Malaka; (3) lemahnya permodalan dalam menunjang usaha perikanan khususnya, bagi usaha kecil dan menengah; serta (4) teknologi pengolahan perikanan yang masih terbatas dan belum terstandar berstandar ekspor.

Maka dari itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengupayakan perkembangan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan melalui beberapa program. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, realisasi belanja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepri adalah sebesar Rp39,95 miliar atau mencapai 33,98% dari total pagu TA 2023. Belanja tersebut digunakan dalam upaya mendorong pengembangan sektor perikanan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; (2) operasi pengawasan sumber daya alam; (3) dukungan pembinaan UMKM; (4) fasilitasi dan pembinaan industri; (5) serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para nelayan untuk meningkatkan kualitas produksinya.

1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan atas capaian hasil pembangunan suatu wilayah/daerah dalam aspek pembangunan manusia. Tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, IPM juga memiliki esensi dasar sebagai indikator atas kebahagiaan manusia dalam aspek kehidupan.

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, IPM Provinsi Kepri meningkat secara perlahan sejalan dengan pencapaian ekonomi nasional dan daerah. Kenaikan IPM Kepri dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Angka dari IPM bukan hanya mengukur tingkat perekonomian manusia namun juga mengukur tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan juga kesempatan dalam mendapatkan pengetahuan, sehingga angka IPM itu mengandung 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pendidikan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*) diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) di wilayah yang bersangkutan. IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, IPM < 60 (rendah), 60 ≤ IPM < 70 (sedang), 70 ≤ IPM < 80 (tinggi), IPM ≥ 80 (sangat tinggi).

Grafik 1.24 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri dan Nasional (2017-2022)

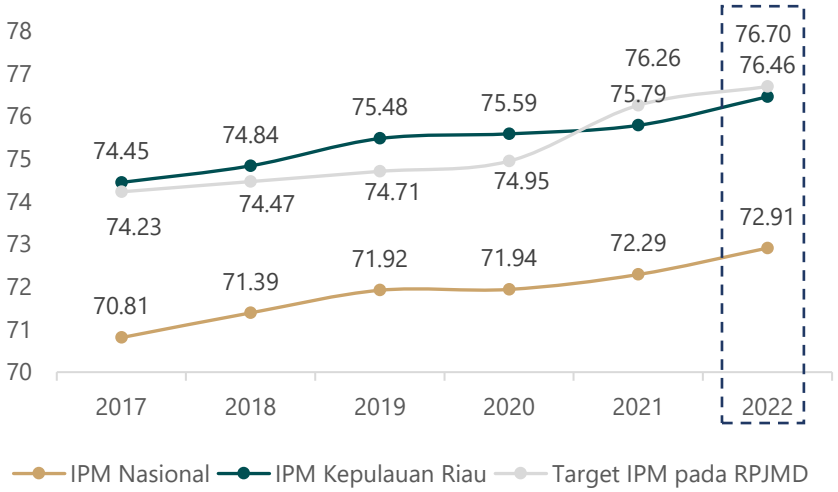

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Masih berdasar pada data dari tahun 2022, IPM Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,88% menjadi 76,46 dari tahun 2021 sebesar 75,79. IPM Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan peringkat ke 4 tertinggi tingkat nasional untuk tiga tahun berturut-turut, dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera. Namun demikian, IPM tersebut belum mencapai target IPM yang ditetapkan pada RPJMD.

IPM Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat empat di tingkat nasional. Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan IPM 81,65. IPM Kepri tertinggi di tingkat regional Sumatera. Dari regional Sumatera, setelah Kepri, Sumatera Barat merupakan berada di peringkat sembilan nasional dengan IPM 73.26. Provinsi Bangka Belitung yang mempunyai karakteristik demografi mirip dengan Provinsi Kepri berada pada peringkat 17 dengan nilai IPM sebesar 72,24.

Tabel 1.3 - Perkembangan IPM per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022

Wilayah	IPM Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Natuna	71,52	72,1	72,63	72,72	73,09	73,47
Lingga	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57
Kota Tanjung Pinang	78	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64
Kota Batam	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67
Kepulauan Anambas	67,06	67,53	68,48	68,8	69,23	69,61
Karimun	70,26	70,56	71,1	71,44	71,7	72,65
Bintan	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

IPM Provinsi Kepri masuk ke dalam IPM dengan capaian tinggi, namun apabila dilihat lebih rinci pada Kota/Kabupatennya, terjadi ketimpangan yang cukup lebar. Pada tahun 2022, capaian IPM Kota Batam sudah masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi yaitu 81,67, sedangkan IPM di Kabupaten Lingga baru mencapai kategori sedang dengan angka 66,57, selain itu Kepulauan

Anambas juga masih masuk ke dalam kategori sedang dengan capaian 69,61, masih cukup jauh dengan capaian Kota Tanjungpinang, yaitu 79,64.

Namun apabila dilihat lebih rinci lagi, di tahun 2022 Kabupaten Lingga Kembali mengalami pertumbuhan IPM kedua tinggi se-Kepri (setelah karimun), yaitu 1,12%, pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai 0,83% (juga tertinggi di tahun 2021). Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan sebesar 0,55%, namun lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu (0,63). Tantangan lainnya sehubungan dengan pemerataan angka IPM di Kepri adalah kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan rentang kendali jauh dan konektivitas antar pulau sangat terbatas.

Grafik 1.25 - Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepri Tahun 2020-2022

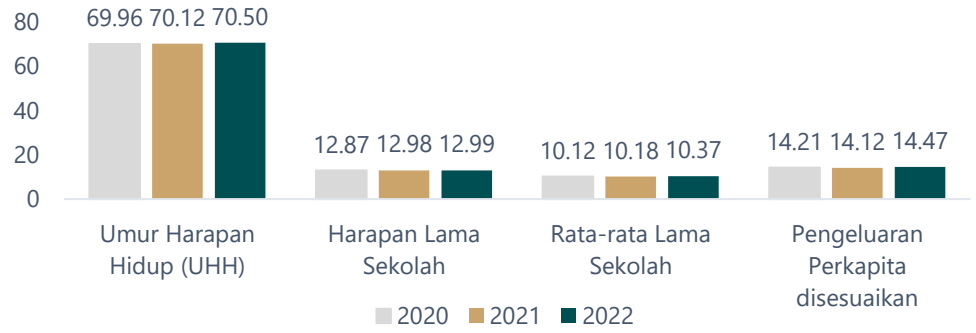

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Sehubungan dengan nilai indikator pembentuk IPM, dari tahun 2020 sampai dengan 2022, UHH penduduk Kepri terus meningkat, yang dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,54%, menjadi 70,50 dari sebelumnya 70,12. Peningkatan UHH dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 70,50 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat 0,08% menjadi 12,99 tahun dari yang sebelumnya 12,98 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 1,87% menjadi 10,37 tahun. Peningkatan HLS memberikan pengertian bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,99 tahun, dan untuk penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh Pendidikan selama 10,37 tahun. Peningkatan juga terjadi pada pengeluaran perkapita yang disesuaikan (2,46).

Dalam Upaya Mendorong Pemerataan IPM melalui peningkatan tiap indeks pembentuk IPM, melalui kebijakan fiskal sampai dengan Maret 2023, pemerintah telah menganggarkan, beberapa dukungan kepada beberapa Kabupaten di Kepri yang masih dikategorikan IPM sedang, yaitu di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Terdapat beberapa program prioritas di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang didanai oleh APBN dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (Prioritas Nasional). Pada tahun 2023, Program Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan.

Grafik 1.26 -Alokasi dan Realisasi Program Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing di Kabupaten Lingga dan Anambas Tahun 2023

Selain peran dari APBN, sampai dengan triwulan II tahun 2023, juga telah direalisasikan APBD pada Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat daerahnya khususnya pada Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pendidikan. Pada Kabupaten Lingga, telah direalisasikan belanja untuk Fungsi Kesehatan sebesar Rp42,62 miliar dan untuk Fungsi Pendidikan sebesar Rp82,65 miliar. Kemudian pada Kabupaten Kepulauan Anambas telah direalisasikan belanja untuk untuk Fungsi Kesehatan sebesar Rp46,25 miliar dan untuk Fungsi Pendidikan sebesar Rp71,78 miliar.

Dengan adanya belanja tersebut, realisasi anggaran untuk Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan di daerah tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan akhir dari ketersediaan anggaran yaitu melalui hasil nyata berupa perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan angka kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pada Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB II
ANALISIS FISKAL REGIONAL

Jembatan Barelang, Kota Batam
Sumber: Dinas Pariwisata Prov.Kepri

BAB II
ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1 Analisis Laporan Realisasi APBN

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam mengelola berbagai situasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan bernegara melalui tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. APBN menjalankan peran fungsi stabilisasi untuk mengatasi pandemi covid-19 yang dampaknya masih terdapat pada Semester I tahun 2023. Dalam rangka mengendalikan inflasi, melalui fungsi stabilisasi, APBN berperan sebagai shock absorber dengan melakukan demand management untuk menstabilkan harga.

Pada fungsi alokasi, APBN memiliki peran untuk membuat ekonomi makin efisien dan tidak distortif. Misalnya dengan menaikkan tarif cukai untuk membatasi peredaran minuman beralkohol dan rokok. Karena kedua produk tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bila terlalu banyak beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Disisi lain, APBN juga memberikan subsidi bagi masyarakat, misalnya subsidi BBM.

Dalam menjalankan fungsi APBN ketiga, yaitu fungsi distribusi, APBN berperan sebagai alat untuk pemerataan keadilan. Misalnya dengan dana alokasi umum dan alokasi khusus, program penanggulangan kemiskinan, stunting, daerah tertinggal dll.

Fungsi-fungsi tersebut juga terdapat pada APBN di Provinsi Kepulauan Riau. APBN disusun dan direalisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat Kepri yang sejahtera melalui peningkatan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Belanja pada APBN diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pendapatan dan Hibah ditargetkan sebesar Rp11.474 miliar dengan belanja sebesar Rp17.493 miliar. Tingginya belanja dibandingkan pendapatan mengakibatkan APBN lingkup Prov. Kepri menjadi defisit sebesar Rp6.018 miliar. Kebijakan defisit anggaran ini masih sama dengan kebijakan tahun 2022. Kebijakan defisit anggaran ditempuh pemerintah agar perekonomian tetap tumbuh. Pemerintah mempertahankan nominal Belanja Negara yang diharapkan akan memberikan dampak stimulus bagi perekonomian Prov. Kepri diberbagai sektor.

Target Pendapatan dan Hibah sebesar Rp11.474 lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp12.041 miliar. Namun demikian, target Pendapatan dan Hibah tersebut lebih tinggi atau naik sebesar 62,11% dari target awal tahun 2022, yaitu sebesar Rp7.127 miliar. Target tahun 2022 direvisi melalui APBN-Perubahan karena realisasi penerimaan dapat mencapai 77,55% pada semester I 2023. Tingginya realisasi penerimaan karena terdapat kebijakan Pengungkapan Pajak Sukarela yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.

Tabel 2.1– Perkembangan I-Account APBN di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023 (Miliar Rupiah)

URAIAN	Triwulan II TA 2022			Triwulan II TA 2023			Growth
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
A. Pendapatan dan Hibah	**12,041.48**	**6,252.51**	**51.92%**	**11,474.34**	**5,858.59**	**51.06%**	**-6.30%**
I. Penerimaan Dalam Negeri	**12,041.48**	**6,252.51**	51.92%	**11,474.34**	**5,859.59**	51.06%	-6.30%
1. Penerimaan Perpajakan	**9,876.46**	**5,527.22**	55.96%	**9,209.34**	**4,932.79**	53.56%	-10.75%
a. Pajak Dalam Negeri	**8,463.93**	**8,148.26**	96.27%	**8,528.78**	**4,392.29**	51.50%	-46.10%
b. Pajak Perdagangan Internasional	**1,412.54**	**797.04**	56.43%	**680.55**	**540.49**	79.42%	-32.19%
2. PNBP	**2,165.01**	**725.29**	33.50%	**2,265**	**925.79**	40.87%	27.64%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	**0.00**	**0.00**	-	**0**	**0.00**	-	-
b. PNBP Lainnya	**466.70**	**326.62**	69.98%	**418.73**	**403.50**	96.36%	23.54%
c. Pendapatan Badan Layanan Umum	**1,698.32**	**398.56**	-	**1,846.26**	**522.28**	-	31.05%
B. Belanja Negara	**15,709.76**	**5,708.73**	**36.34%**	**17,493.16**	**6,546.83**	**37.43%**	**14.68%**
1. Belanja Pemerintah Pusat	**7,246.41**	**2,200.65**	30.37%	**9,533.50**	**2,956.09**	31.01%	34.33%
1. Belanja Pegawai	**1,878.59**	**870.79**	46.35%	**2,096.89**	**1,064.89**	50.78%	22.29%
2. Belanja Barang	**3,353.34**	**1,012.19**	30.18%	**4,479.06**	**1,330.51**	29.71%	31.45%
3. Belanja Modal	**1,763.28**	**262.65**	14.90%	**2,706.51**	**505.63**	18.68%	92.51%
7. Bantuan Sosial	**2.55**	**1.01**	39.70%	**4.59**	**1.51**	32.91%	0.00%
8. Belanja Lainnya	**248.64**	**54.00**	21.72%	**246**	**53.54**	21.73%	0.00%
2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	**8,463.35**	**3,508.08**	41.45%	**7,959.66**	**3,590.73**	45.11%	2.36%
A. Transfer ke Daerah	**8,254.20**	**3,388.47**	41.45%	**7,736.07**	**3,450.91**	45.11%	2.36%
- Dana Bagi Hasil	**2,101.52**	**390.11**	18.56%	**1,232.19**	**497.54**	40.38%	27.54%
- Dana Alokasi Umum	**4,280.64**	**2,287.01**	53.43%	**4,474.84**	**2,241.57**	50.09%	-1.99%
- Dana Insentif Daerah	**157.36**	**48.05**	30.54%	**63.12**	**31.56**	50.00%	-34.31%
- DAK Fisik	**592.32**	**87.39**	14.75%	**805.93**	**110.67**	13.73%	26.64%
- DAK Non Fisik	**1,122.36**	**575.91**	51.31%	**1,159.96**	**569.55**	49.10%	-1.10%
B. Dana Desa	**209.14**	**119.61**	57.19%	**217.79**	**139.82**	64.20%	16.90%
C. Transfer Hibah	**0.00**	**0.00**	0.00%	**5.79**	**0**	0.00%	-
C. Keseimbangan Primer	**0.00**	**0.00**		**0**	**0**		
D. Surplus/Defisit Anggaran	**-3,668.28**	**543.78**	**-14.82%**	**-6,018.82**	**-688.23**	**11.43%**	**-226.57%**

Sumber: OM-SPAN, Simtrada, dan KK LRA LKPDK Provinsi Kepri (data diolah)

Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pagu Belanja Negara meningkat 10% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan pagu tersebut karena pagu Belanja Pemerintah Pusat meningkat 34,33% sedangkan pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun sebesar 6,33%. Peningkatan Belanja Negara karena terdapat peningkatan pada Belanja Modal (34,85%) dan Bantuan Sosial (32,91%). Peningkatan Belanja Modal menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus membangun sesuai kebutuhan masyarakat. Belanja modal tersebut ditujukan untuk pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kepulauan Riau. Pada akhir Mei 2023, terdapat 8 (delapan) proyek berstatus PSN. Empat proyek telah selesai dilaksanakan dan empat proyek masih dalam status on progress sampai dengan tahun 2023 ini. Proyek yang sudah selesai yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, KEK Nongsa, KEK Batam *Aero Technic*, dan Bendungan Sei Gong. Sedangkan proyek yang masih on progres yaitu Kawasan Industri Pulau Ladi, Kawasan Industri Tanjung Sauh, PLTS skala besar, dan Jalan Tol Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim (25 km). Peningkatan Belanja Bantuan Sosial juga menunjukkan bahwa pemerintah tetap hadir bagi masyarakat yang kurang

mampu. Belanja Bantuan Sosial merupakan bentuk pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan program Bantuan langsung tunai, PKH, dll.

2.1.1 Pendapatan Negara

Grafik 2.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tw II- 2023 (Miliar Rupiah)

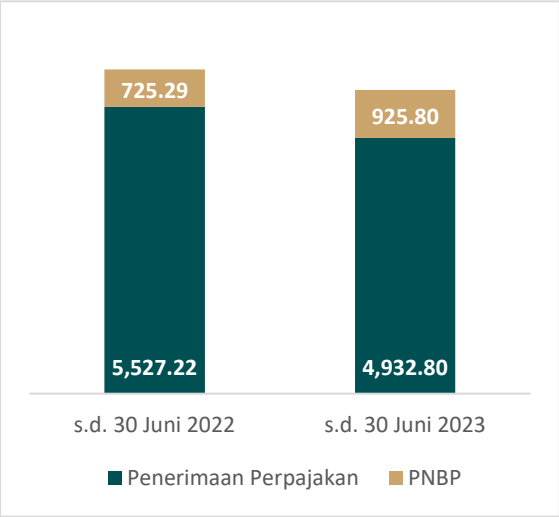

Sumber: OM-SPAN 2023 (data diolah)

Realisasi Pendapatan pada Semester I tahun 2023 sebesar Rp5.858 miliar atau 51,06% dari target tahun 2023. Pendapatan tersebut hanya bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri pada Semester I 2023, secara nominal mengalami pertumbuhan minus sebesar -6,30% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 (realisasi sebesar Rp6.252 miliar). Pertumbuhan minus juga terjadi jika membandingkan persentase realisasi (persentase realisasi tahun 2022 sebesar 51,92%), padahal target tahun 2023 (Rp11.474 miliar) lebih rendah dibandingkan target tahun 2022 (Rp12.041 miliar).

Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Perpajakan memberikan kontribusi paling dominan yaitu sebesar 84,20% (Rp4.933 miliar) dibandingkan PNBP yang memberikan kontribusi sebesar 15,80% (Rp925 miliar).

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan dapat direalisasikan sebesar Rp4.392 miliar atau sebesar 53,56% dari target tahunan. Secara parsial tahunan, realisasi ini sudah sesuai dengan *track* dengan capaian lebih dari 50% pada pertengahan periode tahunan. Namun, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 (Rp4.730 miliar), capaian tersebut lebih rendah -7,14%.

Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi terbesar yaitu 89,04% (Rp4.392 miliar) sedangkan Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi sebesar 10,96% (Rp540 miliar)

Grafik 2.2 - Porsi Realisasi Pendapatan Negara Tw II- 2023

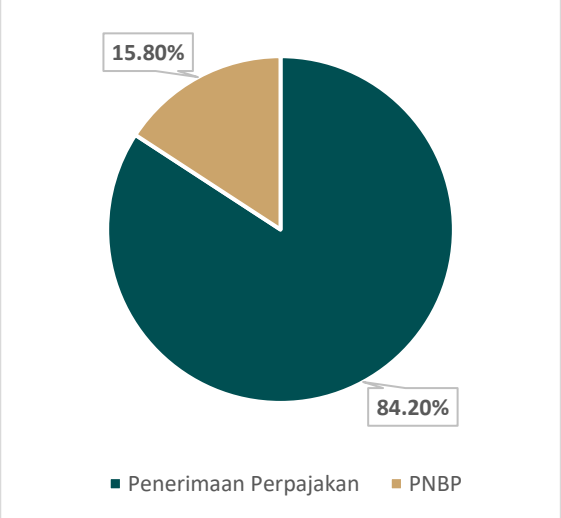

Sumber: OM-SPAN 2023 (data diolah)

Penerimaan Pajak Dalam Negeri terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Lainnya, dan Cukai. Realisasi PPh sebesar Rp3.977 miliar merupakan pos yang memberikan kontribusi paling dominan pada Penerimaan

Pajak Dalam Negeri, yaitu dengan kontribusi sebesar 90,6%. Kemudian diikuti oleh PPN (8,2%), PBB (0,1%), Pajak Lainnya (1%), dan Cukai (0,2%).

Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea masuk dapat direalisasikan sebesar Rp447 miliar (91,88%), sedangkan Bea Keluar dapat direalisasikan sebesar Rp92,76 miliar (48,00%).

Analisis *Growth* Penerimaan Perpajakan

Ditinjau dari sisi pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun 2022, Pajak Lainnya menjadi pos dengan pertumbuhan tertinggi (141,67%), kemudian diikuti oleh PBB (130,75%), Cukai (96,65%), PPN (17,93%). PPh bahkan mengalami pertumbuhan minus sebesar (-9,64%). Namun demikian, capaian PPh pada periode semester I tahun 2023 dinilai baik karena pertumbuhan negatif kurang dari 10% dibandingkan capaian semester I tahun 2022. Selain faktor kenaikan harga komoditas, kebijakan Pengakuan Pajak Sukarela (PPS) berhasil meningkatkan Penerimaan Perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan di periode semester I tahun 2022 hingga mencapai tingkat pertumbuhan 77,10% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPh ini cukup menggembirakan karena pada prinsipnya Program Pengungkapan Sukarela merupakan kebijakan Tahun 2022 untuk periode 1 Januari sd 30 Juni 2022, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan sebesar Rp450 M di tahun lalu.

Realisasi PBB sebesar Rp2.977 miliar meningkat tinggi sebesar 130,75% dibanding periode semester I tahun 2022 sebesar Rp1.290 miliar. Hal ini disebabkan oleh terdapat penerimaan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp2.519 miliar, sedangkan pada periode semester I tahun 2022 pendapatan PBB tersebut hanya sebesar Rp534 juta. Pajak lainnya yang paling meningkat adalah Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai yaitu sebesar Rp36,69 miliar. Pendapatan Cukai sebesar Rp9,36 miliar meningkat sebesar 96,65% dibandingkan semester I tahun 2022 sebesar RP4,76 miliar. Mayoritas Pendapatan Cukai dari cukai hasil tembakau/rokok. Oleh karena itu kenaikan tarif cukai rokok menjadi salah satu faktor peningkatan pendapatan Cukai. Selain itu, permintaan rokok dari luar negeri semakin menurun. Pabrik rokok yang membuat produk untuk diekspor, khususnya ke Singapura, beralih untuk membuat produk rokok yang dijual lokal.

Pendapatan bea masuk tumbuh 5,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan Bea Keluar terkontraksi sebesar 75,20%. Penurunan Bea Keluar dikarenakan penurunan jumlah kuantitas dan nilai harga pasar global komoditas utama ekspor Kepri, yaitu CPO.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP dapat direalisasikan sebesar Rp925 miliar atau 40,87% dari target. Capaian ini tumbuh sebesar 27,64% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022 (Rp725 miliar). PNBP terdiri dari Pendapatan BLU dan PNBP Lainnya. Realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp403 miliar atau 96,36% dari target sedangkan realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp522 miliar atau sebesar 28,29% dari target. Pendapatan BLU masih jauh dari target Pendapatan. Namun demikian, secara real, penerimaan BLU sebesar Rp. BLU masih menemui kesulitan dalam pencatatan penerimaan

melalui pengesahan SP3B. Hal ini disebabkan masih belum dapat mengimplementasikan aplikasi SAKTi secara optimal, sehingga penerimaan BLU belum dapat dicatat melalui mekanisme SP3B.

Analisis *Growth* Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kedua PNBP, baik Pendapatan BLU dan PNBP mencatatkan realisasi yang menggembirakan karena mencatatkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. PNBP Lainnya hampir mencapai realisasi 100% dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 23,54% dan Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan sebesar 31,05%. Pertumbuhan pendapatan BLU ditopang oleh munculnya dua BLU baru di lingkup Provinsi Kepri pada tahun 2023. BLU baru tersebut yaitu BLU RS Bhayangkara Batam dan BLU RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang. Dari sisi PNBP lainnya, pendapatan Paspor, Visa, dan pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali (*re-entry permit*) mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga 318%. Hal ini menunjukkan tingginya lalu lintas wisatawan asing berkunjung ke Indonesia maupun wisatawan Indonesia berkunjung ke luar negeri.

Kontribusi Pendapatan dari Sektor Usaha/Penerimaan Sektoral

Realisasi Penerimaan Pajak berdasarkan sepuluh sektor penerimaan terbesar sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 2.3 – Penerimaan per Sektor Triwulan II Tahun 2023

Sumber: OM-SPAN 2023 (data diolah)

Industri Pengolahan menjadi sektor paling dominan penyumbang penerimaan perpajakan, yaitu kontribusi penerimaan sebesar Rp136,28 miliar dengan proporsi 48.23%. Namun demikian, sektor ini hanya tumbuh sebesar 6.83%. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor Kegiatan Jasa Lainnya yaitu sebesar 93,49%, dengan kontribusi hanya sebesar 3.93% terhadap penerimaan pajak. Sektor dengan kontraksi paling tinggi adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, yaitu sebesar 17,06%. Namun demikian, sektor ini tetap memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar setelah sektor Industri Pengolahan.

Analisis *Tax Ratio*

Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. *Tax Ratio* menunjukkan jumlah pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB). Semakin tinggi *Tax Ratio,* menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan pajak dari pendapatan PDRB.

Tax ratio pada Semester I Tahun 2023 sebesar 2,71%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2022 sebesar 3,73%. Hal tersebut disebabkan oleh

pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak pada semester I tahun 2023 sebesar Rp4.933 miliar, mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,75% dibandingkan dengan semester I tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 terdapat program pengungkapan sukarela yang merupakan kebijakan pada Semester I tahun 2022. Pada semester I tahun 2023 terdapat realisasi PDRB sebesar Rp161.824 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 5,04%. Adapun perbandingan *Tax Ratio* Prov. Kepri, Prov. Babel, dan Nasional sebagaimana pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 – Perbandingan Tax Ratio Kepulauan Riau dengan Bangka Belitung dan Nasional

Provinsi	s.d TW II 2021	s.d TW II 2022	s.d TW II 2023
Nasional	8.35%	10.98%	10.74%
Kepulauan Riau	2.65%	3.73%	2.71%
Bangka Belitung	2.35%	3.93%	2.89%

Sumber: DJP dan BPS 2023 (data diolah)

Provinsi Bangka Belitung (Prov. Babel) mempunyai karakteristik geografis yang serupa dengan Provinsi Kepulauan Riau. Jika dibanding dengan Prov. Babel, *Tax Ratio* Prov. Kepri masih berada dibawah. Begitupun jika dibandingkan dengan *Tax Ratio* nasional yang telah berada pada tingkat 10,4%.

Grafik 2.4 – Perbandingan Tax Ratio Kepulauan Riau dengan Bangka Belitung dan Nasional

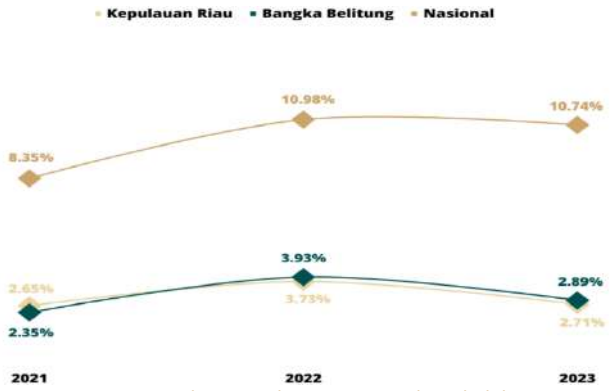

Sumber: DJP dan BPS 2023 (data diolah)

Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian kemandirian kepada pemerintah daerah, berupa wewenang mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri. Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara mandiri yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah. Peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi syarat utama untuk mendukung otonomi tersebut. Oleh karena itu diberikan perluasan desentralisasi fiskal untuk memperkuat kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun kewenangan dan perluasan desentralisasi fiskal telah diberikan kepada pemerintah daerah, mayoritas pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri

belum sepenuhnya tercapai. Tak terkecuali pada Provinsi Kepulauan Riau, mayoritas belanja negara masih dibiayai oleh pendapatan transfer pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan membandingkan antara PAD dan Pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain, seperti transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman (IKF I = PAD/Total Pendapatan) sebagaimana telah dituangkan dalam Analisis Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Kepri pada Laporan GFS Provinsi Kepri Semester I Tahun 2023. Selain itu, terdapat cara lain untuk menghitung kemandirian daerah yaitu dengan memperhitungkan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (IKF II = PAD+DBH/Total Pendapatan). Kemudian, tingkat kemandirian tersebut digolongkan dalam beberapa klaster sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3 – Klaster Tingkat Kemandirian Fiskal

IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat Mandiri
0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
0,00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri

Sumber: GFS Provinsi Kepri Semester I Tahun 2023 (data diolah)

Berikut tingkat kemandirian daerah tiap Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kedua indeks tersebut:

a. Indeks Kemandirian Fiskal I

Grafik 2.5 – Indeks Kemandirian Fiskal I

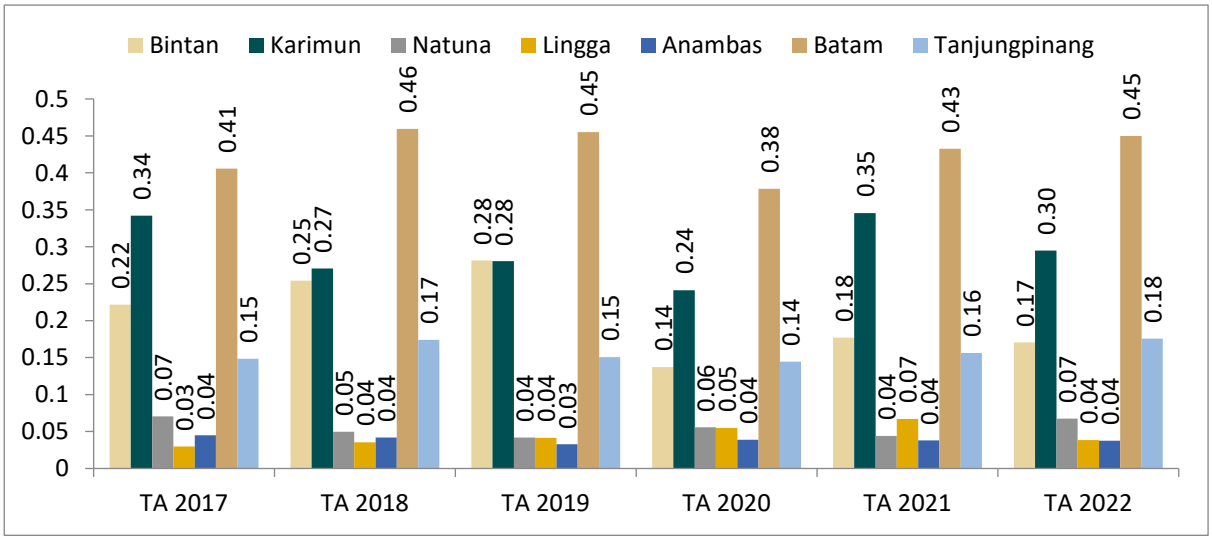

Sumber: GFS Provinsi Kepri Semester I Tahun 2023 (data diolah)

Indeks Kemandirian Fiskal I (IKF I) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD dengan Total Pendapatan. Hasil perhitungan IKF I dari tahun 2017 s.d 2022 menunjukkan bahwa Mayoritas Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Kepulauan Riau masih berada pada klaster "Belum Mandiri". Kota Batam dan Kabupaten Karimun berada pada klaster "Menuju Kemandirian". Walaupun Kabupaten Karimun berada pada klaster "Belum Mandiri" pada tahun 2020 karena IKF I sebesar 0,24. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna,

dan Kabupaten Bintan masih berada pada klaster "Belum Mandiri". Kabupaten Bintan sempat masuk kategori "Menuju Kemandirian" pada tahun 2019, namun tingkat IKF I turun drastis pada

Grafik 2.6 – Rasio Kemandirian Fiskal Daerah I

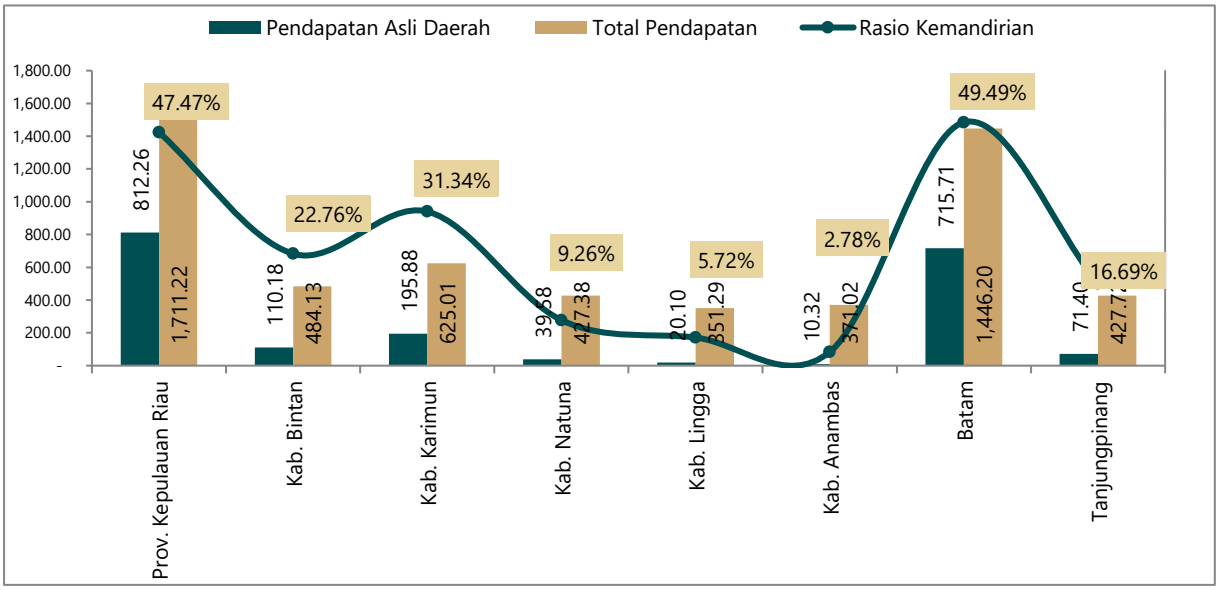

tahun 2020 hingga 2022.

Pada periode Semester I tahun 2023, IKF I Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 47,47% atau pada klasifikasi "Menuju Kemandirian". Secara parsial, Kota Batam dan Kabupaten Karimun masih berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian". Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Anambas berada pada klasifikasi "Belum Mandiri". Dapat disimpulkan bahwa mayoritas kabupaten/kota (lima dari tujuh) pada Semester I tahun 2023 berada pada klasifikasi "Belum Mandiri".

Sumber: GFS Provinsi Kepri Semester I Tahun 2023 (data diolah)

b. Indeks Kemandirian Fiskal II

Indeks Kemandirian Fiskal II (IKF II) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD ditambah Dana Bagi Hasil dengan Total Pendapatan.

Grafik 2.7 – Indeks Kemandirian Fiskal II

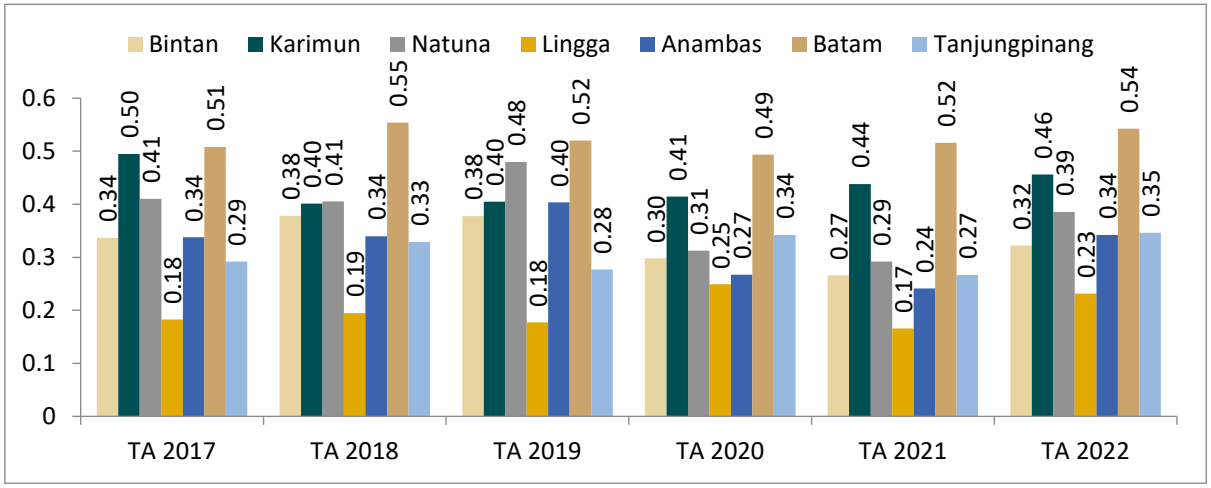

Sumber: GFS Provinsi Kepri Semester I Tahun 2023 (data diolah)

Hasil perhitungan IKF II dari tahun 2017 s.d 2022 menunjukkan bahwa Kota Batam berada pada klaster "Mandiri". Lima Kabupaten/Kota lainnya berada pada klaster menuju "Kemandirian", yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, sedangkan Kabupaten Lingga masih berada pada klaster "Belum Mandiri".
Pada periode Semester I tahun 2023, IKF II Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 57,25% atau pada klasifikasi "Mandiri". Secara parsial terdapat empat Kota/Kabupaten yang masuk klaster "Mandiri" yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan. Tiga Kota/Kabupaten lainnya masih berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian" yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Lingga. Dari hasil IKF II periode Semester I Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kabupaten/kota (empat dari tujuh) berada pada klasifikasi "Mandiri".

Grafik 2.8 – Rasio Kemandirian Fiskal Daerah II

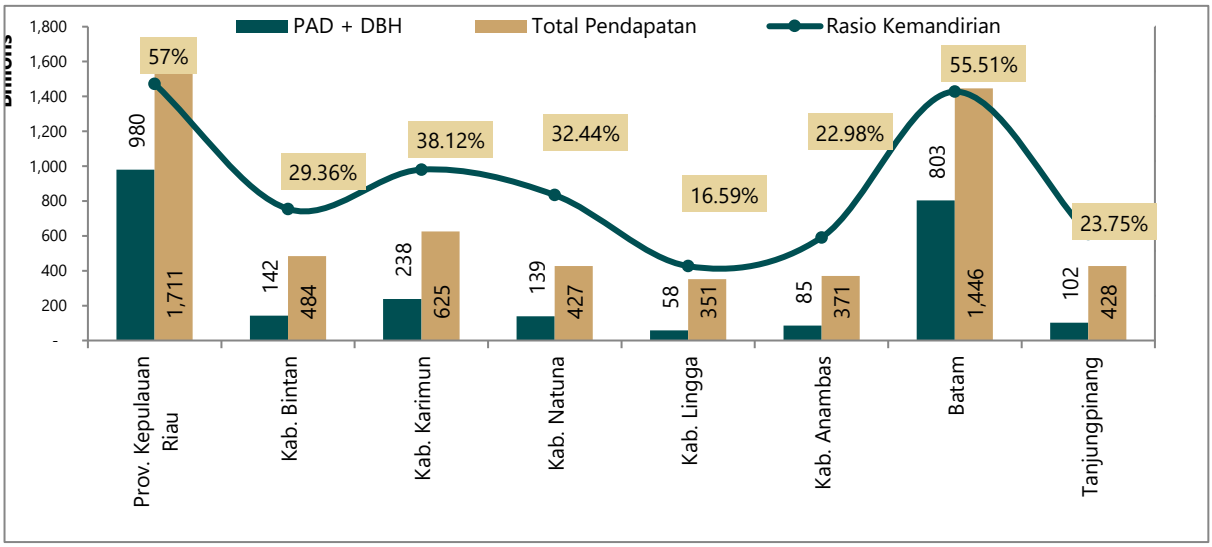

Sumber: GFS Provinsi Kepri Semester I Tahun 2023 (data diolah)

Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

1. zPenurunan Harga CPO di pasar global menurunkan penerimaan Bea Keluar. Pemerintah perlu mendorong komoditas lain yang dapat meningkatkan ekspor yang akhirnya meningkatkan bea keluar. Misalnya dengan terus mendukung dan memfasilitasi agar pengusaha ayam yang melakukan ekspor perdana di Bulan Mei 2023 dapat melakukan ekspor secara rutin bulanan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan potensi komoditas ekspor lainnya, seperti hasil budidaya perikanan (ikan bawal bintang) karena karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan.
2. Terdapat dua BLU baru di Provinsi Kepulauan Riau. Kanwil DJPb sebagai Pembina BLU di daerah agar dapat segera melakukan pembinaan untuk melakukan percepatan peningkatan penerimaan BLU dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLU.

2.1.2 Belanja Negara

Grafik 2.9 – Perkembangan Realisasi Belanja Negara Tw II- 2023 (Miliar Rupiah)

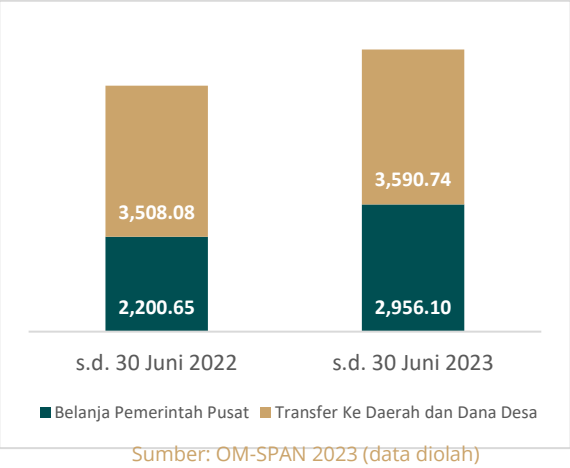

Sumber: OM-SPAN 2023 (data diolah)

Belanja Negara dapat direalisasikan sebesar Rp6.546 miliar atau 37,43% dari pagu. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat memberikan kontribusi sebesar 45,15% dari total Belanja Negara sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) memberikan kontribusi sebesar 54,85%. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.956 miliar atau sebesar 31,01% dari pagu, Belanja Pusat terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bantuan Sosial, dan Belanja Lainnya dengan realisasi masing-masing sebesar 50,78%, 29,71%, 18,68%, 32,91%, dan 21,73%.

Pagu TKD tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022, hal ini disebabkan oleh penurunan pagu DBH sebesar Rp869 miliar. Namun dari sisi penyerapan, pada semester I tahun 2023 TKD telah terserap sebesar Rp3.591 miliar (45,11%), lebih baik dibandingkan dengan semester I tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 2,36%.

Analisis Growth

Grafik 2.10 Porsi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tw II- 2023

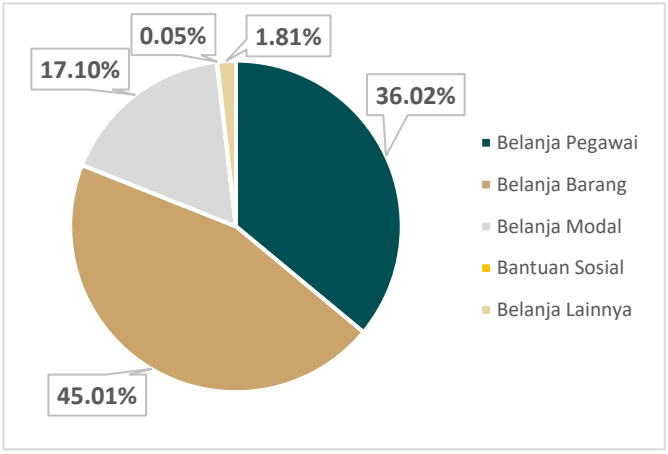

Sumber: OM-SPAN 2023 (data diolah)

Realisasi Belanja Negara tumbuh sebesar 14,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tumbuh 34,33% sedangkan realisasi TKD tumbuh 2,36% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Seluruh pos BPP tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun 2022, kecuali untuk Belanja Lainnya yang tumbuh minus -0,85%. Pertumbuhan positif realisasi BPP, walaupun pagu belanja naik, menunjukkan bahwa terdapat perbaikan disisi penyerapan belanja. Kanwil DJPb melakukan berbagai upaya yang terbukti efektif dalam melakukan percepatan penyerapan belanja, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan monitoring progres penyerapan anggaran belanja penting & prioritas pada 12 K/L dengan alokasi pagu anggaran terbesar di wilayah Provinsi Kepri melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II TA 2023.

2. Menyelenggarakan kegiatan *one on one meeting* dengan KPA satker beralokasi anggaran besar dalam rangka meningkatkan *engagement* & mendiskusikan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.
3. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran TA 2023 pada tanggal 15 Juni 2023 dengan sasaran kegiatan yaitu: satker mitra kerja berkinerja pelaksanaan anggaran TA 2023 rendah.
4. Menyampaikan langkah-langkah optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran triwulan III s.d. IV TA 2023 kepada satker mitra kerja dengan kinerja rendah melalui Surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri Nomor S-895/WPB.05/2023 tanggal 20 Juli 2023.

Dari sisi TKD, Dana Insentif Daerah (DID) tumbuh negatif sebesar -34,31%. Hal ini dikarenakan pagu anggaran DID tahun 2023 turun sebanyak 59,88% dibandingkan tahun 2022. Kinerja realisasi DID tahun 2023 telah baik, yaitu mencapai 50%, atau sebesar Rp31,56 miliar. Pada tahun 2022, persentase realisasi DID lebih rendah, yaitu 30,54% atau sebesar Rp48,05 miliar.

Pertumbuhan positif realisasi TKDD menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat dengan segera memenuhi persyaratan administrasi hingga merealisasikan belanja TKDD lebih tinggi, khususnya untuk DAU, DID, DAK Fisik dan DAK non Fisik.

Lebih rinci lagi pada TKD yang berupa Dana Perimbangan, realisasi Dana Transfer tumbuh sebesar 1,67% dan Dana Transfer Khusus tumbuh sebesar 2,55%. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu sebesar 27,54%. Realisasi DBH pada periode semester I tahun 2023 sebesar Rp497 miliar, sedangkan pada periode semester I tahun 2022 sebesar Rp390 miliar.

Belanja Berdasarkan Fungsi

Tabel 2.4 – Realisasi Belanja berdasarkan Fungsi Tw II- 2023

Fungsi	Pagu (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	%
Ekonomi	4.090,97	967,1	23,64%
Pertahanan	1.508,43	580,28	38,47%
Ketertiban dan Keamanan	1.298,14	601,51	46,34%
Pendidikan	617,66	202,78	32,83%
Pelayanan Umum	616,29	284,16	46,11%
Perumahan dan Fasilitas Umum	261,49	105,58	40,38%
Kesehatan	232,85	75,49	32,42%
Lingkungan Hidup	98,55	39,55	40,13%
Agama	90,39	45,6	50,45%
Pariwisata dan Budaya	1,09	0,49	44,72%

Sumber: OM-SPAN 2023 (data diolah)

Ditinjau dari fungsi pemerintahan, tiga fungsi dengan Belanja Negara tertinggi terdapat pada fungsi Ekonomi, Pertahanan, dan Ketertiban dan Keamanan. Fungsi Ekonomi sebagai fungsi tertinggi dengan pagu sebesar Rp4.090 miliar yang dapat direalisasikan sebesar Rp967 miliar atau 23,64%. Fungsi Ekonomi sekaligus menjadi fungsi dengan nominal realisasi tertinggi. Jika ditinjau dari besarnya persentase realisasi dari pagu, fungsi Agama dapat merealisasikan pagu sebesar 50,45% atau sebesar Rp45 miliar dari pagu sebesar Rp90 miliar. Adapun rincian pagu dan realisasi masing-masing fungsi sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4 berikut.

Belanja Berdasarkan Kementerian/Lembaga

Terdapat 10 (sepuluh) satker dengan pagu belanja besar yang mencapai 81,65% total pagu seluruh 326 satuan kerja lingkup Kanwil Provinsi Kepulauan Riau. Pada periode Semester I tahun 2023, realisasi 10 (sepuluh) satker tersebut mencapai 83,55% dari total realisasi belanja. Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam) dengan pagu sebesar Rp2.627 miliar dan realisasi sebesar Rp519,97 miliar (19,79%). Dari sepuluh K/L besar tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi K/L dengan persentase realisasi terbesar, yaitu 49,78% atau sebesar

Rp388 miliar. Adapun rincian belanja sepuluh K/L terbesar sebagaimana pada tabel 2.5 dan tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.5 Realisasi Belanja berdasarkan Kementerian Lembaga Tw II- 2023

No.	Kementerian/Lembaga	Pagu (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	% Real
1	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	2.627,45	519,97	19,79%
2	Kementerian Pertahanan	1.508,43	580,28	38,47%
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	980,65	254,23	25,93%
4	Kepolisian Republik Indonesia	781,03	388,82	49,78%
5	Kementerian Perhubungan	472,62	197,71	41,83%
6	Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi	368,22	100,69	27,35%
7	Kementerian Agama	309,68	142,76	46,10%
8	Kementerian Keuangan	292,49	113,12	38,67%
9	Kementerian Hukum dan HAM RI	249,14	114,85	46,10%
10	Kementerian Kesehatan	194,15	57,44	29,59%
Jumlah		7.783,87	2.469,86	31,73%
Pagu Belanja dan Realisasi Seluruh Satker Lingkup Kanwil DJPb Kepri		9.533,51	2.956,1	31,01%

Sumber : OM-SPAN (diolah), 2023

Tabel 2.6 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh Satker dan 10 K/L Terbesar

	Seluruh Satker (Rp miliar)	10 K/L Terbesar (Rp miliar)	% Real
Perbandingan Total Pagu	9.533,51	7.783,87	81,65%
Perbandingan Total Realisasi	2.956,1	2.469,86	83,55%

Sumber : OM-SPAN (diolah), 2023

Capaian Output Sektoral dan/atau Program Strategis Pemerintah

Sampai dengan semester I tahun 2023, total realisasi anggaran belanja Prioritas Nasional di Provinsi Kepulauan Riau adalah Rp667,45 miliar dari total pagu Rp2.535,75 miliar (26,32%) dengan realisasi capaian output sebesar 50,56%. Berikut kami sajikan data realisasi belanja Prioritas Nasional (PN).

Tabel 2.7 – Realisasi PN di Provinsi Kepulauan Riau s.d. Juni 2023

No	Prioritas Nasional	Kinerja Anggaran			Capaian Output		
		Pagu (Rp miliar)	Realisasi (Rp miliar)	%	Volume	Real. Fisik	%
1	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	140,66	38,13	27,11%	825.805	328.758,46	39,81%
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	815,00	187,63	23,02%	82.577	14.961,55	18,12%
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	306,26	66,66	21,76%	131.383	54.137,02	41,21%
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	34,63	15,16	43,76%	9.171	3.540,03	38,60%
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	761,80	194,10	25,48%	10.331	1.937,5	18,75%
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	15,56	5,12	32,89%	1.050.816	663.492	63,14%
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	461,83	160,67	34,79%	9.188	4.661,01	50,73%
Total		**2.535,75**	**667,45**	**26,32%**	**2.119.271**	**1.071.487,57**	**50,56%**

Sumber : Mebe (diolah), 2023

Grafik 2.11 – Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Output Belanja PN di Provinsi Kepulauan Riau s.d. Juni 2023 (miliar)

- *Persentase realisasi anggaran tertinggi berada di PN 4 yaitu 43,76%.*
- *Persentase realisasi capaian output tertinggi ada di PN 6 yaitu 63,14%.*
- *Kesenjangan realisasi terbesar ada pada PN 6 sebesar 30,24%*
- *Kesenjangan realisasi terkecil ada pada PN 2*

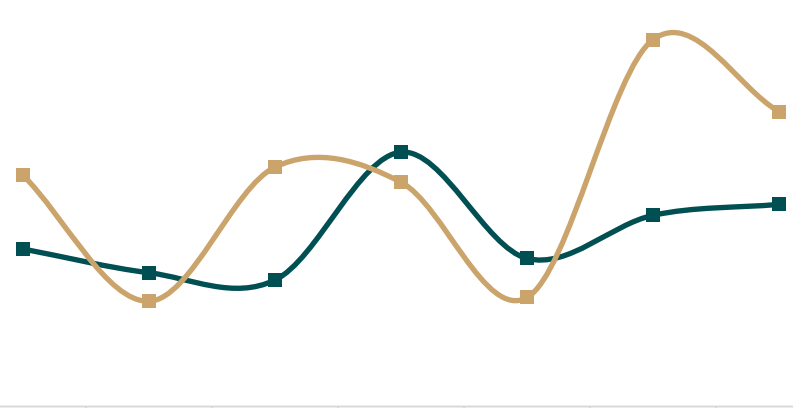

	PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5	PN 6	PN 7
Real. Angg.	27.11%	23.02%	21.77%	43.78%	25.48%	32.90%	34.79%
Real. Cap. Outp.	39.81%	18.12%	41.21%	38.60%	18.75%	63.14%	50.73%

Sumber : Mebe (diolah), 2023

PN 1 - Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Pada PN 1 tercapai realisasi anggaran sebesar 27,11% dan capaian output sebesar 39,81%. Capaian output didominasi oleh pengadaan Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat 40,03% dan Pelayanan penempatan PMI non pemerintah 300%. Di samping itu terdapat pula kegiatan Sertifikasi Karantina Pertanian 102,11% meskipun realisasi anggaran masih 34,57%.

PN 2 - Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pada PN 2 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 23,02% dengan capaian output telah terealisasi sebesar 18,12%. Capaian output ini didominasi oleh pengadaan PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 sebesar 34,93%, PBT Peningkatan Kualitas Menuju Kota Lengkap Luar Jawa 35,93%. Realisasi dari sisi anggaran maupun capaian output yang masih rendah disebabkan oleh pertanggungjawaban realisasi anggaran masih dipersiapkan meskipun kegiatan telah dilaksanakan, kegiatan sedang dilaksanakan dan akan mencapai 100% di bulan Desember, serta adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran.

PN 3 - Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Pada PN 3 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 21,76% dengan capaian output telah terealisasi sebesar 41,21%. Capaian yang menjadi sorotan yaitu Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice dengan capaian 50% dan realisasi anggaran Rp0,99 miliar (50,27%), Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya dengan capaian output 50,19% namun realisasi anggaran hanya Rp2,1 miliar (25,83%), Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi dengan capaian output 0% dan realisasi anggaran Rp2,48 miliar (31,48%). Hal ini disebabkan oleh kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses.

PN 4 - Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Pada PN 4 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 43,76% dengan capaian output telah terealisasi sebesar 38,60%. Capaian yang menjadi sorotan yaitu pada sub output KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana dengan realisasi anggaran 40,41% dari pagu Rp4.600.000.000

namun capaian output masih 0%. Selain itu, pada kegiatan Layanan Nikah dan Rujuk terdapat capaian output sebesar 84 orang dari volume 354 orang (23,67%) dengan realisasi anggaran telah mencapai 47,15% dari total pagu Rp2.326.259.000. Hal ini disebabkan oleh kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses.

PN 5 - Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Pada PN 5 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 25,48% dengan capaian output telah terealisasi sebesar 18,75%. Realisasi anggaran didominasi oleh sub output 'Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)' dengan realisasi sebesar Rp42,31 miliar dan sub output 'Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya' dengan realisasi sebesar Rp29,96 miliar namun capaian output keduanya masih 0%. Atas capaian output ini tidak ada keterangan lebih lanjut pada aplikasi Mebe.

PN 6 - Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pada PN 6 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 32,89% dengan capaian output telah terealisasi sebesar 63,14%. Realisasi anggaran didominasi oleh sub output Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif sebesar Rp3,23 miliar dengan capaian 0% dengan keterangan kegiatan fisik RHL P0,P1,P2, KBR Termin II dan UPSA sudah dilaksanakan pencairan belum diajukan. Selain itu terdapat sub output Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif sebesar Rp1,32 miliar dan capaian 219.660 unit (39,94%).

PN 7 - Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Pada PN 7 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 34,79% dengan capaian output telah terealisasi sebesar 50,73%. Realisasi anggaran didominasi oleh sub output Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc sebesar Rp2,14 miliar (81%) namun capaian output 0% serta sub output Dukungan Operasional Badan Adhoc sebesar Rp7,85 miliar (65,96%) namun capaian output masih 12,5%. Kedua capaian output ini 44berjalan sesuai dengan jadwal tahapan pemilu serentak 2024.

2.1.3 Analisis Prognosis APBN Regional

Kanwil DJPb Prov Kepulauan Riau melakukan prognosis terhadap pendapatan dan belanja dengan menggunakan trend analysis. Berdasarkan prognosis APBN s.d. triwulan II sebagaimana ditampilkan pada tabelberikut diperoleh deviasi pendapatan sebesar -8,46% dan deviasi belanja sebesar -19,90%.

Tabel 2.8 – Deviasi Realisasi APBN s.d. Triwulan II Tahun 2023
Lingkup Prov Kepulauan Riau (Miliar Rupiah)

Uraian	Target/ Pagu	Prognosis s.d TW II		Realisasi s.d TW II		Deviasi s.d. TW II	
		Real	%	Real	%	Real	%
Pendapatan Negara	11.474,34	6,400	55,78%	5.858,60	51,06%	-541,40	-8,46%
Belanja Negara	17.493,17	8,173	46,72%	6.546,83	37,43%	-1.626,17	-19,90

Sumber: OM-SPAN (diolah), 2023

Hasil prognosis lebih lanjut, pendapatan hingga akhir tahun 2023 diproyeksikan dapat direalisasikan sebesar Rp12.186 miliar (103%) sedangkan belanja diproyeksikan dapat

direalisasikan sebesar Rp14.351 miliar (97%). Adapun hasil proyeksi secara rinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9 – Prognosis Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup Prov Kepulauan Riau (Miliar Rupiah)

Uraian	Target/ Pagu	Realisasi s.d TW II		Prognosis s.d TW III		Prognosis s.d TW IV	
		Real	%	Real	%	Real	%
Pendapatan Negara	11.474,34	5.858,60	51,06%	9,263	78.37%	12,186	103.10%
Belanja Negara	17.493,17	6.546,83	37,43%	15,473	104.58%	14,351	97.00%

Sumber: OM-SPAN (diolah), 2023

2.2 Analisis Laporan Realisasi APBD

Tabel 2.10 – Perkembangan I-Account APBD di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023 (Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	Triwulan II TA 2022			Triwulan II TA 2023			Growth
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
PENDAPATAN DAERAH	**12,906.39**	**5,096.49**	**39.49%**	**13,772.56**	**5,504.94**	**39.97%**	**8.01%**
PAD	3,971.51	1,608.62	40.50%	4,285.21	1,975.43	46.10%	22.80%
Pendapatan Transfer	8,896.02	3,475.88	39.07%	9,455.86	3,521.72	37.24%	1.32%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38.85	11.98	30.84%	31.49	7.79	24.72%	-35.02%
BELANJA DAERAH	**13,949.62**	**4,317.12**	**30.95%**	**14,456.99**	**4,624.19**	**31.99%**	**7.11%**
Belanja Operasi	**10,427.71**	**3,739.51**	**35.86%**	**10,737.65**	**4,044.83**	**37.67%**	**8.16%**
Belanja Pegawai	4,729.34	2,008.67	42.47%	5,043.43	2,304.26	45.69%	14.72%
Belanja Barang dan Jasa	4,908.03	1,538.62	31.35%	4,942.83	1,554.96	31.46%	1.06%
Belanja Bunga	2.50	-	0.00%	13.14	4.56	34.71%	#DIV/0!
Belanja Subsidi	2.12	0.25	11.97%	2.45	1.42	57.98%	460.13%
Belanja Hibah	728.49	189.80	26.05%	721.90	177.38	24.57%	-6.55%
Belanja Bantuan Sosial	57.23	2.16	3.78%	13.90	2.25	16.20%	4.20%
Belanja Modal	**2,297.02**	**402.24**	**17.51%**	**2,454.59**	**389.88**	**15.88%**	**-3.07%**
Belanja Modal	2,297.02	402.24	17.51%	2,454.59	389.88	15.88%	-3.07%
Belanja Tidak Terduga	**25.87**	**1.50**	**5.81%**	**53.09**	**2.64**	**4.97%**	**75.39%**
Belanja Tidak Terduga	25.87	1.50	5.81%	53.09	2.64	4.97%	75.39%
Belanja Transfer	**1,199.01**	**173.86**	**14.50%**	**1,211.66**	**186.84**	**15.42%**	**7.46%**
Belanja Bagi Hasil	766.47	-	0.00%	679.43	0.69	0.10%	#DIV/0!
Belanja Bantuan Keuangan	432.54	173.86	40.20%	532.23	186.15	34.98%	7.07%
SURPLUS/(DEFISIT)	**(1,043.23)**	**779.37**	**-74.71%**	**(684.43)**	**880.75**	**-128.68 %**	**13.01%**
PEMBIAYAAN	**1,043.23**	**186.94**	**17.92%**	**684.43**	**190.66**	**27.86%**	**1.99%**
Penerimaan Pembiayaan	**1,045.23**	**187.94**	17.98%	**770.77**	**212.26**	27.54%	12.94%
Pengeluaran Pembiayaan	**2.00**	**1.00**	50.00%	**86.34**	**21.60**	25.01%	2059.58 %
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(0.00)**	**966.32**		**-**	**1,071.41**		**10.88%**

Sumber: GFS Semester I Tahun 2023 (diolah)

2.2.1 Pendapatan Daerah Konsolidasi

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp5.504 miliar atau sebesar 39,97%

dari pagu anggaran. Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp3.521 miliar (64% dari pendapatan daerah) dibandingkan PAD sebesar Rp1.975 miliar (36% dari pendapatan daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumpang PAD dengan realisasi sebesar Rp1.647,79 miliar. Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp244 miliar) dan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp206 miliar). Disisi retribusi daerah, retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi penyumbang realisasi terbesar, yaitu Rp21 miliar.

Grafik 2.12 – Breakdown PAD per Kabupaten/Kota (Rp. Miliar)

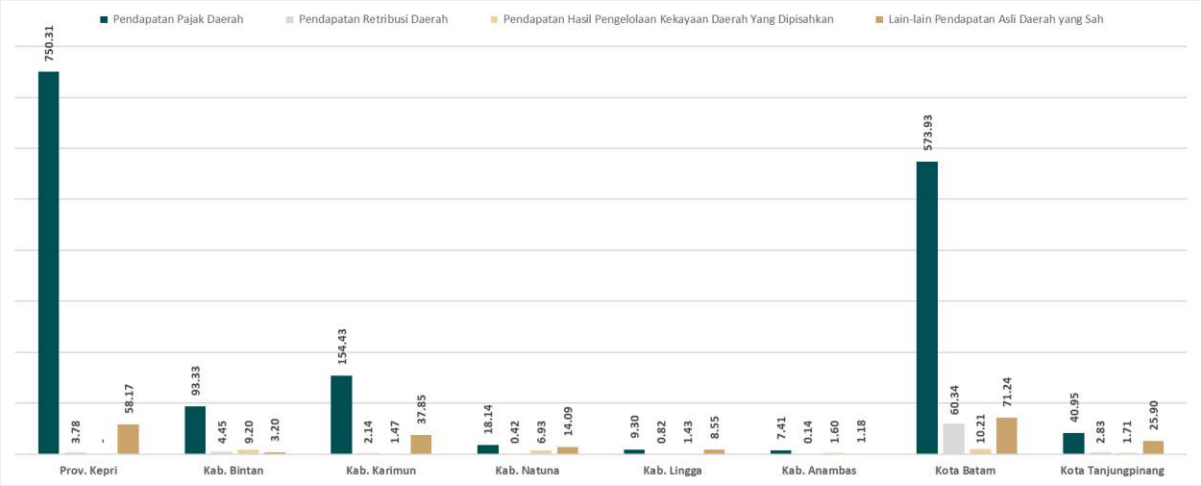

Sumber: GFS Semester I Tahun 2023 (diolah)

Analisis *Growth* Pendapatan Daerah

Dibanding periode Semester I 2022, realisasi Pendapatan Daerah tumbuh sebesar 8,01%. Terdapat pergeseran komposisi pembentuk Pendapatan Daerah pada semester I tahun 2023 (PAD 35%, Pendapatan Transfer 65%) yang disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 22,80% sedangkan Pendapatan Transfer hanya tumbuh 1,32% dibanding periode Semester I 2022. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kemandirian daerah walau hanya sedikit.

Pertumbuhan PAD ditopang oleh meningkatnya Pajak Daerah sebesar Rp339,18 miliar (26%) dan Retribusi Daerah Rp35,66 miliar (90%). Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD sehingga dapat tumbuh sebesar 22,80% dibanding semester I tahun 2022.

Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah ditopang dari peningkatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Pajak hotel meningkat sebesar Rp82,93 miliar atau 188%, pajak restoran meningkat sebesar Rp20,43 miliar atau 34%, pajak hiburan meningkat sebesar Rp8,24 miliar atau 67%, dan peningkatan pajak reklame sebesar Rp5,34 miliar atau sebesar 86% dibandingkan semester I tahun 2022. Peningkatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Provinsi Kepri telah kembali pulih.

Peningkatan pajak reklame signifikan terjadi pada Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Pada Kota Batam, pajak reklame meningkat sebesar Rp4,88 miliar atau 121%, sedangkan pada

Kota Tanjungpinang meningkat sebesar Rp524 juta atau 58%. Pemerintah Kota Batam mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan tarif pajak reklame pada September tahun 2022 yang berlaku efektif pada 1 Januari tahun 2023. Pemerintah Kota Batam melakukan penyesuaian tarif karena pengenaan tarif reklame masih menggunakan peraturan Walikota Batam tahun 2011 sehingga tarif reklame yang berlaku dinilai terlalu rendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan tarif reklame Kota Tanjungpinang. Pada peraturan baru tersebut, tarif reklame meningkat hingga 60%.

Peningkatan pajak reklame Kota Tanjungpinang merupakan buah dari kebijakan Pemko Tanjungpinang untuk menertibkan reklame liar pada triwulan IV tahun 2022. Pemko Tanjungpinang menertibkan sebanyak 190 unit konstruksi papan reklame ilegal. Hal ini efektif dapat meningkatkan pajak reklame Kota Tanjungpinang hingga 58%.

Grafik 2.13 – Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Tanjungpinang dan Kota Batam

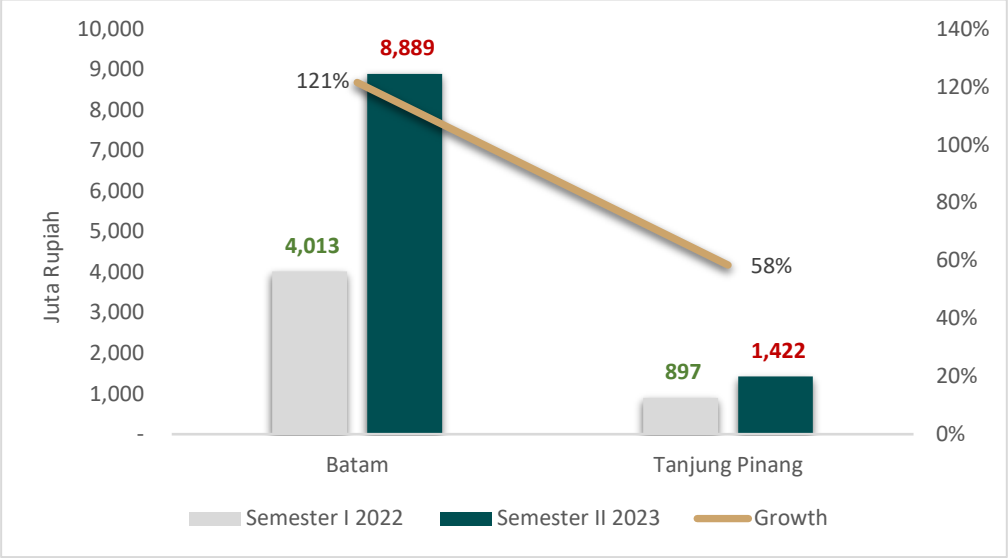

Sumber: Bapenda Kota Tanjungpinang dan Bapenda Kota Batam, 2023 (diolah)

Selain itu, peningkatan pajak juga terjadi pada PBB, terutama untuk Kota Batam. Penerimaan PBB Kota Batam meningkat sebesar Rp73,74 miliar atau sebesar 148%, Pemerintah kota Batam melakukan beberapa upaya yang dimulai pada Semester II tahun 2022, untuk meningkat pendapatan PBB. Adapun upaya-upaya tersebut adalah 1) melakukan penagihan secara aktif, dengan mendatangi dan memberikan surat peringatan terkait kewajiban warga 2) menggelar roadshow ke 12 kecamatan sehingga warga dapat melakukan pembayaran PBB pada kegiatan tersebut, 3) menerapkan kebijakan relaksasi pembayaran berupa diskon 10% pada periode Januari-Maret dan diskon 5% pada periode April-Juni, 4) menyampaikan informasi kebijakan relaksasi dan roadshow melalui persatuan pengusaha.

Pemerintah Kota Batam juga mengeluarkan program insentif atau keringanan pajak BPHTB, berupa potongan harga sebesar 50% bagi warga yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program pendaftaran tanah sistematis atau dalam program daerah (Proda) dengan luas maksimal 600 M2. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan BPHTB sebesar Rp13,97 miliar atau sebesar 9%.

Rekomendasi Pendapatan

1. Kebijakan untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah

masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.

2. Selain itu, kebijakan untuk menertibkan reklame illegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame illegal. Misalnya penertiban izin Perizinan Bangunan Gedung.
3. Melalui hasil FGD dengan pemerintah daerah lingkup provinsi Kepri, diketahui bahwa tiap pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait perpajakan untuk disahkan dan menjadi dasar pemungutan perpajakan, sesuai dengan undang-undang HKPD. Penetapan peraturan perpajakan dan retribusi menyesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing sehingga pendapatan pajak dan retribusi dapat optimal. Pemerintah daerah agar terus secara intensif melakukan percepatan penyelesaian peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat segera diimplementasikan, yang akhirnya dapat meningkatkan PAD daerah masing-masing.

2.2.2 Belanja Daerah Konsolidasi

Grafik 2.14 – Porsi Belanja APBD di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2023

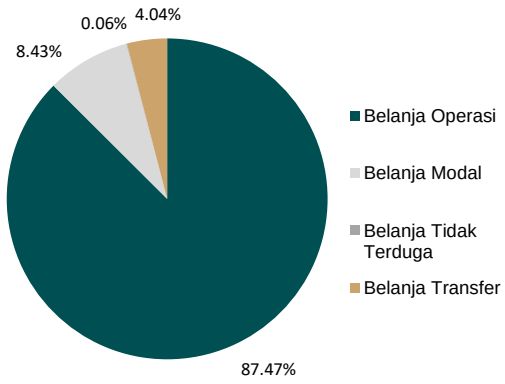

Sumber: GFS 2023 (diolah)

Belanja Daerah Konsolidasi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp4.044,83 miliar atau 37,67% dari pagu belanja. Belanja Subsidi merupakan Belanja Operasional dengan realisasi persentase tertinggi, yaitu 57,98%. Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp389 juta atau 15,88%, Belanja Tidak Terduga baru direalisasikan sebesar Rp2,64 miliar atau 4,97%, dan Belanja Transfer baru dapat direalisasikan sebesar Rp186 juta atau 15,42%. Realisasi Belanja Modal dan Belanja Transfer masih sangat rendah, mengingat Semester I telah terlewati.

Pertumbuhan Belanja Daerah

Belanja Daerah tumbuh 7,11% dibanding semester I tahun 2022. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya Belanja Operasional sebesar 8,16%, Belanja Tidak Terduga sebesar 75,39%, dan Belanja Transfer tumbuh 7,46%. Namun demikian, Belanja Modal tumbuh negatif sebesar (-3,07%) yang menghambat pertumbuhan realisasi belanja dibanding periode yang sama tahun 2022.

Surplus/Defisit

APBD 2023 dianggarkan defisit sebesar Rp684 miliar, namun demikian pada periode Semester I 2023 APBD mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp880 miliar. Surplus tersebut terjadi karena Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar 39,97% namun realisasi Belanja Daerah masih rendah, hanya 31,99%. Seharusnya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kelebihan kas dari Pendapatan Daerah untuk melakukan penyerapan anggaran.

Pembiayaan Daerah

Pemerintah Daerah menganggarkan Pembiayaan sebesar Rp684 miliar, dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp770 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp86 miliar. Pada Periode Semester I, realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp212 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp21,60 miliar. Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota, 4 (empat) kabupaten/kota

Merealisasikan pembiayaan, dengan menggunakan SILPA. 3 (tiga) Kabupaten/kota lainnya tidak merealisasikan pembiayaan dalam bentuk apapun. Pemerintah Provinsi Kepri juga merealisasikan pembiayaan namun dalam bentuk Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan dalam bentuk Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Grafik 2.15 – Penggunaan SiLPA per Kabupaten/Kota

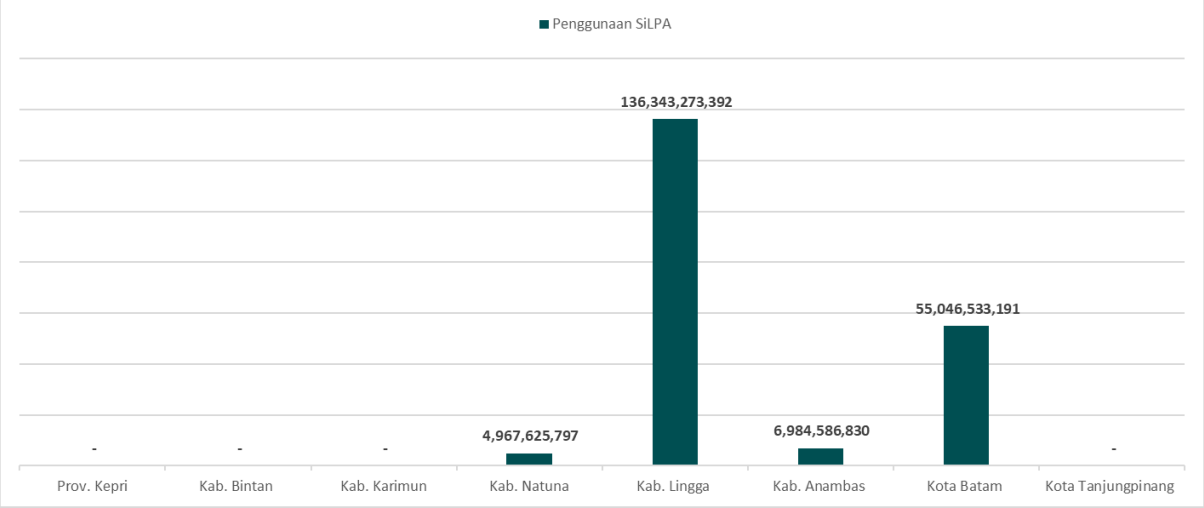

Sumber: GFS Semester I Tahun 2023 (diolah)

Rekomendasi Belanja

1. Realisasi Belanja Daerah, khususnya Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer masih rendah, karena masih berada di angka 15%. Agar dapat memberikan dampak sebagai stimulus bagi perekonomian, pemerintah daerah agar melakukan upaya percepatan penyerapan Belanja tersebut. Upaya percepatan juga perlu dilakukan untuk menghindari belanja tersebut tidak terserap maksimal hingga akhir tahun.

2.3. Analisis Anggaran Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah

2.3.1 Konsolidasi APBN dan APBD

Tabel 2.11 – Perkembangan I-Account APBN dan APBD di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023 (Rp. Miliar)

Uraian		Triwulan II TA 2022	Triwulan II TA 2023			%Growth
			Pusat	Daerah	Konsolidasi	
A	PENDAPATAN KONSOLIDASI	7.865,37	5.858,60	5.504,94	7.834,06	-0,39%
B	BELANJA DAN TRANSFER	6.567,46	6.546,83	4.624,19	7.624,94	16,10%
C	SURPLUS (A-B)	1.297,91	(688,24)	880,75	209,13	-83,89%
D	PEMBIAYAAN (C+D)	186,94	-	190,66	190,66	1,99%
E	SILPA/SIKPA	1.484,85	(688,24)	1.071,41	399,79	-73,08

Sumber: OM-SPAN dan GFS (diolah), 2023

Pendapatan konsolidasi pada triwulan II tahun 2023 mengalami pertumbuhan kontraktif sebesar -0,39% (yoy), sedangkan belanja konsolidasi tumbuh sebesar 16,10% (yoy). Pendapatan konsolidasi didominasi oleh pendapatan pusat sebesar Rp5.858,60 miliar. Belanja konsolidasi didominasi oleh belanja pusat sebesar Rp6.546,83 miliar. Pada postur pusat terdapat SiKPA sebesar Rp688,24 miliar sedangkan di daerah terdapat SiLPA sebesar Rp1.071,41 miliar.

2.3.2 Kontribusi Belanja Konsolidasi Pemerintah Terhadap PDRB

Tabel 2.12 – Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah di Prov. Kepri terhadap PDRB

Periode	Belanja (Milyar)	PDRB ADHK (Milyar)	Rasio Belanja thd. PDRB (%)
(a)	(b)	(c)	(d) = (b) / (c)
s.d. TW II 2021	6.975,05	44.563,25	15,65%
s.d. TW II 2022	6.567,46	46.798,04	14,03%
s.d. TW II 2023	7.624,94	49.155,31	15,51%

Sumber: OM-SPAN dan BPS Kepri 2023 (diolah)

Rasio belanja konsolidasi pemerintah pusat dan daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan II tahun 2023 (15,51%) mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya (14,03). Peningkatan terjadi seiring dengan kenaikan belanja pemerintah pusat maupun daerah.

2.3.3 Analisis Belanja Konsolidasi per Kapita

Tabel 2.13 – Rasio Belanja Pemerintah di Prov. Kepri per Kapita

Periode	Belanja (Milyar)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Belanja per Kapita (Rp juta/jiwa)
(a)	(b)	(c)	(d) = (b) / (c)
s.d. TW II 2021	6.975,05	2.118.239	3,29
s.d. TW II 2022	6.567,46	2.179.820	3,01
s.d. TW II 2023	7.624,94	2.248.484*	3,39

**proyeksi dengan laju pertumbuhan penduduk 3,15%*

Sumber: OM-SPAN dan BPS Kepri 2023 (diolah)

Rasio belanja konsolidasi pemerintah per kapita sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebesar Rp3,39 juta per jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya (Rp3,01 juta/jiwa). Peningkatan terjadi seiring dengan kenaikan belanja pemerintah pusat maupun daerah.

2.4 Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah

2.4.1 Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Per 30 Juni 2023, Total Aset Pemerintah sebesar Rp79.636 miliar. Jumlah tersebut sama dengan jumlah kewajiban (Rp3.925 miliar) ditambah Ekuitas (Rp75.711 miliar). Aset lancar sebesar Rp6.592 miliar, Aset Tetap sebesar Rp74.521 miliar, dan Aset lainnya sebesar Rp2.110 miliar.

Jumlah Aset tumbuh sebesar Rp634 miliar atau 0.80% dibandingkan aset per 31 Desember 2022. Aset Lancar tumbuh sebesar Rp1.023 miliar atau 18,39%. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan Kas dan Setara Kas sebesar Rp553,62 miliar atau 35,11% dan pertumbuhan Piutang sebesar Rp399,63 miliar atau sebesar 12,98%. Aset tetap tumbuh negatif sebesar Rp29,77 miliar atau (-0.04%). Terdapat peningkatan Aset Tanah sebesar Rp1.870 miliar (3,95%), namun demikian terdapat penurunan pada Aset Konsesi Jasa sebesar Rp3.314 miliar (Per 30 Juni 2023 Aset tersebut Rp0), sehingga walaupun aset Tanah meningkat sebesar Rp1.870 miliar (3,95%), menyebabkan pertumbuhan negatif pada total Aset Tetap. Disisi lain, Aset Lainnya juga

tumbuh negatif sebesar Rp151 miliar atau (-6,70%). Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah Properti Investasi sebesar Rp121 miliar (Aset Properti Investasi sebesar Rp0 per 30 Juni 2023).

Kewajiban hanya terdiri Kewajiban Jangka Pendek yang tumbuh negatif sebesar Rp8.045 miliar atau (-4,75%). Hal tersebut disebabkan oleh penurunan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp Rp 383 miliar atau tumbuh negatif sebesar 9,94%. Disamping itu, Ekuitas tumbuh sebesar Rp830 miliar atau 1,11%.

Tabel 2.14 – Perkembangan Neraca per 30 Juni 2022, 31 Desember 2022, dan 30 Juni 2023

URAIAN	NERACA			GROWTH			
				30 Juni 2023 thd. 30 Juni 2022		30 Juni 2023 thd. 31 Des 2022	
	Per 30 Juni 2022 (Miliar Rp)	Per 31 Des 2022 (Miliar Rp)	Per 30 Juni 2023 (Miliar Rp)	Selisih (Miliar Rp)	%	Selisih (M)	%
ASET							
ASET LANCAR	5.710,08	5.568,67	6.592,49	882,41	15,45%	1.023,81	18,39%
ASET TETAP	74.726,17	74.551,72	74.521,96	-204,21	-0,27%	-29,77	-0,04%
ASET LAINNYA	2.105,05	2.261,99	2.110,48	5,43	0,26%	-151,51	-6,70%
JUMLAH ASET	78.940,30	79.002,36	79.636,89	696,59	0,88%	634,53	0,80%
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.580,76	4.120,83	3.925,13	344,37	9,62%	-195,70	-4,75%
JUMLAH KEWAJIBAN	3.580,76	4.120,83	3.925,13	344,37	9,62%	-8.045,96	-4,75%
EKUITAS							
EKUITAS	75.359,54	74.881,53	75.711,76	352,22	0,47%	830,24	1,11%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	78.940,30	79.002,36	79.636,89	696,59	0,88%	634,53	0,80%

Sumber: GFS Semester I Tahun 2022 dan 2023 (diolah)

Grafik 2.16 – Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 30 Juni 2022, 31 Desember 2022, dan 30 Juni 2023

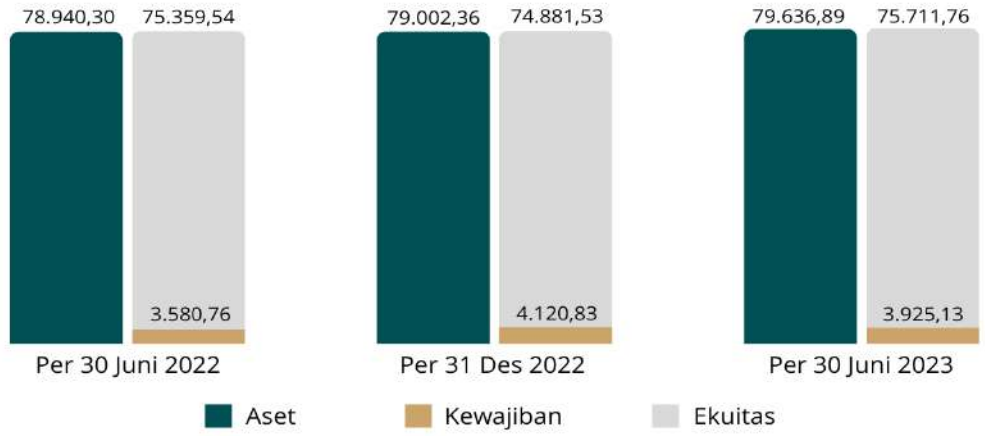

Sumber: GFS Semester I Tahun 2022 dan 2023 (diolah)

2.4.2 Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukkan Aset Tetap (Barang Milik Negara) dari Belanja Modal

Pada Semester I tahun 2023, realisasi Belanja Modal sebesar Rp 389,88 miliar sedangkan penambahan Aset Tetap sebesar Rp29,77 miliar. Oleh karena itu, Rasio Penambahan Aset Tetap Terhadap Belanja Modal (RPATBM) sebesar 13,10. Jika membandingkan Belanja Modal dengan Aset Tetap, maka didapat Rasio Belanja Modal terhadap Aset Tetap (RBMAT) sebesar 0,52%.

Tabel 2.15 – Rasio Penambahan Aset Tetap terhadap Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Aset Tetap Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023

Rincian	TW II Tahun 2023	TW II Tahun 2022
Realisasi Belanja Modal	389,88	402,24
Penambahan Aset Tetap	29,77	-653,86
Aset Tetap	74.521	74.726
Rasio Penambahan Aset Tetap terhadap Belanja Modal	13,10	-0,62
Rasio Belanja Modal terhadap Aset Tetap	0,52%	0,54%

Sumber: OM-SPAN dan GFS Semester I Tahun 2023 (diolah)

Grafik 2.17 – Perkembangan RPATBM Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II Tahun

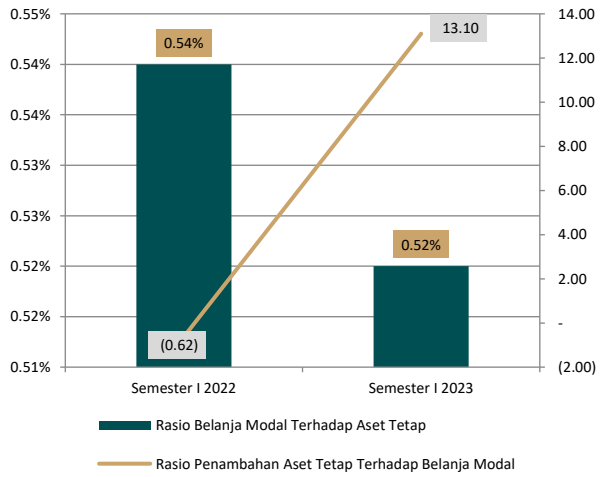

Sumber: OM-SPAN dan GFS Semester I Tahun 2023 (diolah)

RPATBM tumbuh sebesar 13,71 dibandingkan Semester I tahun 2022 (-0,62). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan minus Aset Tetap per Semester I Tahun 2022 sebesar Rp653,86 miliar yang berdampak pada nilai RPATBM menjadi (-0,62). Sebaliknya, RBMAT tumbuh negatif sebesar 0,02% dibandingkan Semester I Tahun 2022. Pertumbuhan negatif disebabkan oleh Realisasi Belanja Modal periode Semester I tahun 2023 lebih rendah Rp12,36 miliar dibandingkan pada Semester I tahun 2022 (Realisasi Belanja Modal Rp402,24 miliar).

2.4.3 Realisasi dan Potensi PNBP dari BMN

PNBP dari pemanfaatan barang milik negara lingkup Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari tiga jenis, yaitu a) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, b) Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin, dan c) Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya. Pada periode s.d. TW II Tahun 2023, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dapat direalisasikan sebesar Rp989.923.122, Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin dapat direalisasikan sebesar Rp265.100.400, sedangkan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya dapat direalisasikan sebesar Rp4.488.000. Realisasi PNBP secara rinci ada pada tabelberikut.

Tabel 2.16 – Realisasi PNBP dari Pemanfaatan Aset Tetap di Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2023 (Rupiah)

Kode Akun	Jenis Pendapatan	s.d. TW II 2023	2022	2021
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	989.923.122	2.586.950.749	2.355.622.964
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	265.100.400	128.306.542	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	4,488,000	5.400.000	0
Total		**1.259.511.522**	**2.720.657.291**	**2.355.622.964**

Sumber: SINTESA (diolah), 2023

Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap satker yang mempunyai PNBP. Dari hasil monitoring masih terdapat peluang untuk menggali potensi

PNBP dari BMN, seperti pemanfaatan lahan dan gudang, serta pemanfaatan gedung untuk disewakan kepada koperasi dan/atau pihak perbankan, pada satker Balai Pelatihan Kesehatan Batam.

Hasil temuan lainnya diperoleh bahwa PNBP dari pemanfaatan BMN bukan merupakan fokus utama dari PNBP yang ditargetkan oleh satker karena pendapatan ini yang sifatnya bukanlah pendapatan teknis. Oleh karena itu realisasi PNBP pemanfaatan BMN yang rendah tidak termasuk dalam temuan yang berarti meskipun pada kenyataannya banyak satkerpengelola PNBP yang kurang memaksimalkan pemanfaatan asetnya, seperti Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang bergerak dalam sektor pendidikan. UMRAH lebih fokus mencapai target PNBP seperti pembayaran biaya perkuliahan mahasiswa dibandingkan dengan pemanfaatan aula dan gedung kampus.

BAB III

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Telaga Biru, Kab. Bintan

Sumber: Dinas Pariwisata Prov.Kepri

BAB III
PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

3.1 Sektor Unggulan Daerah

Sesuai dengan analisis sektor unggulan daerah yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau melalui metode *Location Quotient, shift-share (Differential Shift),* dan analisis Tipologi Klassen, sektor unggulan daerah pada Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor Industri Pengolahan.

3.1.1 Profil dan Kondisi Eksisting Sektor Unggulan Daerah

Tabel 3.1 - Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2020-2023 (persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	Q2 2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,17	3,07	2,99	2,91
Pertambangan dan Penggalian	11,16	12,59	12,58	11,455
Industri Pengolahan	41,63	42,03	40,81	40,32
Pengadaan Listrik dan Gas	1,02	0,99	1,06	1,085
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,1	0,1	0,095
Konstruksi	19,41	19,29	19,21	19,205
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,49	8,15	8,83	9,215
Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,39	1,91	2,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,33	1,15	1,58	2,035
Informasi dan Komunikasi	2,55	2,57	2,5	2,875
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,75	2,61	2,56	2,63
Real Estate	1,26	1,13	1,09	1,135
Jasa Perusahaan	0	0	0	0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,89	2,43	2,33	2,48
Jasa Pendidikan	1,53	1,41	1,35	1,395
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,9	0,93	0,86	0,765
Jasa lainnya	0,17	0,16	0,25	0,31
PDRB	100	100	100	100

Sumber: BPS Kepri, Agustus 2023

Sampai dengan Semester I tahun 2023, Industri Pengolahan menyumbangkan 40,32% dari total PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, jauh lebih tinggi dari sektor penyumbang kedua yaitu sektor Konstruksi dengan persentase sebesar 19,20%. Sektor Industri Pengolahan terdiri dari beberapa sub sektor, dengan sub sektor penyumbang PDRB terbesar adalah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Logam Dasar dan Industri Alat Angkutan. Dapat kita lihat pada tabel diatas, Industri Pengolahan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di lingkup Provinsi Kepulauan Riau selama 3 tahun terakhir dengan rata-rata kontribusi Industri Pengolahan pada tahun 2020 – 2022 adalah 41,49% dari total PDRB.

Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan yang tinggi pada PDRB tidak terlepas dari adanya Kawasan Perdagangan Bebas/*Free Trade Zone* Batam, Bintan, Karimun (BBK). FTZ BBK ditetapkan sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya PP No 46 tahun 2007 untuk FTZ Batam, PP No 47 tahun 2007 untuk FTZ Bintan, dan PP No 48 tahun 2007 untuk FTZ Karimun. Pada Kota Batam, FTZ di berlakukan secara keseluruhan di seluruh wilayah Batam, namun pada FTZ Bintan dan Karimun, FTZ hanya diberlakukan di wilayah khusus.

Pada FTZ Batam diberlakukan di seluruh wilayah Batam, artinya, seluruh transaksi di wilayah Batam terbebas dari pajak ataupun cukai. BP Batam selaku pengelola kawasan FTZ Batam telah melakukan berbagai pembangunan dan kegiatan-kegiatan untuk memikat minat investor. Terbukti dengan Batam merupakan penyumbang PDRB Provinsi Kepulauan Riau terbesar. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemangkasan waktu perizinan yang dilakukan satu pintu di FTZ Batam (*Online Single Submission/OSS)*.

FTZ Bintan dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu FTZ Bintan Utara dengan luas 58,750 Ha, FTZ Bintan Timur dengan luas 812,60 Ha, FTZ Industri Galang Batam dengan luas 626,60 Ha, serta Pulau Anak Lobam di Bintan Utara seluas 678,20 Ha. Untuk mendukung kegiatan industri serta perdagangan di wilayah Bintan, terdapat 2 pelabuhan yang ditunjuk sebagai Pelabuhan Bebas, yaitu Pelabuhan Sei. Kolak Kijang di wilayah Bintan Timur yang dikelola PT. Pelindo dan Pelabuhan Sri Udana Lobam di wilayah Bintan Utara yang dikelola oleh PT. Bintan Inti Industrial Estate (PT. BIEE). Dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi, BP Bintan selaku pengelola FTZ Bintan telah membangun jalan-jalan beserta penerangan untuk membuka akses kewilayahan yang memiliki potensi untuk menjadi kawasan pariwisata dan industri sehingga meningkatkan daya tarik bagi investor.

Sama seperti FTZ Bintan, FTZ Karimun tidak diberlakukan di seluruh wilayah Karimun, FTZ Karimun meliputi sebagian Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak dengan total luas 9.666,18 Ha. Setelah mendapat status wilayah FTZ Karimun, BP Karimun selaku pengelola FTZ Karimun sukses meningkatkan investor yang berbisnis di Karimun, yang sebelumnya hanya satu galangan Kapal PT. Karimun Sembawang *Shipyard* yang berasal dari Singapura, menjadi 268 perusahaan yang terdaftar di Kawasan BP Karimun pada 2009 s/d 2022.

Pada Provinsi Kepulauan Riau, terdapat tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah beroperasi, yaitu KEK Galang Batang, KEK Nongsa, dan KEK Batam Aero Technic. Diantara 3 KEK tersebut, terdapat 2 KEK yang mendukung perkembangan industri pengolahan, yaitu KEK Galang Batang yang berada pada Kabupaten Bintan dan KEK Batam Aero Technic yang berada pada Kota Batam. Sedangkan KEK Nongsa merupakan KEK yang berkegiatan utama sebagai KEK IT Digital dan pariwisata. KEK Nongsa berfungsi sebagai *entry point* bagi perusahaan IT Internasional, selain

itu KEK Nongsa juga menarik investor dan wisatawan luar dan dalam negeri dengan adanya kegiatan pendukung berupa pariwisata, hunian sinematik, vila residential, café dan restoran, ferry terminal, serta area komersial dan *entertainment.*

Galang Batang merupakan KEK yang memiliki akses langsung dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan yang resmi beroperasi pada tanggal 8 Desember 2018. KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter dengan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berasal dari Kota Nanshang, Tiongkok. KEK Galang Batang diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang serta berpotensi untuk menciptakan multiplier effect di Kawasan sekitar. Nilai investasi pembangunan KEK Galang Batang diperkirakan akan mencapai Rp36,25 triliun hingga tahun 2027. KEK Galang Batang merupakan KEK dalam wilayah *FTZ* Kawasan Industri Galang Batang.

Sedangkan KEK Batam Aero Technic merupakan KEK yang terintegrasi dengan bandara Hang Nadim. Kehadiran KEK Batam Aero Technic bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi negara, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam jangka pendek, keberadaan KEK Batam Aero Technic mampu menghemat devisa 65-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional atau senilai Rp26 triliun per tahun yang selama ini mengalir ke luar negeri. Sementara itu dalam jangka menengah KEK Batam Aero Technic diharapkan mampu menangkap peluang pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar US$ 100 miliar pada tahun 2025. Selain itu, dengan keberadaan KEK ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas SDM Indonesia di bidang industri MRO.

Sementara itu, target investasi di KEK Batam Aero Technic sebesar Rp7,29 triliun sampai dengan tahun 2027 dengan serapan tenaga kerja mencapai 9.976 orang pada periode yang sama. Target investasi KEK Batam Aero Technic akan direalisasikan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung industri MRO, seperti *hanggar maintenance, hanggar painting, hanggar cleaning, component shop, apron, taxiway, component shop, workshop untuk tools & equipment*, dan sebagainya. Pengembangan dan operasional KEK Batam Aero Technic diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus KEK Batam *Aero Technic* adalah PT Batam Teknik. PT Batam Teknik selama ini bergerak di bidang penyedia jasa perawatan dan perbaikan pesawat (MRO), khususnya untuk pesawat-pesawat Lion Air Group.

Sampai dengan Juni 2023, penerimaan perpajakan yang diterima di Provinsi Kepulauan Riau yang diterima adalah sebesar Rp4.740,87 miliar. 44,95% dari total penerimaan tersebut atau Rp2.131,12 miliar adalah penerimaan yang bersumber dari sektor industri pengolahan. Industri Pengolahan selalu menjadi sektor usaha penyumbang penerimaan negara tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau per Juni pada tahun 2020 – 2023 dengan rata-rata kontribusi sebesar 42,29%. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata kontribusi sebesar Rp16,40%.

Grafik 3.1 - Sektor-Sektor Penerimaan Pajak di Provinsi Kepulauan Riau (dalam miliar)

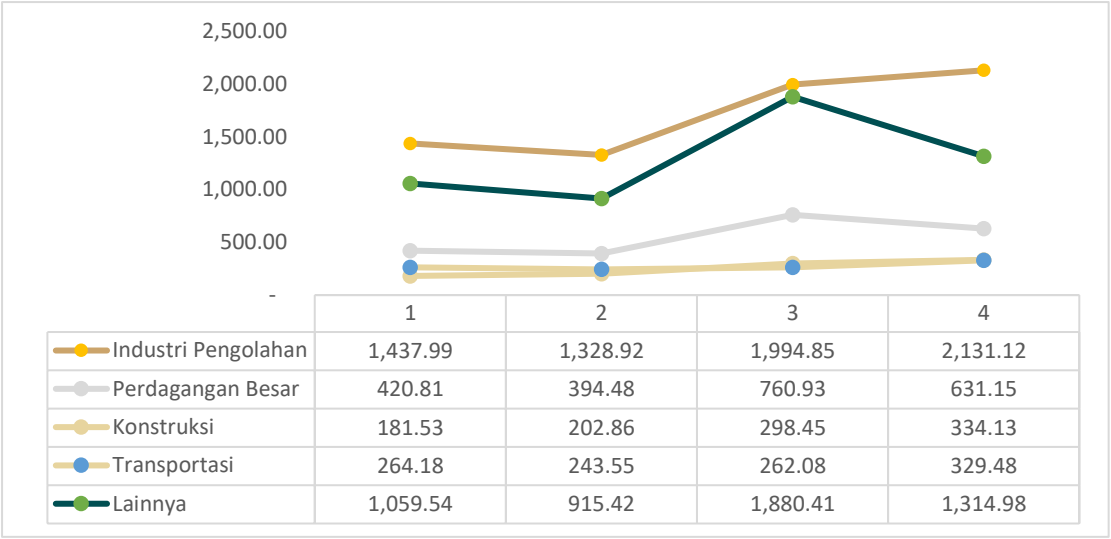

	1	2	3	4
Industri Pengolahan	1,437.99	1,328.92	1,994.85	2,131.12
Perdagangan Besar	420.81	394.48	760.93	631.15
Konstruksi	181.53	202.86	298.45	334.13
Transportasi	264.18	243.55	262.08	329.48
Lainnya	1,059.54	915.42	1,880.41	1,314.98

Sumber: Kanwil DJP Kepulauan Riau, Agustus 2023

Pada Tahun 2023 di Provinsi kepulauan Riau, Apabila dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.023.125 orang, maka Industri Pengolahan merupakan sektor usaha dengan jumlah pekerjaan penduduk terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan total sebesar 280.541 orang atau 27,42% penduduk bekerja di bidang Industri Pengolahan, 176.387 orang atau 17,24% penduduk bekerja di bidang Perdagangan, 98.527 orang atau 9,63% penduduk bekerja di bidang Akomodasi, 82.055 orang atau 8,02% penduduk bekerja di bidang Konstruksi, 385.616 orang atau 37,69% lainnya bekerja pada sektor lainnya. Selain itu, terdapat pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada Industri Pengolahan yang cukup tinggi sebesar 41,8 ribu orang pada tahun 2023 (yoy). Hal ini turut didukung dengan penyerapan tenaga kerja dari kedua KEK (KEK BAT dan KEK Galang Batang) yang berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2023 sebesar 0,41 poin. Sedangkan sektor perdagangan merupakan sektor dengan jumlah penduduk yang bekerja berkurang terbanyak sejumlah 19,6 ribu orang.

Grafik 3.2 - Pertumbuhan Jumlah Pekerja di Provinsi Kepulauan Riau (yoy, ribuan orang)

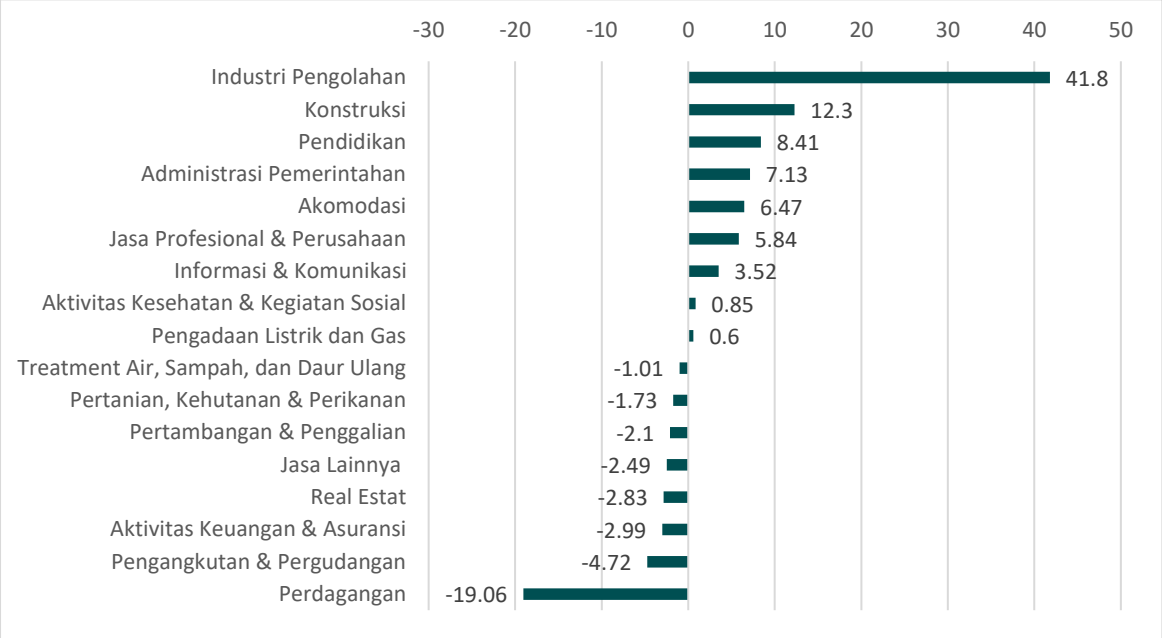

Sumber: BPS Kepri, Agustus 2023

Peningkatan kinerja industri pengolahan sejalan dengan peningkatan aktivitas industri manufaktur di Singapura khususnya pada industri mesin sebagaimana tercermin dari peningkatan Index of Industrial Production Singapura untuk kelompok Machinery and Equipment yang pada triwulan I 2023 berada pada level yang tinggi sebesar 134,11.

3.1.2 Dukungan Pemerintah Terhadap Perkembangan Sektor Industri Pengolahan

Dukungan Fiskal

Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat konektivitas dan perdagangan antar wilayah. Maka dari itu, dukungan pemerintah dalam meningkatkan industri pengolahan tidak hanya dukungan secara langsung, namun dukungan secara tidak langsung seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program pengembangan kawasan strategis.

Tabel 3.2 - Dukungan Fiskal Pemerintah untuk sektor Industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Riau TA 2023 (Rp Miliar)

Program	Pagu	Realisasi
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.508,25	1.093,59
Program Infrastruktur Konektivitas	783,07	783,07
Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.717,91	309,63
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3,27	0,89
BELANJA DAK FISIK	233,42	35,43
Bidang Jalan	213,82	35,43
Bidang Industri Kecil dan Menengah	19,60	-
BELANJA PEMERINTAH DAERAH	-*	15,38
Belanja Urusan perindustrian	-*	15,38
TOTAL	2.741,67	1.144,40

Sumber: Mebe dan OMSPAN, Agustus 2023
*data tidak tersedia

Jika dilihat dari data diatas, Pemerintah memiliki berbagai program peningkatan infrastruktur konektivitas melalui belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (DAK Fisik). Belanja infrastruktur konektivitas dan pengembangan Kawasan strategis tersebut secara tidak langsung turut mendukung dan menggerakkan sektor industri pengolahan. Selain belanja tersebut, terdapat belanja nilai tambah dan daya saing industri dan belanja urusan perindustrian, namun pagu anggaran untuk belanja tersebut cukup kecil.

Selain belanja diatas, secara nasional terdapat anggaran subsidi yang diarahkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, serta mendukung UMKM. Subsidi energi melalui pemberian selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan, serta subsidi listrik yang tepat sasaran dengan diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Sedangkan pada subsidi non energi, terdapat insentif perpajakan melalui subsidi pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah sebagai stimulus dunia usaha. Selain itu, subsidi juga digunakan untuk menjaga agar kestabilan harga yang barang, termasuk bahan baku dan barang jadi industri pengolahan.

Grafik 3.3 - Anggaran Subsidi Indonesia tahun 2019 – 2023 (Rp Triliun)

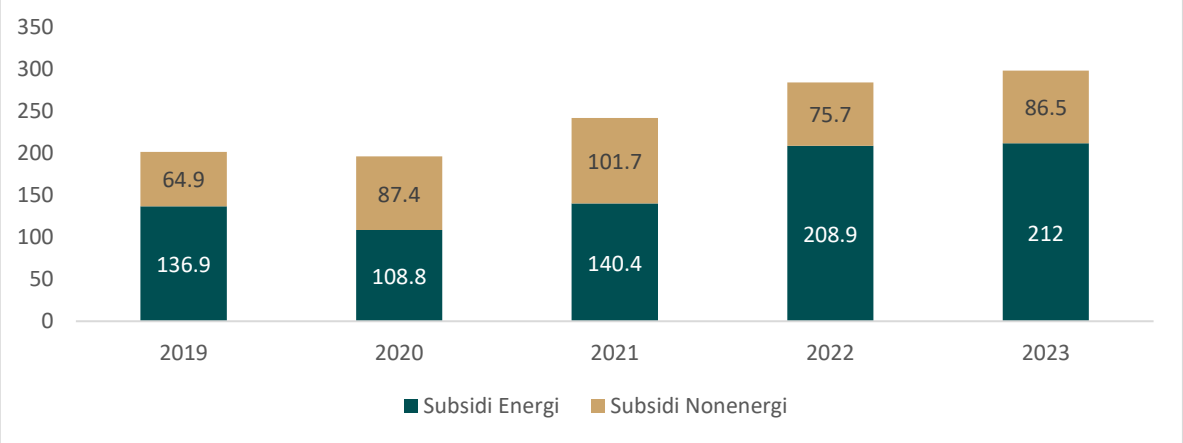

Sumber: Informasi APBN 2023

Dukungan Kebijakan

Terdapat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan untuk mendukung perkembangan sektor industri pengolahan, kebijakan-kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan yang mendukung pembangunan KEK (Galang Batang dan Batam Aero Technic). Dalam masa awal pembangunan KEK Galang Batang di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan memberikan dukungan penuh melalui penerbitan peraturan sebagai berikut.

a. Peraturan Gubernur No. 20 tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepulauan Riau kepada Administrator KEK Galang Batang tanggal 5 Maret 2018.
b. Peraturan Bupati No. 20 tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan, Non Perizinan, dan Penanaman Modal dari Bupati Bintan kepada Kepala Administrator KEK Galang Batang pada 13 Maret 2018.

Sementara itu di tingkat pusat, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam rangka pengaturan teknis pemberian kebijakan (fleksibilitas) kepada KEK Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus diikuti dengan beberapa peraturan menteri terkait. Beberapa peraturan Menteri tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 Tentang Perlakukan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

   Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021, penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan dengan perincian sebagai berikut.

   1) Pajak Penghasilan (PPh)
   2) Pengurangan PPh Badan/Tax Holiday untuk kegiatan utama dengan detail sebagai berikut:
   3) Investasi lebih dari Rp1 triliun mendapat pengurangan PPh 20-100% selama 10-25 tahun.
   4) Investasi Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun mendapat pengurangan PPh 20-100% selama 5-15 tahun.
   5) Investasi kurang dari Rp500 miliar mendapat pengurangan PPh 20-100% selama 5-15 tahun.
   6) Untuk KEK tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.
   7) Fasilitas perpajakan/tax allowance untuk di luar kegiatan utama dengan detail sebagai berikut:
      - Pengurangan penghasilan neto 30% dibebankan selama 6 tahun;
      - Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
      - Pengenaan PPh atas dividen kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10%;
      - Kompensasi kerugian selama 5 s.d. 10 tahun.

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atas:
- Penyerahan barang kena pajak berwujud dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), Free Trade Zone (FTZ), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB);
- Impor barang kena pajak berwujud;
- Impor barang konsumsi ke KEK pariwisata;
- Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) di KEK yang sama atau KEK lainnya.
- Pajak Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) tidak dipungut.
- Kepabeanan dan cukai diberikan fasilitas sebagai berikut:
- Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk impor barang modal serta barang konsumsi di KEK pariwisata.
- Pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai.
- Penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI bagi pelaku usaha yang telah menyelesaikan pembangunan/pengembangan.
- Diberlakukan tarif bea masuk 0% atas hasil produksi yang menggunakan TKDN 40%.
- Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebesar 50% s.d. 100%.

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2021 disebutkan bahwa fasilitas dan kemudahan keimigrasian diberikan kepada setiap orang asing yang akan melakukan kegiatan di KEK. Fasilitas keimigrasian diberikan dalam bentuk pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan izin tinggal. VKSK adalah visa kunjungan atas kuasa Direktur Jenderal Imigrasi yang diberikan kepada warga negara asing pada saat tiba di wilayah Indonesia. Orang asing pemegang VKSK di KEK dapat diberikan izin tinggal dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Izin tinggal kunjungan

Izin tinggal kunjungan diberikan untuk jangka waktu 30 hari dan dapat diberikan perpanjangan izin tinggal oleh Pejabat Imigrasi pada Administrator KEK sebanyak 5 (lima) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 30 hari.

- Izin tinggal terbatas

Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang akan bekerja di KEK berdasarkan alih status dari izin tinggal kunjungan. Izin tinggal terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin tinggal terbatas diberikan oleh Pejabat Imigrasi pada administrator KEK untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah KEK tidak melebihi 15 tahun.

- Izin tinggal tetap

Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada orang asing di KEK dengan ketentuan: sebagai pengurus Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang melakukan penanaman modal; dalam rangka rumah kedua; atau memiliki rumah tinggal atau hunian di KEK pariwisata. Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Pejabat Imigrasi di Administrator KEK untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Izin tinggal tetap merupakan alih status dari izin tinggal terbatas melalui permohonan.

Selain hal tersebut diatas, terdapat kebijakan Regulasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi seperti:

a. UU Cipta Kerja (UU No.6 Tahun 2023) dalam upaya pembenahan regulasi kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan produktivitas;
b. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, reformasi perpajakan agar lebih adil, efisien, sehat, dan berkelanjutan;
c. UU HKPD, memperkuat sistem perpajakan daerah, mengurangi ketimpangan, penguatan kualitas belanja dan harmonisasi.

3.1.3 Analisis Potensi Pengembangan Sektor Unggulan

Visi Indonesia pada tahun 2024 adalah menjadi negara maju yang menempati rangking 5 PDB dunia, untuk mencapai hal tersebut, salah satu tujuan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kontribusi industri terhadap PDB yang pada saat ini 20,5% menjadi 26% pada tahun 2045. Untuk peningkatan potensi sektor lapangan usaha industri pengolahan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Percepatan pembangunan Kawasan Industri yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau yang masih berstatus on progress. Dua Kawasan industri tersebut adalah sebagai berikut

- **Kawasan Industri Pulau Ladi**

Kawasan Industri Pulau Ladi ditetapkan menjadi PSN berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kawasan industri Pulau Ladi dibangun sebagai pusat pengolahan limbah terpadu di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan industri ini terletak di Pulau Ladi, Kota Batam dan memiliki luas kurang lebih 300-an hektar.

Sebagai industri pengolahan limbah, tujuan pembangunan Kawasan Industri Pulau Ladi adalah sebagai solusi bagi permasalahan limbah industri di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Secara konsep, kawasan industri ini menyewakan lahan sebagai tenant-tenant untuk mengelola limbah medis dan limbah industri. Tujuan akhir pengelolaan limbah medis dan limbah industri yakni untuk mengolah limbah-limbah menjadi zero waste atau limbah yang terurai habis tanpa sisa, serta dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik di kawasan industri dimaksud.

- **Kawasan Industri Tanjung Sauh**

Kawasan Industri Tanjung Sauh ditetapkan menjadi PSN berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kawasan Industri Tanjung Sauh disiapkan menjadi

pelabuhan industri dan peti kemas dengan nilai investasi senilai Rp33 triliun di lahan seluas 250 hektar.

Tujuan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Sauh ini adalah menjadikan kawasan industri menjadi terminal kontainer internasional, jasa alih kapal, serta mengembangkan kawasan industri yang dapat menopang perekonomian Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Selanjutnya target pengembangan Kawasan Industri Tanjung Sauh adalah untuk mendorong dan mensinergikan pertumbuhan ekonomi baru untuk pembangunan Batam-Bintan.

Mengoptimalkan keberadaan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dan meningkatkan keunggulan Kawasan Perdagangan Bebas/*Free Trade Zone* Batam-Bintan-Karimun. Angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2023 adalah sebanyak 1.107.353 orang, namun masih terdapat 84.228 orang yang menjadi pengangguran terbuka. Melihat adanya pertambahan pekerja pada lapangan usaha industri pengolahan yang meningkat tinggi pada tahun 2023 dan pertumbuhan kontribusi industri pengolahan yang cukup stabil dari tahun ke tahun, serta perkembangan dan pengembangan KEK dan Kawasan Industri yang dikelola baik oleh Pemerintah ataupun Swasta, maka terdapat peluang adanya lapangan kerja baru di bidang industri pengolahan yang dapat menyerap tenaga kerja baru dan mengurangi angka pengangguran terbuka. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha (termasuk namun tidak terbatas pada industri pengolahan) adalah biaya logistik yang tinggi dan pengiriman barang yang memakan waktu cukup lama mengingat Kepulauan Riau adalah wilayah dengan luas laut mencapai 96% dari total wilayah Kepulauan Riau. Untuk mengurangi biaya logistik ini, pemerintah dapat memperkuat interkoneksi antar daerah terutama jalur darat sehingga dapat mendorong kelancaran arus barang.

3.2 Sektor Potensial Daerah

3.2.1 Perkembangan Sektor Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Sampai dengan semester I tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Kepri sebesar 9,22%. Capaian kontribusi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,07% dibandingkan dengan semester I tahun 2022. Jika dilihat pada beberapa tahun sebelumnya di periode yang sama kontribusi sektor perdagangan mengalami tren cenderung stabil walaupun terdapat penurunan kontribusi di tahun 2021.

Grafik 3.4 - Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB, Periode Sem I Tahun 2020 – 2023 (%)

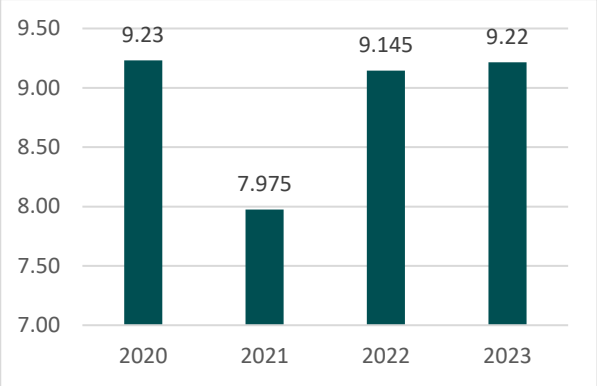

Grafik 3.5 - Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Tahun 2020-2022 (%)

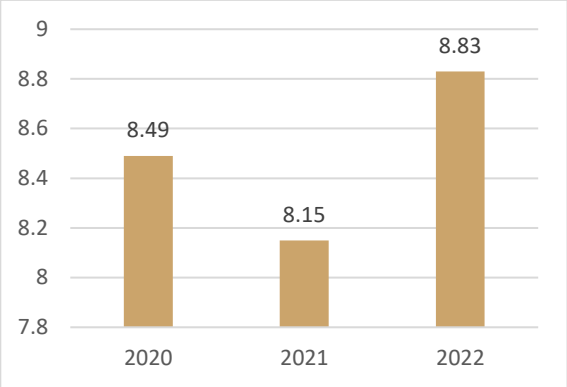

Sumber : BPS Kepri , 2023 (diolah)

Jika dilihat kontribusi secara tahunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Kepri mengalami tren peningkatan. Dimana pada tahun 2022, kontribusi sektor perdagangan mengalami peningkatan 0,68% dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2022 disebabkan oleh pertumbuhan PDRB sektor perdagangan sebesar 13,59%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan pada Perdagangan besar dan eceran (15,24%) dan perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya (9,22%).

Tabel 3.3 - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (2021-2022)

Sektor Lapangan Usaha	PDRB		Growth
	2021	2022	
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.592.975,14	15.439.624,64	13,59%
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3.734.123,22	4.078.520,89	9,22%
2. Perdagangan Besar dan Eceran	9.858.851,91	11.361.103,74	15,24%

Sumber: BPS Kepri, 2023 (diolah)

Sehubungan dengan investasi di sektor perdagangan, sampai dengan semester I tahun 2023, telah terealisasi sebesar Rp238.942,5 juta. Pada tahun 2021, investasi sektor perdagangan dan reparasi mengalami peningkatan 74,67%. Selanjutnya di tahun 2022 investasi perdagangan sebesar Rp338.837,3 juta atau terkontraksi -79,43%.

Grafik 3.6 - Investasi PMDN Sektor Perdagangan dan Reparasi di Kepri Tahun 2020-2023 (Rp. Juta)

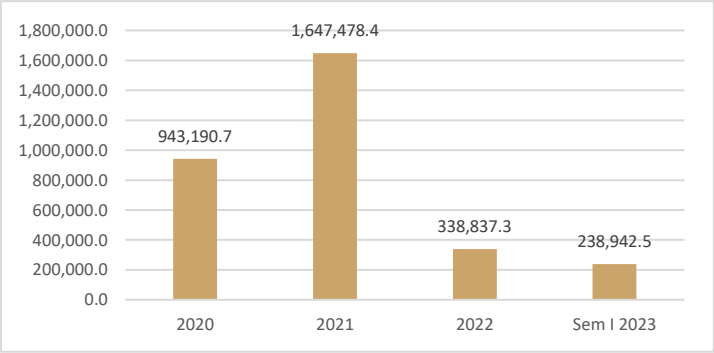

Sumber: BKPM , 2023 (diolah)

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, berdasarkan hasil Sakernas Februari tahun 2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor masuk didalam tiga sektor usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak, dengan kontribusi sebesar 17,24% (176.387 orang) dari total penduduk bekerja (1.023.235 orang). Namun jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2022, jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan mengalami penurunan sebanyak 19,06 ribu orang.

Dari sisi penerimaan, dari tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2023, sektor perdagangan telah berkontribusi sebesar 6,74% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat. Penerimaan dari sektor perdagangan tertinggi berada pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 92,90% dibandingkan tahun 2021. Sampai dengan semester I tahun 2023, penerimaan dari sektor perdagangan telah terealisasi Rp631,15 miliar, nilai ini telah melampaui realisasi di tahun 2020-2021 dan hampir mencapai total realisasi di tahun 2022.

Grafik 3.7 - Penerimaan Perpajakan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2020-2023 (Rp. miliar)

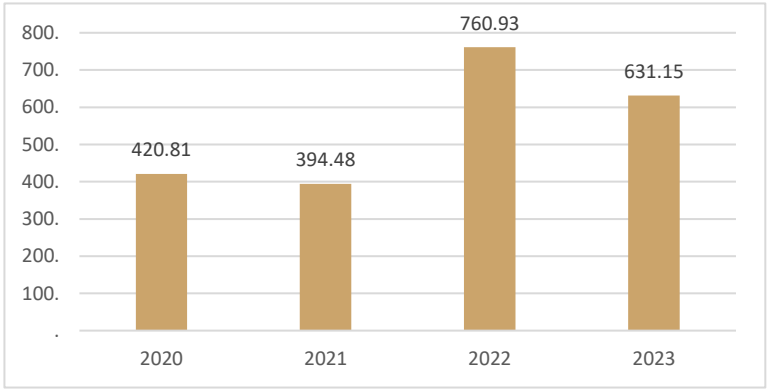

Sumber : Kanwil DJP Kepri, 2023 (diolah)

3.2.2 Dukungan Pemerintah terhadap Sektor Perdagangan

- **Dukungan belanja APBN terhadap Sektor Perdagangan**

Dalam mendukung perekonomian Masyarakat khususnya di sektor usaha mikro, kecil dan menengah pemerintah mendorong pelaku usaha umkm melalui bantuan permodalan usaha,

yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). 50,21% penerima KUR di Kepri menjalankan usaha dibidang sektor perdagangan. Sedangkan hampir seluruh penerima UMi berusaha di sektor perdagangan.

Hingga bulan Juni tahun 2023, total realisasi KUR di Provinsi Kepri sudah mencapai Rp738,8 miliar kepada 11.475 debitur. Penyaluran tersebut terbagi dari KUR Kecil (Rp379,38 miliar), KUR Mikro (Rp328,44 miliar), dan KUR Supermi (Rp31,02 miliar). Dibandingkan dengan Penyaluran KUR di tahun 2022, terdapat penurunan penyaluran KUR Kecil (-33,58%) dan KUR Mikro (-43,82%). Penurunan penyaluran sebagai dampak telat salur dipengaruhi oleh terlambatnya penerbitan peraturan internal perbankan terkait pagu dan kuota penyaluran KUR di Kepulauan Riau, sehingga Bank Penyalur belum dapat menyalurkan KUR sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Grafik 3.8 – Penyaluran KUR di Provinsi Kepri per Sektor Usaha s.d. 30 Juni 2023

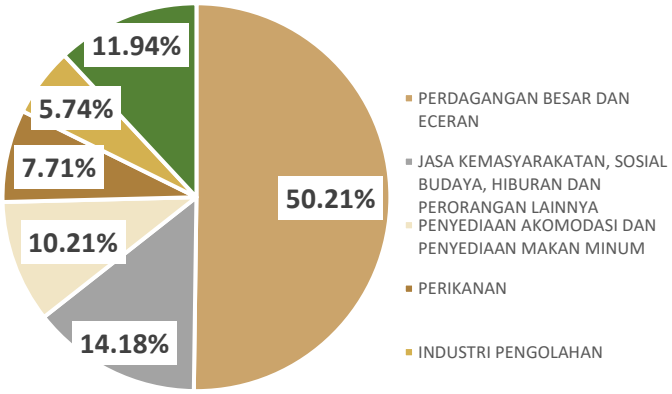

Sumber : SIKP, 2023 (diolah)

Grafik 3.9 – Penyaluran KUR pada Bulan Juni Tahun 2020 dan 2023

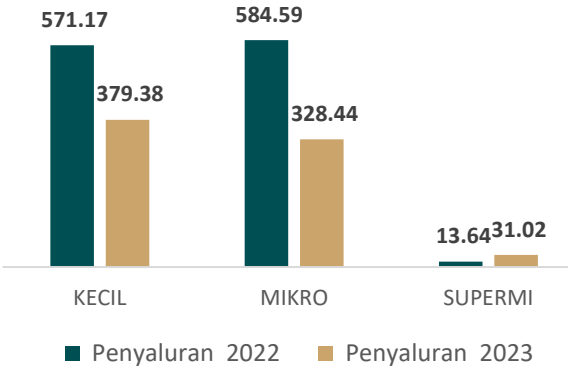

Sumber : SIKP, 2023 (diolah)

Grafik 3.10 – Debitur Penerima KUR pada Bulan Juni Tahun 2020 dan 2023

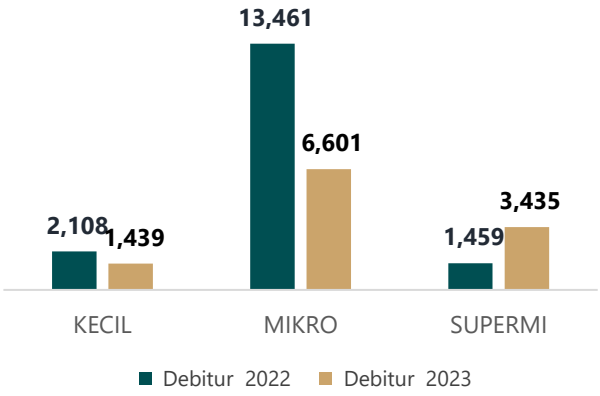

Sumber : SIKP, 2023 (diolah)

Sedangkan, Penyaluran UMI sampai dengan bulan Juni tahun 2023, sudah tersalur Rp13,53 miliar kepada 2.836 debitur. Dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2022, penyaluran UMi mengalami kontraksi sebesar -36,82%.

Dukungan belanja APBD terhadap Sektor Perdagangan

Sebagaimana penjelasan pada subbab sektor unggulan, salah satu dukungan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kepri kepada sektor perdagangan adalah melalui belanja fungsi ekonomi

urusan perdagangan. Pada tahun 2020, realisasi belanja APBD urusan perdagangan mencapai Rp168,43 miliar. Namun pada tahun 2023 realisasi APBD urusan perdagangan mengalami kontraksi sebesar -86,16%, sehingga hanya terealisasi Rp23,31 miliar. Pada tahun 2022, belanja APBD untuk perdagangan telah terealisasi Rp29,83 atau tumbuh 27,97% dibandingkan realisasi ditahun 2021. Sampai dengan semester I tahun 2023 belanja APBD untuk sektor perdagangan sudah terealisasi Rp19,46 miliar.

Grafik 3.11 - Realisasi Belanja APBD Fungsi Ekonomi Urusan Perdagangan Tahun 2020 – 2023 (Rp miliar)

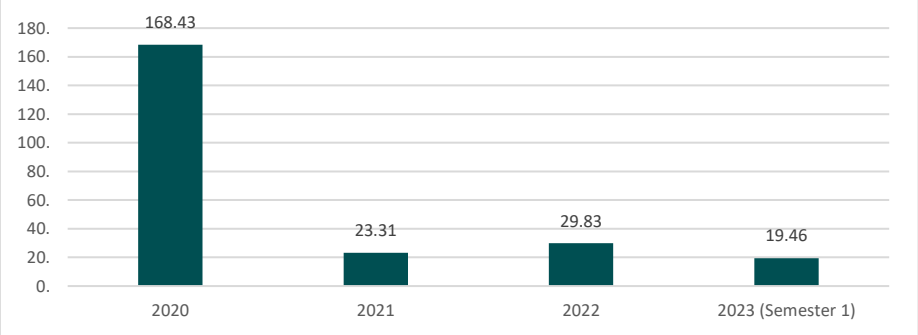

Sumber : BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Selain dukungan belanja APBD fungsi ekonomi urusan perdagangan, pemerintah provinsi kepulauan riau juga mendukung UMKM melalui program pembiayaan kredit dengan bunga 0 persen. Program bantuan modal ini diinisiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Bantuan yang diberikan Pemprov Kepri berbentuk subsidi bunga 0 persen dari pinjaman modal. Dalam artian, masyarakat yang mengajukan pinjaman modal UMKM ke Bank Riau Kepri hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok semata. Sementara bunga dari pinjaman modal tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh Pemprov Kepri.

Sampai dengan bulan Mei tahun 2023 realisasi kredit subsidi bunga 0% untuk UMKM dari Pemprov Kepri, sudah terealisasi Rp17,38 miliar kepada 923 debitur. Penyaluran tersebut tersebar diseluruh kota dan kabupaten lingkup Provinsi Kepulauan Riau, dengan penyaluran terbesar terdapat pada kabupaten Natuna (Rp5,34 miliar), kota Tanjungpinang (Rp4,52 miliar), dan kota Batam (Rp1,89 miliar).

Tabel 3.4 - Realisasi Penyaluran Kredit Subsidi Bunga Pemerintah Provinsi Kepri s.d. Mei Tahun 2023 (Rp miliar)

Wilayah	Debitur	Plafon Penyaluran
Anambas	32	0,62
Batam	105	1,89
Bintan	47	0,92
Karimun	139	2,63
Lingga	82	1,47
Natuna	281	5,34
Tanjung Pinang	237	4,52
Grand Total	**923**	**17,38**

Sumber : OJK Kepri, 2023

Dukungan Kebijakan

Dalam upaya mengembangkan pelaku usaha UMKM yang mayoritas berusaha di sektor perdagangan, pemerintah provinsi Kepulauan Riau memberikan dukungan berupa program-program pelatihan hingga pendampingan usaha secara berkesinambungan. Pelatihan usaha yang diberikan dimulai dari cara untuk membangun usaha yang baik sampai pengelolaan modal usaha dengan bijak. Selanjutnya dari Pemerintah Provinsi Kepri juga melakukan pelatihan teknis sesuai bidang usaha. Pelaku usaha didorong untuk meningkatkan mutu produksi dalam menjawab tantangan kebutuhan termasuk pentingnya pengurusan aspek legal seperti sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan.

Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Koperasi dan UKM juga sudah meluncurkan program sertifikasi halal gratis, sehingga dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM sesuai mekanisme yang berlaku. Sehubungan dengan program pendampingan terhadap pengembangan UMKM, Pemprov Kepri menurunkan sembilan tenaga pendamping di rekrut khusus untuk membantu para pelaku UMKM dapat menjual produknya secara online/digital dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Pemerintah Kota Tanjungpinang juga turut mendorong kemajuan UMKM dengan pemberian bantuan dukungan peralatan usaha sesuai kebutuhan para pelaku UMKM dan IKM. Pemkot Tanjungpinang bekerja sama dengan perbankan untuk penyaluran dana CSR berupa peralatan usaha yang ditujukan langsung ke pelaku UMKM.

Selain dukungan untuk peralatan usaha pemerintah Kota Tanjungpinang juga mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pembekalan berbagai pelatihan kewirausahaan, fasilitas legalitas usaha UMKM dan IKM seperti sertifikasi halal, PIRT, serta program lainnya. Pemkot Tanjungpinang juga mendorong peningkatan iklim pariwisata dengan menciptakan event-event kreatif untuk mengundang wisatawan.

3.2.3 Analisis Pengembangan Sektor Perdagangan

Sebagai bagian dari sektor dominan dalam UMKM, sektor perdagangan perlu didukung dan dikembangkan secara sistematis dan kolaboratif. Pengembangan sektor perdagangan dapat dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi program UMKM antar instansi di Provinsi Kepulauan Riau. Program UMKM yang sinergis dapat diperoleh dengan adanya integrasi data UMKM seprovinsi Kepri, sehingga pemetaan dan dukungan kebijakan terhadap UMKM dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan UMKM yang terbagi dalam berbagai kategori (Mikro/Kecil/Menengah) dengan melihat sektor usahanya.

Selain dari dukungan terhadap UMKM, peningkatan iklim investasi perlu juga terus dioptimalisasikan oleh Pemerintah Daerah agar mengundang wisatawan dalam maupun mancanegara sehingga menciptakan *demand* bagi para pelaku usaha khususnya dibidang sektor perdagangan. Pemanfaatan geografis dari Provinsi Kepri yang strategis juga perlu untuk dimanfaatkan melalui ekspor barang ke negara-negara sekitar Kepri. Dukungan terhadap UMKM oleh pemerintah juga perlu untuk diarahkan kepada ekspor khususnya kepada negara-negara disekitar Kepri.

3.3 Rekomendasi Kebijakan Sektor Unggulan dan Potensial

3.3.1 Rekomendasi Kebijakan Sektor Unggulan

a. Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Provinsi Kepri, sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat digunakan untuk memperkecil Human Capital Gap dan Infrastructure Gap yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepulauan Riau. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
b. Untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah agar memperkuat *linking and matching* kebutuhan pekerja di Kepulauan Riau dengan lulusan perguruan tinggi, sekolah vokasi, serta balai pendidikan dan sertifikasi profesi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang intensif kepada siswa dan mahasiswa terkait dengan *skill set* yang dibutuhkan dunia kerja. Sehingga kedepannya masyarakat Kepulauan Riau mampu untuk bekerja dan memiliki daya saing yang tinggi di industri yang sesuai dengan kebutuhan industri Kepulauan Riau.
c. Untuk menekan biaya logistik, Pemerintah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman laut/shipping yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Selain itu, hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

3.3.2 Rekomendasi Kebijakan Sektor Potensial

a. Posisi strategis Provinsi Kepri yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia, seharusnya dapat menjadi momentum dalam mendorong ekspor khususnya disektor usaha perdagangan. Dengan berbagai fasilitas ekonomi yang dimiliki seperti *Free Trade Zone*, Provinsi Kepri perlu mengoptimalisasikan fasilitas FTZ dalam mendorong kemajuan sektor perdagangan.
b. Sampai saat ini Provinsi Kepri belum memiliki satu data UMKM yang terintegrasi di seluruh lingkup Kepri. Data yang akurat tentang sebaran pelaku usaha dapat mendorong percepatan kemajuan UMKM kepri melalui berbagai dukungan fiskal APBN dan APBD.
c. Selain mendorong peningkatan pelaku usaha, pemerintah Provinsi Kepri juga perlu menciptakan iklim pariwisata yang baik di Kepri sehingga jumlah wisatawan meningkat dan permintaan atas produk-produk umkm juga akan meningkat. Penciptaan iklim pariwisata yang baik memberikan *multiplier effect* bagi ekonomi regional.

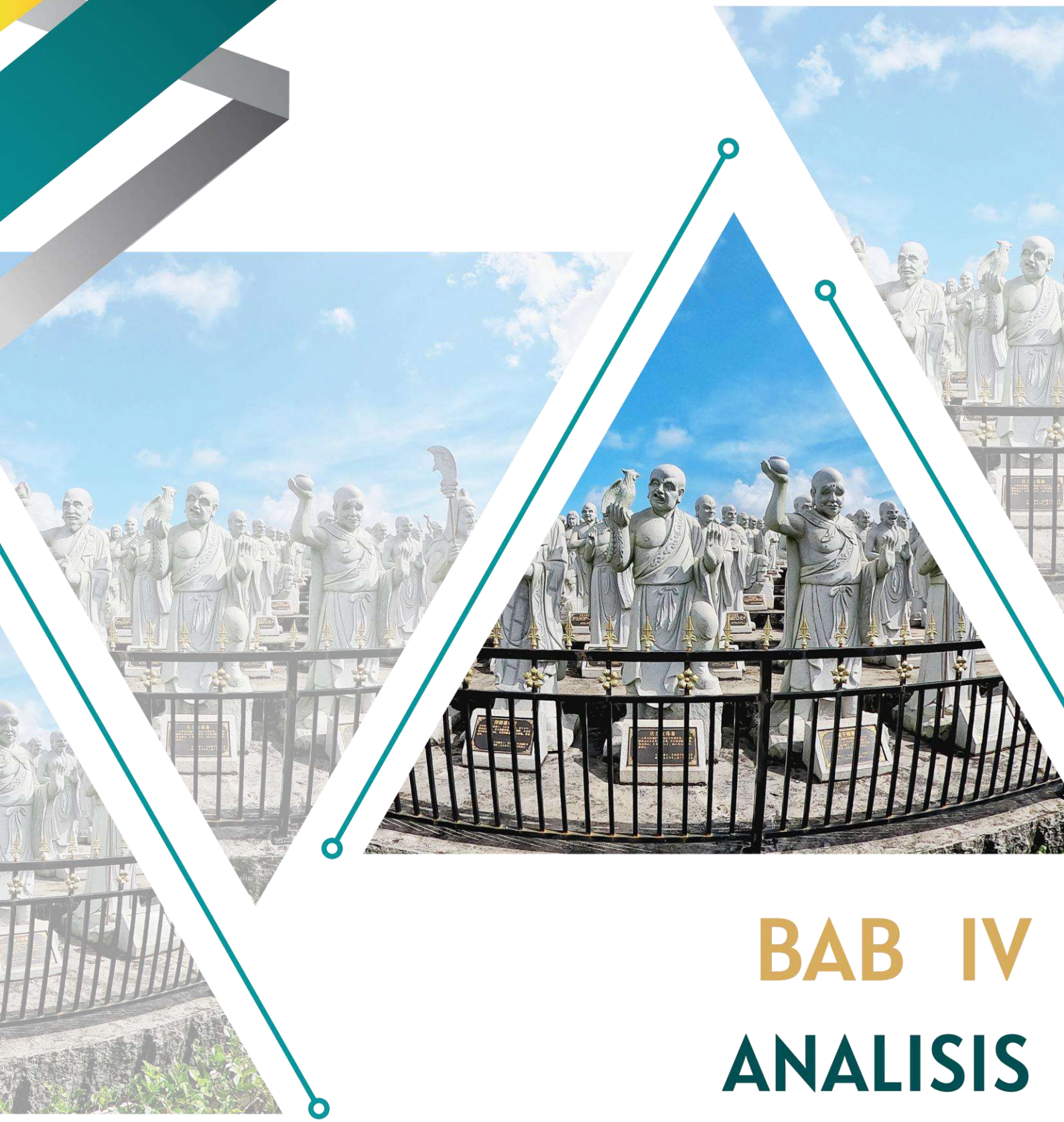

BAB IV
ANALISIS TEMATIK

Patung Seribu, Kota Tanjungpinang
Sumber: Dinas Pariwisata Prov.Kepri

BAB IV
ANALISIS TEMATIK

4.1 Analisis Kemandirian Fiskal Daerah

4.1.1 Perkembangan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Perkembangan PAD Pemprov Kepri selama 6 tahun terakhir (2017-2022) mengalami tren peningkatan walaupun terdapat anomali yang terjadi khususnya di tahun 2020 akibat pandemi *COVID-19*.

Grafik 4.1 - Perkembangan PAD Pemprov Kepri 2017 s.d. Tw II-2023 (Rp miliar)

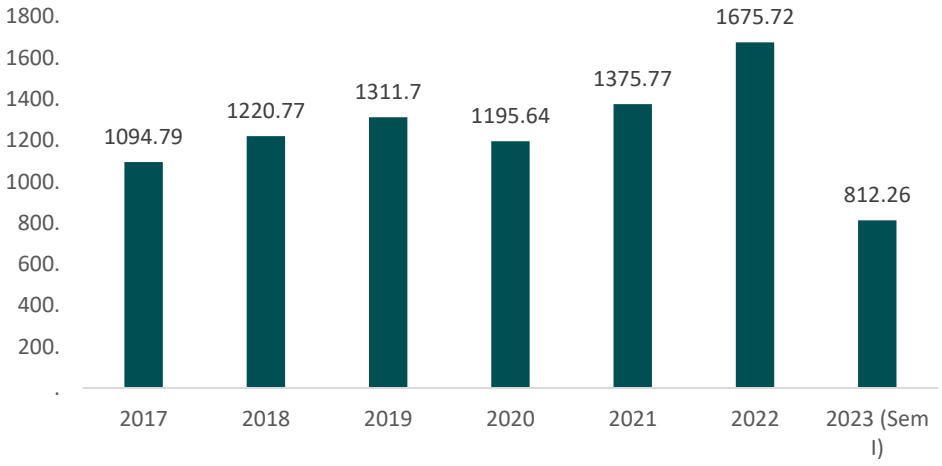

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Di tahun 2017, realisasi PAD Pemprov Kepri sebesar Rp1,09 triliun, dengan kontributor tertinggi dari Pajak Daerah sebesar Rp980,68 miliar (89,58%), selanjutnya adalah Lain-lain Pendapatan (LLPAD) yang Sah (9,85%). Pajak Daerah didukung oleh realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp365,84 miliar atau 37,30%, selanjutnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp286,99 miliar atau berkontribusi 29,26%, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp219,57 miliar atau 22,39%.

Selanjutnya kontributor terbesar PAD Pemprov Kepri di tahun 2017 adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp107,82 miliar (9,85%). Komponen yang mendorong LLPAD yang sah adalah Pendapatan BLUD sebesar Rp79,21 miliar (73,46%), selanjutnya Pendapatan Denda Pajak Rp15,20 miliar (14,10%), dan Penerimaan Jasa Giro Rp4,83 miliar (4,48%).

Pada tahun 2018 PAD Pemprov kepri mengalami pertumbuhan sebesar 11,51% atau bertambah Rp125,98 miliar dibanding tahun 2017, sehingga total PAD menjadi Rp1,22 triliun. Dengan kontributor tertinggi dari pemungutan Pajak Daerah sebesar 90,04% dari total PAD. Pajak Daerah di tahun 2018 juga telah tumbuh 12,08%. Fenomena menariknya di tahun 2018, penerimaan dari Retribusi Daerah meningkat 325,01%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh??? Peningkatan tersebut di dorong oleh pertumbuhan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 550,81%, pertumbuhan retribusi izin gangguan sebesar 2.338,4% (dari Rp12,45 juta menjadi Rp303,56 juta), pertumbuhan retribusi izin perikanan sebesar 21,49%, munculnya realisasi retribusi pengendalian lalu lintas sebesar Rp605,59 juta, dan peningkatan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar 146,76%.

Kontributor terbesar kedua masih dipegang oleh LLPAD yang sah, yaitu 8,60%. Walaupun LLPAD yang sah tetap menjadi kontributor terbesar kedua, pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar -2,62%. Selanjutnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan juga mengalami kontraksi sebesar -0,39%.

Grafik 4.2 - Perkembangan Komponen PAD Pemprov Kepri 2017 s.d. 2023 (Rp miliar)

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Tahun 2019, PAD Provinsi Kepri Kembali mengalami pertumbuhan sebesar 7,45%. Pajak daerah berkontribusi sebesar 90,36%, LLPAD yang sah berkontribusi sebesar 8,88%, retribusi mengalami penurunan realisasi sebesar -47,09% sehingga hanya mampu kontribusi terhadap PAD sebesar 0,55%, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah juga mengalami penurunan -8,23% sehingga hanya mampu berkontribusi terhadap PAD sebesar 0,22%. Disisi lain realisasi Pendapatan Pajak Daerah tetap mampu tumbuh 7,84% dan LLPAD yang sah tumbuh 10,90%.

Penurunan retribusi daerah disebabkan oleh penurunan jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar -55,70%, yang mana realisasinya penurunannya cukup signifikan yaitu Rp6,22 miliar. Selanjutnya adalah penurunan retribusi izin perikanan sebesar -11,86%, penurunan retribusi perpanjangan IMTA sebesar -57,03%, dan retribusi pengendalian lalu lintas yang tahun 2018 terealisasi sebesar Rp605,59 juta, sedangkan di tahun 2019 tidak terealisasi.

Pada tahun 2020, PAD Provinsi Kepri mengalami kontraksi sebesar -8,85%. hampir semua komponen PAD di pemprov Kepri mengalami kontraksi, kecuali LLPAD yang sah yang mengalami pertumbuhan sebesar 32,62%. Pertumbuhan LLPAD yang sah di dorong oleh pertumbuhan pendapatan BLUD sebesar 56,09% atau telah bertambah Rp44,50 miliar. Kontraksi terdalam dialami oleh pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (-27,33%), bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD mengalami kontraksi sebesar -27,33%. Pendapatan Pajak Daerah mengalami kontraksi sebesar -12,81% dengan penurunan terbesarnya berada pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kontraksi -38,18%, selanjutnya pajak air permukaan mengalami kontraksi sebesar -29,10%, Pajak Bahan Bakar Bermotor mengalami kontraksi sebesar -9,99%, dan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar -7,47%.

Penurunan Retribusi pada tahun 2020, sebesar -19,96%, penurunan ini di dorong oleh penurunan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang telah terkontraksi -66,91%. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mengalami peningkatan 59,18%, Retribusi Penyeberangan Air mengalami pertumbuhan 36,24%, tidak ada realisasi pada Retribusi Izin Trayek sedangkan tahun lalu terdapat retribusi tersebut, Retribusi Izin Perikanan mengalami peningkatan sebesar 79,49%, retribusi pengendalian lalu lintas mengalami realisasi tahun ini, yg dimana pada tahun lalu tidak ada realisasi retribusi jenis ini. Yang terakhir adalah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang mengalami peningkatan sebesar 221,35%.

Penurunan realisasi pada retribusi pemakaian kekayaan daerah sangat mempengaruhi hasil dari akumulasi pendapatan retribusi daerah sehingga peningkatan di 5 jenis retribusi belum mampu mendorong pertumbuhan positif pada total retribusi daerah.

Pada tahun 2021, kondisi perekonomian mengalami pemulihan dengan pertumbuhan PAD yang positif, yaitu 15,07%. Pertumbuhan PAD di dorong oleh pertumbuhan di semua komponen PAD, dengan pertumbuhan tertinggi berada pada pendapatan retribusi daerah sebesar 114,03%. Pertumbuhan positif retribusi di dorong oleh pertumbuhan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 1,29%, retribusi pelayanan kepelabuhan sebesar 287,65%. Pertumbuhan yang paling signifikan adalah retribusi pengendalian lalu lintas sebesar 887,82%. Selain hal tersebut terdapat beberapa retribusi yang terealisasi di tahun 2021, namun tidak terealisasi di tahun 2020, yaitu retribusi izin trayek (Rp1,51 miliar), retribusi izin gangguan (Rp556,55 juta), dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Rp57,31 juta).

Selanjutnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mengalami pertumbuhan sebesar 47,04% dengan realisasi bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang bertambah Rp971,20 juta. Selanjutnya Pajak Daerah juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan (15,27%) di dorong oleh pertumbuhan dihampir semua komponen perpajakan kecuali pajak rokok yang mengalami kontraksi -44,74%. komponen yang tumbuh, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (19,98%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (17,53%) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (16,49%), dan Pajak Air Permukaan (1,93%).

LLPAD yang sah mengalami pertumbuhan sebesar 9,69%, pertumbuhan pendapatan BLUD sebesar 19,49% dan pendapatan denda retribusi yang terealisasi di tahun 2021 sebesar 7,8 juta, sedangkan di tahun 2020 tidak terealisasi.

Pada tahun 2022, PAD Provinsi Kepri tumbuh lebih cepat, yaitu 21,79%, dengan kontributor tertinggi dari Pajak daerah sebesar 89,08%, LLPAD yang sah 10,36%, Retribusi daerah 0,41%, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,15%.

Pajak Daerah memberikan pertumbuhan tertinggi (25,32%) dibandingkan komponen PAD lainnya. Pajak Daerah di dorong oleh pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 50,39%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (31,10%), Pajak Rokok (22,23%), Pajak Kendaraan Bermotor (8,60%), dan Pajak Air Permukaan (7,28%).

LLPAD yang sah mengalami pertumbuhan sebesar 2,50% di dorong oleh pertumbuhan yang tinggi dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (823,61%), selain itu penerimaan jasa giro (24,65%), Pendapatan denda Pajak (12,13%), Pendapatan Denda Retribusi (91,74%), lain-lain PAD yang sah lainnya (11,68%). Sedangkan Pendapatan BLUD yang menjadi kontributor tertinggi dari LLPAD yang sah, mengalami kontraksi sebesar -1,33%.

Selain Pajak Daerah dan LLPAD yang sah, komponen PAD lainnya mengalami kontraksi, antara lain: Retribusi daerah (-44,14%) dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -17,96%. Penurunan retribusi daerah di dorong oleh tidak terealisasinya retribusi pengendalian lalu lintas yang pada tahun 2021 berkontribusi 55,51% terhadap total retribusi daerah. Sedangkan penurunan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan disebabkan oleh tidak terealisasinya bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Pada Semester I Tahun 2023, Total PAD Pemprov Kepri sebesar Rp812,26 miliar, PAD Semester I 2023 tumbuh sebesar 14,47% dibandingkan tahun 2022 dengan periode yang sama. Realisasi PAD semester I tahun 2023 melampaui realisasi PAD di 6 tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Apabila dilihat per komponennya, pada semester I tahun 2023 Pajak Daerah berkontribusi sebesar 92,37% terhadap total PAD di Pemprov Kepri, kontributor selanjutnya, yaitu LLPAD yang sah (7,16%) dan retribusi daerah (0,46%). Sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan belum terealisasi. Apabila dilihat pada periode sampai dengan triwulan II, PAD di Pemerintah Provinsi Kepri mengalami tren kenaikan di tiap tahunnya. Pertumbuhan PAD tertinggi berada pada tahun 2018 dengan peningkatan 33,01%, lalu tahun 2022 dengan pertumbuhan 22,79%.

Grafik 4.3 - Perkembangan PAD Pemerintah Provinsi Kepri dan Komponennya Periode s.d Tw II, Tahun 2017 – 2023 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Secara akumulasi dari tahun 2017 sampai dengan semester I Tahun 2023, Pajak Daerah menjadi kontributor pertama dari PAD Pemprov Kepri dengan porsi 89,02%, lalu disusul oleh LLPAD yang sah dengan porsi 10,19%, Retribusi Daerah 0,60%, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,19%.

Grafik 4.4 - Kontribusi Komponen PAD Pemerintah Provinsi Kepri 2017 s.d. Tw II-2023

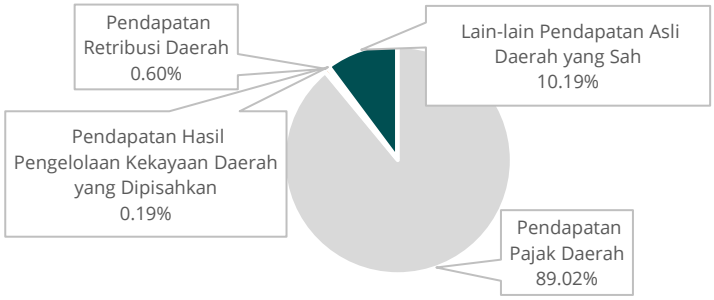

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Perkembangan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Konsolidasi Pemerintah Kota dan Kabupaten Kepulauan Riau (2017-2023)

Perkembangan PAD konsolidasi kota dan kabupaten selama tahun 2017 s.d tahun 2022 mengalami tren pertumbuhan walaupun terdapat kontraksi disebabkan pandemi *COVID-19* pada tahun 2020. Pada tahun 2017 PAD Konsolidasi Kab/Kota Kepri terealisasi sebesar Rp1,76 triliun. Dengan kontribusi dari Pajak Daerah (71,68%), Lain-lain pendapatan yang sah (19,26%), Retribusi Daerah (6,61%), dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (2,46%). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dijelaskan lebih rinci di sub bab selanjutnya. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah didukung oleh pertumbuhan terbesar dari Pendapatan BLUD (57,90%), Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), dan Pendapatan Bunga (10,26%). sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruhnya didukung oleh realisasi dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Grafik 4.5 - Perkembangan PAD Konsolidasi Kota/Kabupaten Kepri Tahun 2017 s.d. Tw II-2023 (Rp miliar)

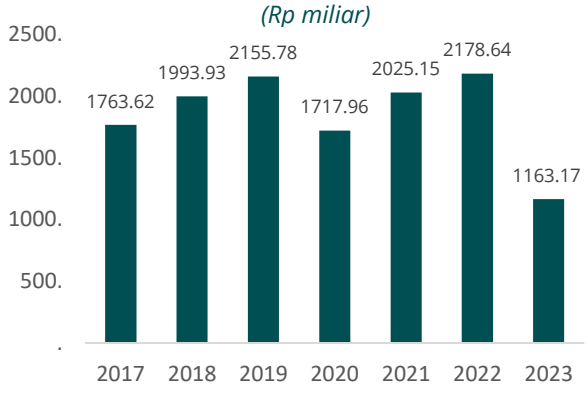

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Di tahun 2018, PAD Provinsi Kepri mengalami pertumbuhan sebesar 13,06%. Pertumbuhan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada Pajak Daerah (15,43%), LLPAD yang sah (10,09%), dan retribusi daerah (1,34%), sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kontraksi (-1,18%). LLPAD yang sah di dorong oleh pertumbuhan Pendapatan BPJS (37,75%), hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah (34,21%), dan tuntutan ganti kerugian daerah (16,14%). Selain itu, terdapat realisasi LLPAD yang sah yang tidak terdapat di tahun sebelumnya yaitu pendapatan penyelenggaraan sekolah dan diklat (Rp46,09 miliar), pendapatan hasil eksekusi dan jaminan (Rp589,91 juta), dan hasil penjualan aset lainnya (Rp126,37 juta). Terkontraksinya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

disebabkan menurunya pendapatan dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar -1,18%.

Pada tahun 2019, PAD konsolidasi pemerintah kota kabupaten Kepri mengalami peningkatan 8,12%. Peningkatan tersebut di dorong oleh Pajak Daerah yang merupakan kontributor PAD paling dominan (76,40%) dan mengalami pertumbuhan 12,88%. Selain Pajak Daerah, retribusi daerah juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,06%. LLPAD yang sah mengalami kontraksi sebesar -6,73%, sementara itu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu -16,18%.

Terkontraksinya LLPAD yang sah disebabkan adanya penurunan sebesar 40,47% pada kontributor terbesar, yaitu pendapatan BLUD, serta terdapat beberapa kontributor yang tidak terealisasi di tahun 2019, yaitu pendapatan penyelenggaraan sekolah dan diklat, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, serta komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah. Selain itu, Terdapat juga kontraksi pada kontributor lainnya seperti Pendapatan BPJS (-9,08%), Lain-lain PAD yang sah lainnya (-22,67%). Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terkontraksi disebabkan oleh turunnya pendapatan dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (*deviden*) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (-37,24%).

Grafik 4.6 - Perkembangan PAD Konsolidasi Kab/Kota Kepri Tahun 2017 s.d. 2022 (Rp miliar)

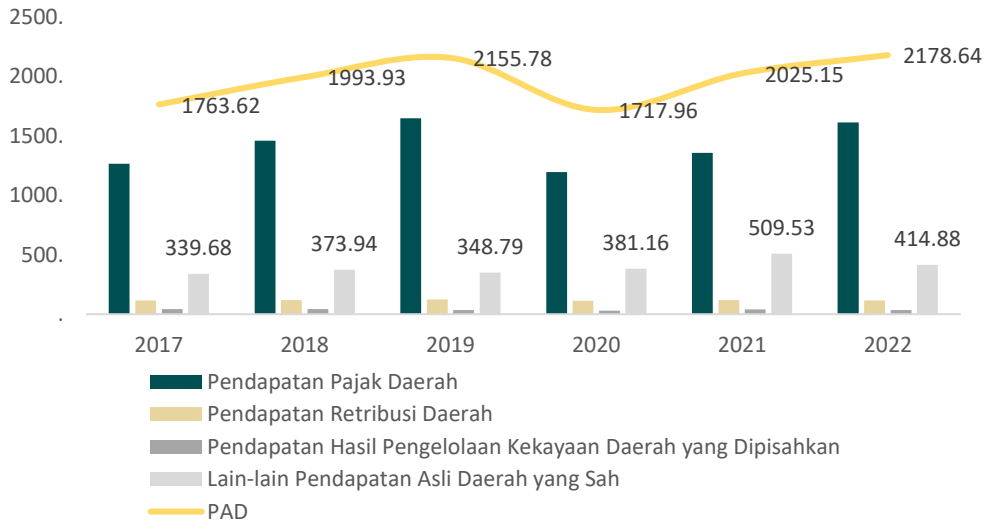

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Tahun 2020, akibat pandemi *COVID-19* PAD Konsolidasi mengalami kontraksi yang cukup dalam (-20,31%). Hampir seluruh komponen PAD Konsolidasi mengalami kontraksi kecuali LLPAD yang sah tetap tumbuh sebesar 9,28%. LLPAD yang sah di dorong oleh pertumbuhan pendapatan BLUD (82,68%) sebagai kontributor LLPAD yang sah terbesar, Pendapatan dari pengembalian (39,40%), LLPAD yang sah lainnya (27,47%), dan tuntutan ganti kerugian daerah (177,13%).

Pada tahun 2021, kondisi perekonomian mengalami pemulihan yang berdampak terhadap PAD konsolidasi sehingga mampu tumbuh 17,88%. PAD didukung oleh pertumbuhan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (38,92%), LLPAD yang sah (33,68%), Pajak Daerah (13,64%), dan Retribusi Daerah (3,81%). Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didukung oleh pertumbuhan pada Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (38,92%). LLPAD yang sah didukung oleh pertumbuhan pada kontributor terbesar (80,58%) yaitu pendapatan BLUD yang telah tumbuh 59,24%.

Pada tahun 2022, realisasi PAD mencapai Rp2,18 triliun. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Realisasi PAD tersebut tumbuh 7,58%. Walaupun PAD tumbuh, namun hanya pendapatan Pajak daerah yang tumbuh sebesar 18,81%, sementara komponen PAD lainnya mengalami kontraksi, yaitu LLPAD yang sah (-18,58%), pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (-16,47%), dan retribusi daerah (-0,29%). LLPAD yang sah mengalami kontraksi disebabkan oleh penurunan pada pendapatan BLUD sebagai komponen paling dominan (80,19%) telah terkontraksi sebesar -18,97%, selain itu terdapat kontraksi pada pendapatan BPJS (-35,83%), LLPAD yang sah lainnya (-35,83%), serta tidak terealisasinya pendapatan denda pemanfaatan aset daerah.

Grafik 4.7 - Perkembangan PAD Konsolidasi Kab/Kota di Provinsi Kepri Periode Tw II, Tahun 2017- 2023 (Rp miliar)

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, PAD telah terealisasi sebesar Rp11,63 triliun dengan kontribusi dari Pajak Daerah (77,16%), LLPAD yang sah (13,93%), Pendapatan Retribusi Daerah (6,12%), dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (2,80%). LLPAD yang sah di dorong oleh kontribusi dari pendapatan BLUD (79,48%), pendapatan denda pajak (5,92%), dan hasil penjualan aset lainnya (2,85%). Realisasi PAD di semester I 2023 sudah melampaui realisasi di tahun-tahun sebelumnya pada periode semester I. Jika dibandingkan dengan semester I tahun 2022, PAD konsolidasi semester I 2023 mengalami pertumbuhan 29,38%.

Grafik 4.8 - Kontribusi Komponen PAD Konsolidasi Kota/Kabupaten Kepri Tahun 2017 s.d. Tw II-2023

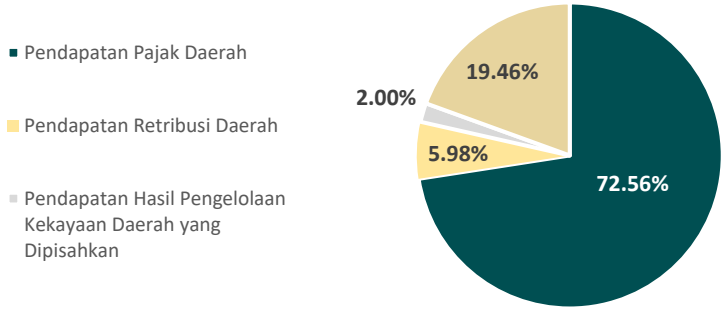

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Secara akumulasi dari tahun 2017 sampai dengan triwulan II tahun 2023, kontributor terbesar PAD Konsolidasi Kabupaten/Kota adalah Pajak Daerah (72,56%), lalu LLPAD yang sah (19,46%), Retribusi Daerah (5,98%), dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (2,00%).

Grafik 4.9 - Kontributor PAD Konsolidasi Kota/Kabupaten Kepri per Tw II Tahun 2017-2023

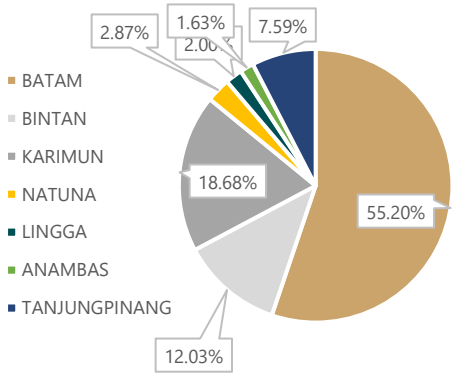

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Dllihat dari kontribusi per kota dan kabupaten, kontributor Konsolidasi PAD Pemda Kota/Kabupaten Kepri terbesar adalah kota Batam (55,20%), diikuti Kabupaten Karimun (18,68%), dan Kabupaten Bintan (12,03%). Kontributor terendah dari PAD Konsolidasi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (1,63%), Kabupaten Lingga (2,00%), dan Kabupaten Natuna (2,87%).

4.1.2 Perkembangan Realisasi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi 2017 s.d. 2023

Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2017-2023

Perkembangan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2017-2023

Pajak Daerah Pemprov Kepri mengalami perkembangan tren yang meningkat cukup baik dari tahun 2017 s.d 2022. Walaupun terdapat kontraksi karena pandemi Covid di Tahun 2020, di tahun 2021-2022 tren Pajak Daerah terus konsisten meningkat.

Grafik 4.10 - Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2017 s.d. Tw II-2023

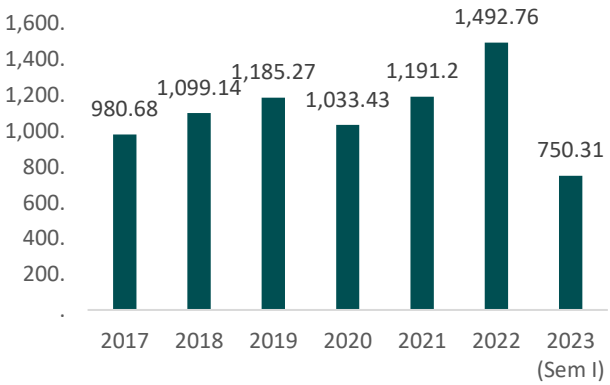

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Pada tahun 2017, realisasi Pajak Daerah Pemprov Kepri sebesar Rp980,68 miliar dengan kontributor, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (37,30%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (29,26%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (22,39%), Pajak Rokok (10,78%), dan Pajak Air Permukaan (0,26%).

Pada Tahun 2018, realisasi pajak daerah sebesar Rp1,1 triliun dan mengalami pertumbuhan 12,08% dibandingkan tahun 2017. Kontributornya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (38,39%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (28,70%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (23,30%), Pajak Rokok (9,37%), dan Pajak Air Permukaan (0,23%). Jenis Pajak yang mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2017, yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(16,65%), Pajak Kendaraan Motor (15,35%), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (9,92%). Sedangkan Pajak Air Permukaan mengalami kontraksi -1,43% dan Pajak Rokok terkontraksi -2,51%.

Pada tahun 2019, realisasi pajak daerah sebesar Rp1,19 triliun dan tetap tumbuh 7,84% dibandingkan tahun 2018. Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kontraksi sebesar -3,05%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan (26,73%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tumbuh 11,48%, Pajak Air permukaan mengalami kontraksi sebesar -51,23%, dan Pajak Rokok mengalami kontraksi -4,25%.

Di tahun 2020, sejalan dengan peristiwa pandemi *COVID-19*, hal ini berdampak terhadap penerimaan Pajak Daerah. Realisasi Pajak Daerah Pemprov Kepri pada tahun 2020, sebesar Rp1,03 triliun atau terkontraksi sebesar -12,81%, dibandingkan tahun 2019. Kontraksi tersebut disebabkan oleh terkontraksinya hampir semua jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (-7,47%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (-38,18%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (-9,99%), dan Pajak Air Permukaan (-29,10%). Sedangkan satu-satunya jenis pajak yang mengalami pertumbuhan adalah Pajak Rokok (38,64%).

Grafik 4.11 - Perkembangan Pajak Daerah (Per Jenis) Tahun 2017 – Tw II Tahun 2023

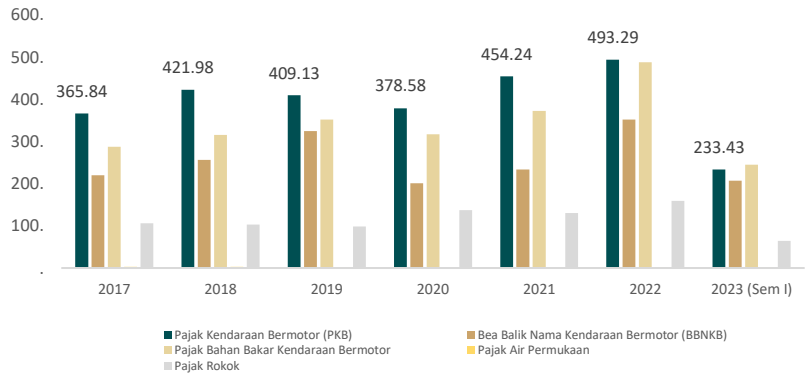

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Di tahun 2021, perekonomian yang mulai pulih berimplikasi terhadap peningkatan pajak daerah pemprov Kepri. Realisasi pajak daerah sebesar Rp1,19 triliun atau tumbuh positif sebesar 15,27% dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan tersebut di dorong oleh pertumbuhan signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor (19,98%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (17,53%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (16,49%), dan Pajak Air Permukaan (1,93%). Sementara itu, Pajak Rokok mengalami kontraksi sebesar -4,74%.

Di tahun 2022, realisasi Pajak Daerah sebesar Rp1,49 triliun atau mencapai angka terbesar di 5 tahun sebelumnya. Perekonomian yang semakin membaik berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah yang mengalami pertumbuhan signifikan, yaitu 25,32%. Pertumbuhan tersebut di dorong oleh peningkatan di semua jenis pajak daerah, dengan pertumbuhan jenis pajak daerah terbesar ada di Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (50,39%) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (31,10%).

Sehubungan dengan perkembangan pajak daerah s.d triwulan II tahun 2023, realisasi Pajak daerah dari Pemprov Kepri sebesar Rp750,31 juta dengan kontributor terbesar Pajak Kendaraan Bermotor (31,11%), lalu disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (32,64%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (27,58%), Pajak Rokok (8,60%), dan Pajak Air Permukaan (0,06%).

Jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama, pajak daerah mengalami pertumbuhan 16,14%. Pada periode s.d triwulan II, sejak Tahun 2017 sampai dengan 2023 pajak daerah mengalami tren pertumbuhan yang meningkat walaupun terdapat kontraksi di tahun 2020, tren di tahun 2021 sampai dengan 2023 tetap tumbuh positif dengan signifikan.

Grafik 4.12 - Perkembangan Pajak Daerah s.d. Tw II Tahun 2017 – 2023

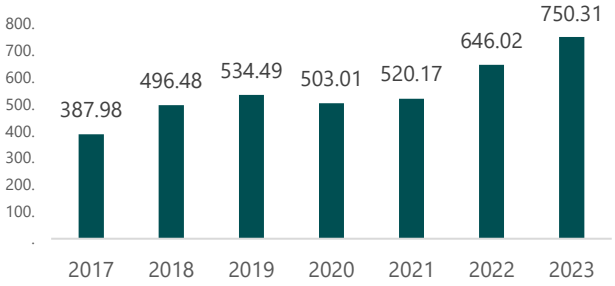

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Secara akumulatif dari tahun 2017 sampai dengan semester II Tahun 2023, kontributor pajak daerah terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (36,13%), lalu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (30,15%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (22,72%), Pajak Rokok (10,51%), dan Pajak Air Permukaan (0,13%).

Grafik 4.13 - Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017 s.d Tw Tahun 2023

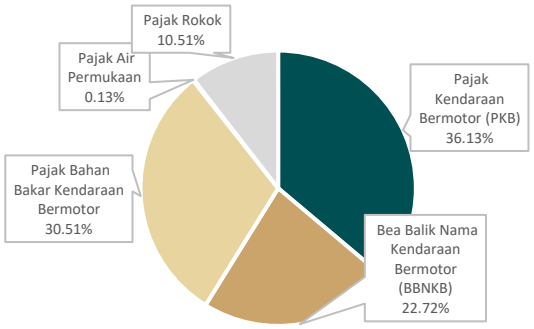

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Perkembangan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2017-2023

Penerimaan daerah dari retribusi mengalami tren yang fluktuatif. Dengan capaian realisasi tertinggi di tahun 2018 (Rp 13,54 miliar) dan terendah di tahun 2017 (Rp3,19 miliar). Pertumbuhan retribusi daerah tertinggi berada pada tahun 2018 (325,01%).

Pada tahun 2017, komposisi retribusi tertinggi berada pada jenis retribusi pemakaian daerah (53,81%), lalu izin perikanan (24,09%), dan retribusi penyeberangan air (14,60%). Sedangkan retribusi dengan realisasi terendah adalah retribusi izin trayek dengan realisasi Rp12,45 juta atau dengan porsi 0,39% terhadap total realisasi pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, realisasi retribusi Pemprov Kepri mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu 325%, atau telah terealisasi sebesar Rp13,54 miliar dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp3,19 miliar. Pertumbuhan tersebut di dorong oleh pertumbuhan dari retribusi izin trayek yang meningkat signifikan menjadi Rp303,56 juta dari sebelumnya Rp12,45 juta (tumbuh 2338%). Selain itu terdapat juga retribusi yang mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu retribusi

pemakaian kekayaan daerah (550,81%) dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (146,76%).

Pada tahun 2019, retribusi daerah mengalami kontraksi -47,09% dengan realisasi sebesar Rp7,16 miliar. Kontraksi tersebut di dorong oleh penurunan beberapa jenis retribusi, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah (-55,70%), retribusi izin perikanan (-11,86%), retribusi perpanjangan IMTA (57,03%), dan tidak terealisasinya retribusi pengendalian lalu lintas.

Grafik 4.14 - Perkembangan Retribusi Daerah Tahun 2017 – Tw II Tahun 2023
(Rp Miliar)

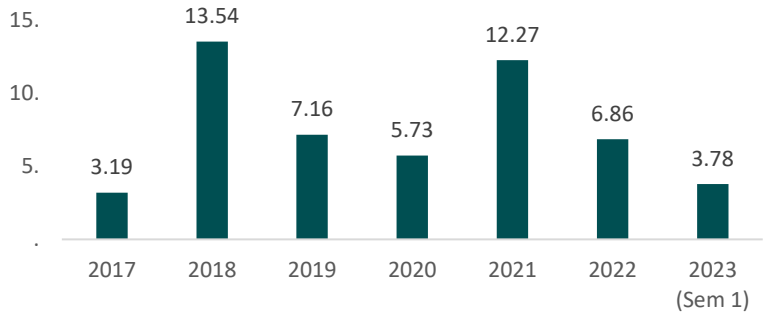

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Pada tahun 2020, sejalan dengan kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi *COVID-19*, retribusi daerah kembali mengalami kontraksi sebesar -19,96%. Kontraksi tersebut disumbang oleh penurunan realisasi pada retribusi pemakaian kekayaan daerah (-66,91%) dan izin trayek yang tidak terealisasi. Walaupun yang mengalami penurunan hanya dua jenis retribusi, namun pertumbuhan positif retribusi lainnya belum mampu untuk mendorong realisasi lebih tinggi lagi.

Pada tahun 2021, kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih mendorong peningkatan retribusi daerah sehingga berhasil tumbuh 114,03%. Pertumbuhan tersebut di dorong oleh peningkatan realisasi pada retribusi pemakaian kekayaan negara (1,295), retribusi pelayanan kepelabuhan (287,65%), retribusi pengendalian lalu lintas (887,82%).

Grafik 4.15 - Perkembangan Retribusi Daerah (Per jenis)
Tahun 2017s.d. Tw II - 2023

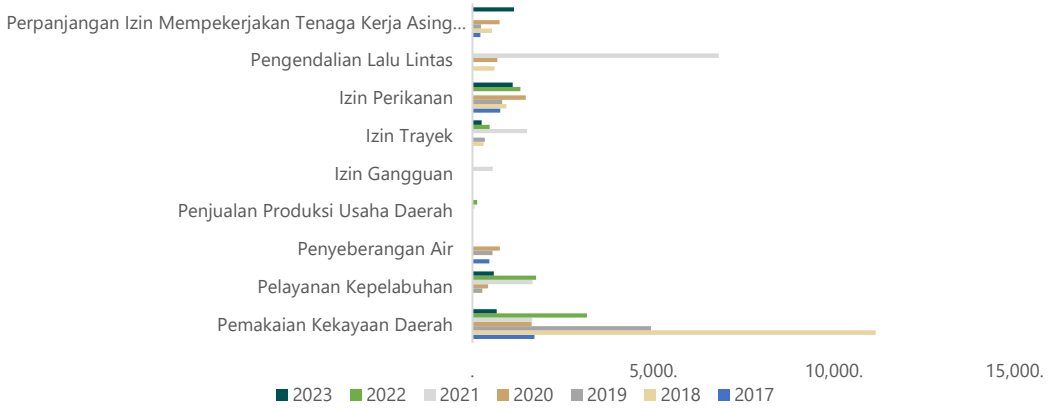

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Pada tahun 2022, ditengah kondisi perekonomian yang semakin membaik, namun retribusi daerah mengalami penurunan realisasi mencapai -44,14%. Penurunan realisasi tersebut disebabkan oleh retribusi daerah yang tidak terealisasi serta penurunan retribusi izin trayek (-

68,46). Tidak terealisasinya retribusi pengendalian lalu lintas menyebabkan kontraksi yang dalam pada tahun 2022, meningkat pada tahun 2021 retribusi tersebut berhasil berkontribusi 55% terhadap total retribusi daerah.

Grafik 4.16 - Retribusi Daerah Tahun 2017 – 2023 (periode Triwulan II)

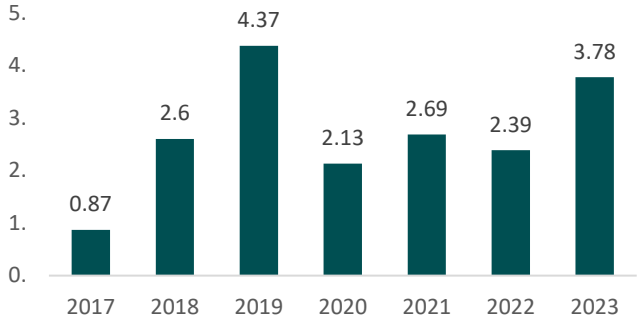

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Sampai dengan semester I tahun 2023, retribusi daerah telah terealisasi sebesar Rp3,78 miliar dengan kontribusi terbesar dari retribusi perpanjangan IMTA (30,45%), retribusi izin perikanan (29,49%), dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (17,67%). Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian semester I di tahun 2023 merupakan yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir (sejak tahun 2020). Sampai dengan semester I tahun 2023, retribusi daerah telah tumbuh 58,34% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.

Secara kumulatif dari tahun 2017 sampai dengan triwulan II 2023, retribusi daerah di provinsi kepri ditopang secara dominan oleh retribusi pemakaian kekayaan daerah (47,47%), retribusi pengendalian lalu lintas (15,44%), dan retribusi izin perikanan (12,25%). Sedangkan retribusi yang paling sedikit memberikan kontribusi adalah retribusi penjualan produksi usaha daerah (0,38%).

Grafik 4.17 - Kontribusi Retribusi Tahun 2017 Sampai Dengan Tw II-2023

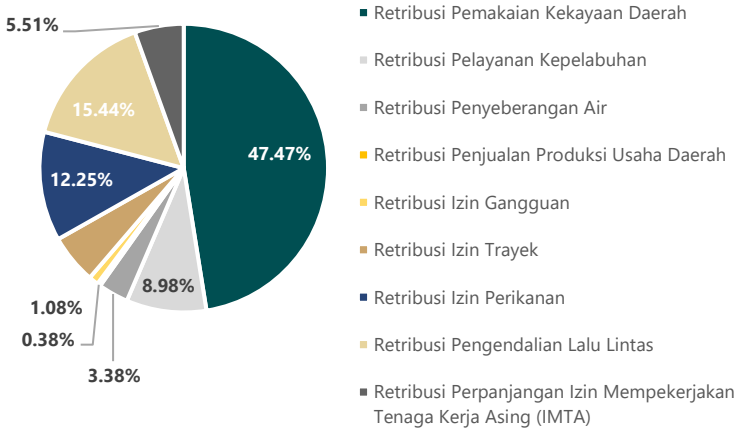

Sumber: BPKAD Provinsi Kepri, 2023

Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Konsolidasi Pemerintah Kota/Kabupaten Kepri Tahun 2017-2023

Perkembangan Pajak Daerah Konsolidasi Pemerintah Kota/Kabupaten Kepri Tahun 2017-2023

Pajak Daerah Konsolidasi Pemda Kab/Kota mengalami tren pertumbuhan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, walaupun mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020, tren Pajak daerah kembali mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, namun realisasi tahun 2022 belum dapat mencapai realisasi pajak daerah di tahun 2019 (sebelum pandemic *COVID-19*).

Pada tahun 2017, Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp1,26 triliun atau berkontribusi sebesar 71,68% terhadap PAD Konsolidasi Kab/Kota Kepri. Kontributor terbesar pajak daerah di tahun tersebut adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) (22,82%), selanjutnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 19,60%, serta Pajak Penerangan Jalan (16,54%). Kontributor terendah adalah Pajak Sarang Burung Walet yang terealisasi sebesar Rp98,60 juta atau berkontribusi 0,008% terhadap pajak daerah.

Grafik 4.18 - Perkembangan Pajak Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017 s.d. Tw II Tahun 2023 (Rp miliar)

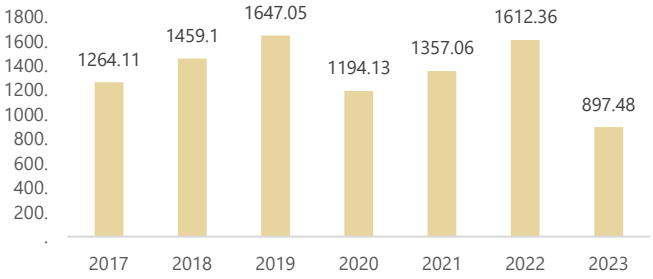

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Pada tahun 2018, Pajak daerah mengalami pertumbuhan 1,34%, pertumbuhan ini di dorong oleh pertumbuhan tertinggi dari Pajak Parkir yang berhasil tumbuh 50,86%, BPHTB (39,94%), dan Pajak Reklame (35,23%). Sedangkan terdapat beberapa jenis pajak daerah yang terkontraksi yaitu Pajak MBLB (-10,74%) dan Pajak Air Tanah (-5,50%). Kontributor pajak daerah terbesar pada tahun 2018 adalah BPHTB (23,76%), Pajak MBLB (17,65%), Pajak Hotel (15,35%), dan Pajak Penerangan Jalan (15,22%).

Pada tahun 2019, pajak daerah mengalami pertumbuhan sebesar 12,88% dan telah berkontribusi sebesar 76,40% terhadap PAD Konsolidasi Kab/Kota di Provinsi Kepri. Pertumbuhan tersebut di dorong oleh pertumbuhan pada pajak restoran (32,16%), Pajak Hiburan (31,71%), Pajak Penerangan Jalan (19,70%), dan BPHTB (17,17%). Sementara terdapat kontraksi pada 3 (tiga) jenis pajak daerah, yaitu: Pajak Parkir (-13,82%), Pajak Air Tanah (-0,94%), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (-0,03%).

Pada tahun 2020, Pajak daerah terealisasi sebesar Rp1,19 triliun, realisasi tersebut terkontraksi cukup dalam yaitu -27,50%. Walaupun pajak daerah terkontraksi paling dalam dibandingkan dengan komponen PAD lainnya, Pajak Daerah tetap berkontribusi paling dominan terhadap PAD tahun 2020, yaitu 69,51%. Jenis pajak yang mengalami kontraksi terdalam adalah Pajak hotel (-67,44%), Pajak hiburan (-62,67%), dan Pajak Parkir (-35,96%).

Pada tahun 2021, pajak daerah mengalami pertumbuhan 13,64%. Dengan pertumbuhan tertinggi dari jenis pajak MBLB (45,77%), PBB Pedesaan dan Perkotaan (28,51%), dan BPHTB (13,38%). Sementara itu terdapat beberapa jenis pajak yang belum pulih akibat dari kondisi pandemic covid, sehingga masih terkontraksi, antara lain: pajak hiburan (-35,65%), pajak hotel (-25,59%), pajak air tanah (-10,24%), pajak restoran (7,24%), dan Pajak parkir (-6,36%).

Grafik 4.19 - Perkembangan Pajak Daerah Konsolidasi Kab/Kota (Per jenis Pajak Daerah) Tahun 2017 – Tw II Tahun 2023

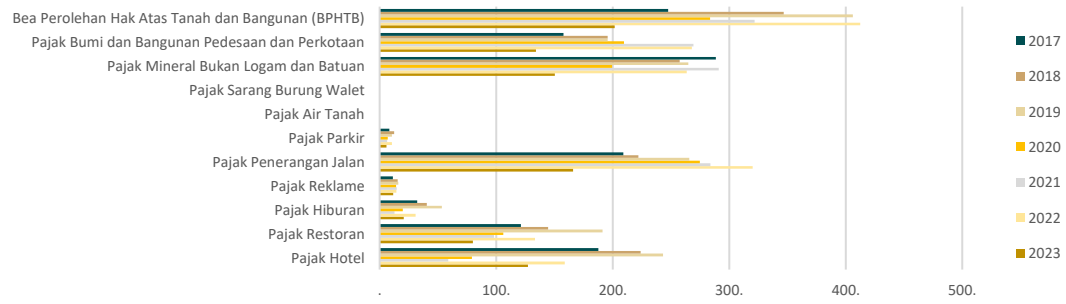

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Prov. Kepri, 2023

Pada tahun 2022, kondisi pendapatan perpajakan semakin membaik dengan pertumbuhan sebesar 18,81%. Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah pajak hotel (169,59%), pajak hiburan (140,20%), pajak parkir (64,87%), dan pajak restoran (35,83%). Pertumbuhan yang

signifikan dari jenis-jenis pajak tersebut menandakan bahwa kondisi ekonomi di sektor usaha terkait mengalami pemulihan pasca pandemi *COVID-19*.

Grafik 4.20 - Perkembangan Pajak Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tw II Tahun 2017- 2023 (Rp miliar)

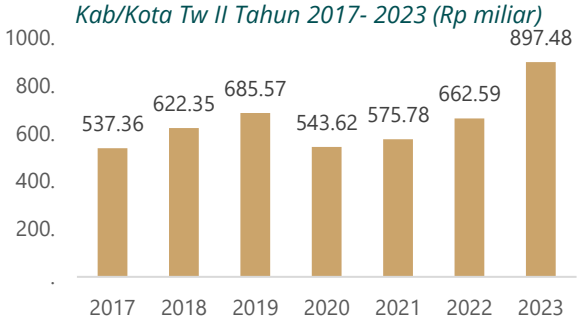

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Grafik 4.21- Kontribusi Pajak Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017 s.d. Tw II Tahun 2023

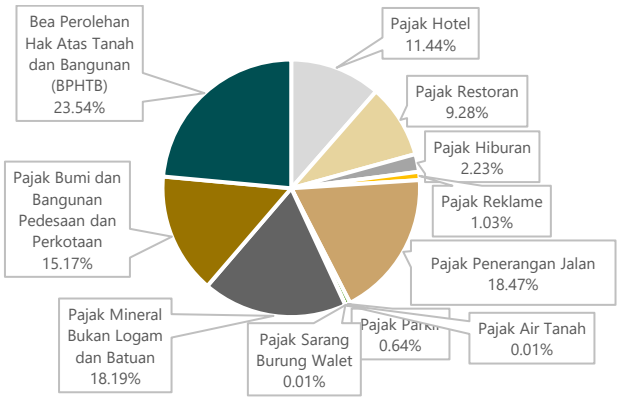

Sumber: BPKAD Pemerintah kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Pada semester I tahun 2023, pajak daerah telah terealisasi sebesar Rp897,47 miliar. Kontributor terbesar masih dari BPHTB (22,46%) yang terealisasi sebesar RP205,59 miliar, Pajak Penerangan Jalan (18,50%) telah terealisasi Rp166,04 miliar, dan Pajak MBLB (16,76%) yang telah terealisasi sebesar Rp150,40 miliar. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017-2022 pada semester I, capaian di tahun 2023 merupakan yang tertinggi. Realisasi pajak daerah s.d semester I 2023, telah tumbuh 35,45% dibandingkan tahun 2022 di periode yang sama.

Secara akumulatif dari tahun 2018 sampai dengan triwulan II tahun 2023, kontributor terbesar dari pajak daerah adalah BPHTB (23,54%), Pajak Penerangan Jalan (18,47%), Pajak MBLB (18,19%), dan PBB Pedesaan dan Perkotaan (15,17%). Sementara kontributor terendah adalah Pajak Reklame (1,03%) dan Pajak Sarang Burung Walet (0,01%).

Perkembangan Retribusi Daerah Konsolidasi Pemerintah Kota/Kabupaten Kepri Tahun 2017-2023

Sejalan dengan kondisi pajak daerah konsolidasi, pada retribusi daerah konsolidasi kab/kota juga mengalami tren kenaikan dari tahun 2017-2019, namun terjadi kontraksi di tahun 2020 (-9,02%). Walaupun terjadi pemulihan di tahun 2021, realisasi pada retribusi belum bisa menyamakan realisasi pada masa pra *COVID* (2019). Bahkan pada tahun 2022 terjadi kontraksi -0,29%.

Pada tahun 2017, realisasi retribusi daerah konsolidasi mencapai Rp116,52 miliar. Kontributor terbesar berasal dari realisasi retribusi perpanjangan IMTA sebesar Rp36,83 miliar (31,61%), diikuti oleh retribusi pelayan persampahan/kebersihan sebesar Rp29,91 miliar (25,67%), dan retribusi IMB sebesar Rp19,51 miliar (16,74%).

Pada tahun 2018, retribusi daerah konsolidasi terealisasi sebesar Rp118,08

Grafik 4.22 - Perkembangan Retribusi Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017- Tw II Tahun 2023 (Rp miliar)

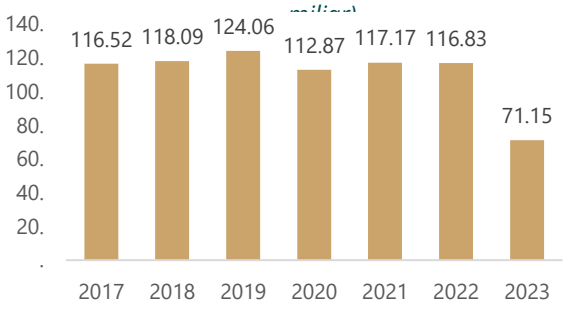

Sumber: BPKAD Pemerintah kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

miliar atau mengalami pertumbuhan 1,34% dari tahun sebelumnya. Kontributor terbesar berasal dari Retribusi IMB yang terealisasi Rp49,05 miliar (41,54%), lalu diikuti Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp32,53 miliar (27,55%), dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp8,95 miliar (7,58%). Retribusi yang tumbuh tertinggi adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga (420,18%), retribusi IMB (151,47%), dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (82,50%).

Pada tahun 2019, retribusi daerah konsolidasi terealisasi sebesar Rp 124,06 miliar. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 5,06% atau lebih tinggi dari pertumbuhan di tahun 2018. Kontributor terbesar berasal dari retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terealisasi Rp35,37 miliar (28,51%). Lalu diikuti retribusi IMB terealisasi Rp30,72 miliar (24,76%), dan retribusi pelayanan kepelabuhan terealisasi Rp9,50 miliar (7,66%). Retribusi yang tumbuh tinggi adalah retribusi terminal terealisasi Rp162,63 juta (17.970%) retribusi perpanjangan izin IMTA Rp16,61 miliar (567,29%), dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol terealisasi Rp1,01 miliar (527,55%).

Pada tahun 2020, retribusi daerah konsolidasi terealisasi sebesar Rp112,87 miliar atau terkontraksi sebesar -9,02%. Kontraksi tersebut disebabkan (andil) oleh kontraksi pada retribusi IMB (-11,27%), retribusi tempat khusus parkir (-5,51%), dan retribusi pelayanan kepelabuhan (-5,29%).

Pada tahun 2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*, retribusi daerah konsolidasi mengalami pertumbuhan 3,81% atau terealisasi sebesar Rp117,17 miliar. Pertumbuhan tersebut di dorong oleh pertumbuhan retribusi IMB (10,99%), retribusi pelayanan Kesehatan (1,62%), dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (0,88%).

Pada tahun 2022, retribusi konsolidasi mengalami kontraksi sebesar -0,29% atau terealisasi Rp116,83 miliar. Kontraksi tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi dari retribusi perpanjangan IMTA (-7,79%), Retribusi IMB (-5,95%), dan retribusi pelayanan tera/tera ulang (-0,018%).

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, retribusi konsolidasi telah terealisasi sebesar Rp71,15 miliar. Kontributor terbesar adalah retribusi IMB (30,01%), retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (26,91%), dan retribusi perpanjangan IMTA (23,36%).

Grafik 4.23 - Kontribusi Retribusi Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017- Q2 2023 (dalam Rp miliar)

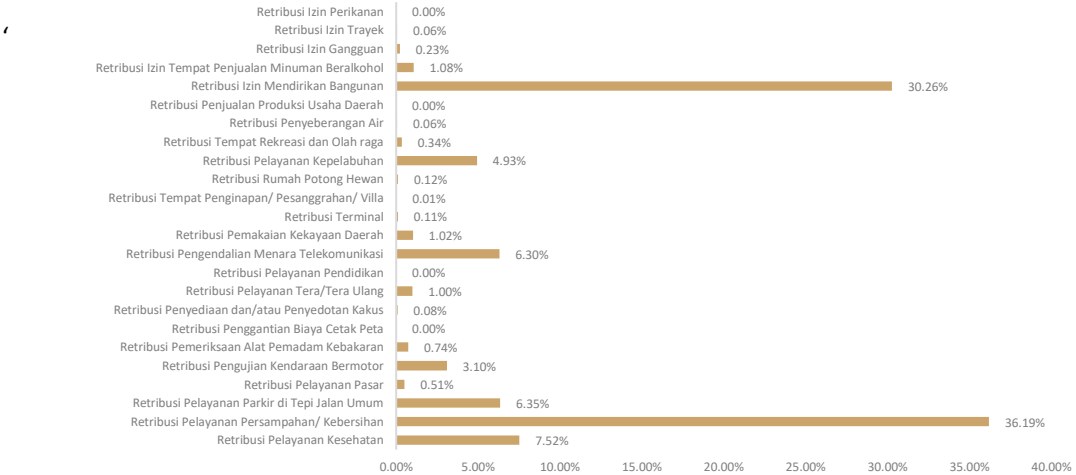

Sumber : BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Dari tahun 2017 sampai dengan triwulan 2 tahun 2023, terdapat dua jenis retribusi yang berkontribusi secara dominan di Pemerintah Kab/Kota Konsolidasi Kepri, diantaranya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (36,19%) dan retribusi IMB (30,26%). Selain itu, terdapat juga beberapa retribusi yang juga berkontribusi cukup tinggi, yaitu retribusi pelayanan kesehatan (7,52%), retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (6,35%), retribusi pengendalian Menara telekomunikasi (6,30%), dan retribusi pelayanan kepelabuhan (4,93%).

Grafik 4.24 - Kontributor Retribusi Daerah Konsolidasi Kab/Kota Tahun 2017- Q2 2023 (%)

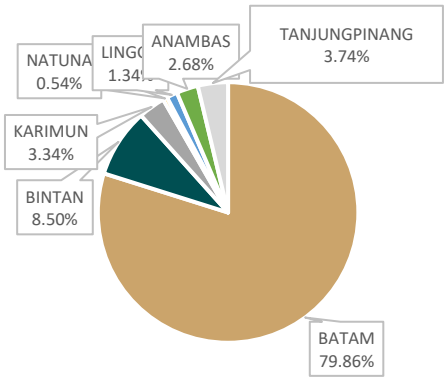

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

4.1.3 Perkembangan *Local Taxing Ratio* Pemerintah Provinsi Kepri dan Konsolidasi Pemerintah Kab/Kota Tahun 2017 s.d Triwulan II Tahun 2023

Grafik 4.25 - Perbandingan Penerimaan PAD dan Local Tax Ratio (LTR) Provinsi Kepri (2017-2023)

Grafik 4.26 - Perbandingan Penerimaan PAD dan Local Tax Ratio (LTR) Konsolidasi Pemerintah Kab/Kota Kepri (2017-2023)

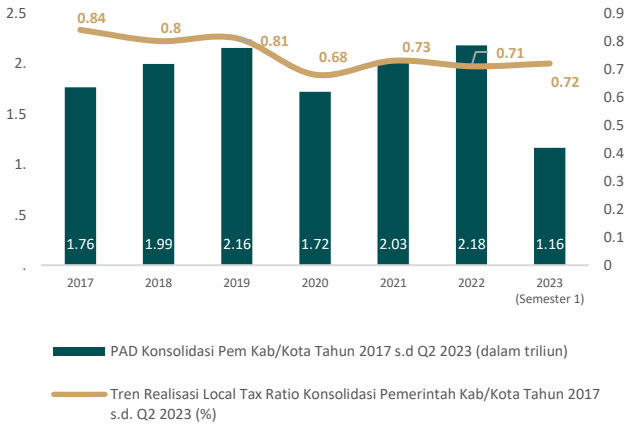

Sumber: BPKAD dan Bapenda Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023

Perkembangan *Local Tax Ratio* (LTR) di Provinsi Kepri pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami tren yang meningkat dengan pertumbuhan signifikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sejalan dengan kondisi ekonomi yang sedang terkontraksi, LTR di tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,08%, namun pada tahun 2021, LTR Pemerintah Provinsi tumbuh 6,38%, selanjutnya di tahun 2022, LTR Pemerintah Provinsi tumbuh lebih tinggi yaitu 8,00.

Kondisi yang cukup berbeda pada LTR Konsolidasi Pemerintah Kota/Kabupaten di Kepri. LTR dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami tren penurunan. Pada saat pandemi

COVID-19 di tahun 2020, LTR Konsolidasi mengalami kontraksi sebesar -16,05%. Sejalan dengan pemulihan ekonomi di tahun 2021, LTR di tahun tersebut tumbuh 7,35%. Namun ketika perekonomian semakin membaik di tahun 2022, LTR mengalami pertumbuhan negatif -2,74%.

Rata-rata LTR Pemerintah Provinsi Kepri dari tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar 0,50%, sedangkan rata-rata LTR Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 0,76%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah provinsi dan Kab/Kota di Kepri masih sangat rendah.

Diperlukan optimalisasi dalam meningkatkan kemandirian fiskal di Kepri melalui reformasi pendapatan daerah yang terdiri dari 4 aspek: Restrukturisasi Pajak Daerah, Kewenangan Pemungutan Opsen Pajak, Perluasan Basis Pajak Daerah, dan Penyederhanaan Retribusi Daerah.

4.2 Reviu Kesiapan Daerah Dalam Penguatan *Local Taxing*

Berdasarkan hasil FGD dengan Badan Pendapatan Daerah Lingkup Kepri pada tanggal 26 Juli tahun 2023, dapat dilaporkan beberapa progres mengenai penguatan *Local Taxing* di Kepri sesuai dengan UU HKPD:

a. Pemerintah Kabupaten Natuna

Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kab. Natuna saat ini dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehubungan dengan skenario opsen pajak daerah dan dampak nya terhadap PAD APBD, untuk saat ini progresnya masih dalam proses koordinasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri. Skenario opsen tersebut kemungkinan akan berdampak terhadap Pajak PKB dan BBNKB. Selanjutnya untuk skenario perluasan basis pajak daerah, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Tantangan yang dihadapi untuk perluasan basis pajak adalah wajib pajak masih belum memahami aturan dan enggan untuk memberikan keterangan/data yang sebenarnya.

Terkait dengan penyederhanaan retribusi daerah, Pemkab Natuna sudah mengatur nya didalam Raperda PDRD yang saat ini sedang dievaluasi oleh Kemendagri dan Kemenkeu. Selanjutnya Pemkab Natuna akan melakukan koordinasi dengan pihak OPD Penghasil Retribusi. Isu strategis lain terkait *Local Taxing Power* adalah proses melakukan pemutahiran data dan sistem penagihan Pajak Daerah. Geografis Natuna yang terdiri dari beberapa pulau sehingga membuat jarak dan rentang kendali jauh menjadi tantangan dalam pemutahiran data dan sistem penagihan. Strategi implementasi dari pemutahiran data dan sistem penagihan adalah sistem pembayaran pajak daerah secara *online*. Selain itu, isu lainnya adalah terdapat adanya kenaikan tarif pajak daerah.

Sebagai tambahan informasi, Potensi perpajakan di Natuna adalah Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

b. Pemerintah Kabupaten Karimun

Raperda PDRD Pemkab Karimun sudah mendapat persetujuan dari DPRD dan saat ini sedang dalam tahap evaluasi di Kemendagri dan Kemenkeu. Tantangan yang dihadapi adalah baru diterbitkannya PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum PDRD yang menyebabkan Pemkab Karimun perlu melakukan penyesuaian dalam penyusunan Raperda PDRD. Strategi dalam mengimplementasikan Raperda PDRD di Kabupaten Karimun melalui (1) Pelaksanaan sosialisasi Perda PDRD kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. (2) Koordinasi bersama OPD terkait, dan (3) pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD).

Sehubungan dengan skenario Opsen Pajak Daerah, tantangan yang dihadapi adalah (1) belum adanya petunjuk teknis pembagian Opsen, (2) belum optimalnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri, dan (3) belum ada kepastian tata cara perhitungan Opsen. Strategi implementasi skenario opsen pajak daerah, yaitu (1) melaksanakan koordinasi bersama pemerintah Provinsi Kepri, dan (2) membuat petunjuk teknis perhitungan dan pembagian Opsen.

Dalam upaya memperluas basis pajak daerah, tantangan yang dihadapi adalah (1) mempersiapkan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), (2) mempersiapkan Petunjuk Teknis Opsen Pajak sebagai salah satu basis Pajak Daerah baru, dan (3) melaksanakan pendataan atas Objek hasil perluasan basis pajak daerah. Selanjutnya pemkab akan melaksanakan sosialisasi tarif retribusi baru kepada wajib retribusi.

Isu strategis lainnya terkait *Local Taxing Power* di Kab. Karimun adalah (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB P2 paling rendah 20%, dan paling tinggi 100%. (2)BLUD yang dicatat sebagai retribusi, (3) persiapan Perkada tentang PDRD, (4)Model Kerjasama pemungutan retribusi menggunakan pihak ketiga wajib disetor secara bruto, untuk petugas mendapat imbal jasa yang dianggarkan oleh APBD, (5)Pajak hiburan tarif 40%, (6)penguatan fungsi organisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan (7)rencana penerapan parkir berlangganan bekerjasama dengan pemerintah provinsi Kepri.

Peluang potensi perpajakan yang dapat digali di Kabupaten Karimun adalah (1) hotel, restoran, PPJ NonPLN, dan Parkir (2) potensi penerimaan pajak melalui pemeriksaan pajak, (3) potensi melalui penilaian PBB secara individu, (4) potensi melalui penerapan zona nilai tanah.

c. Pemerintah Provinsi Kepri

Progress Raperda PDRD Provinsi Kepri sudah selesai pembahasan dengan Bapemperda dan saat ini sudah disampaikan kepada DPRD Provinsi Kepri untuk dilakukan pembahasan. Tantangan dari penyusunan Raperda PDRD adalah baru diterbitkannya PP 35 tahun 2023 tentang pedoman PDRD yang menyebabkan Pemprov Kepri perlu melakukan penyesuaian dan pembahasan ulang draft Raperda yang telah disusun. Target penyelesaian Raperda diharapkan disahkan diakhir bulan September 2023.

Sehubungan dengan skenario opsen pajak daerah, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar 66% dari pajak terutang. Tantangan yang dihadapi, yaitu penerimaan bagian

Provinsi menurun, sementara bagian Kabupaten/kota bertambah, namun terjadi ketimpangan antar Kab/Kota, tergantung banyaknya populasi kendaraan pada Kab/kota bersangkutan. Skenario opsen dilaksanakan sesuai UU HKPD namun ada wacana untuk sedikit menaikan tarif pajaknya. Dampak bagi Wajib Pajak akan ada sedikit penambahan beban, bagi provinsi akan menurunkan PAD dan APBD dan bagi Kabupaten Kota sangat tergantung populasi jumlah kendaraan yang terdaftar di Kabupaten/Kota.

Terkait dengan skenario penyederhanaan retribusi daerah, saat ini pemprov Kepri sedang mengidentifikasi pelayanan yang tidak lagi menjadi objek retribusi. Tantangan yang dialami adalah pelayanan masih harus dilakukan namun tidak dapat melakukan pemungutan retribusi. Penyederhanaan retribusi akan dilaksanakan sesuai UU HKPD dan pelayanan yang disediakan daerah. Selanjutnya pemprov Kepri menyampaikan isu terkait LTP, yaitu perlunya optimalisasi opsen untuk meminimalisir penurunan PAD provinsi Kepri. Potensi perpajakan yang dapat digali di Pemprov Kepri adalah pajak alat berat dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). selain itu Provinsi kepri akan mencoba menggali potensi PKB dari kendaraan di atas air.

d. Pemerintah Kota Batam

Disampaikan bahwa saat ini Ranperda PDRD sedang dalam tahap pembahasan dengan Pansus DPRD dan sedang dilakukan penyesuaian terhadap isi draft Ranperda dengan PP 35 Tahun 2023 yang baru saja terbit. Strategi dalam implementasi PDRD sesuai UU HKPD dilakukan melalui pendekatan makro ekonomi. Sehubungan dengan opsen pajak daerah di kota Batam, dampak pengenaan opsen MBLB, PKB, BBNKB ada sedikit peningkatan terhadap PAD APBD Kota Batam. Tantangan dari opsen pajak terkait dengan sistem. Strategi dalam mengimplementasikannya melalui pembahasan antara Pemko Batam dengan Pemprov Kepri.

Dalam upaya memperluas basis pajak daerah di kota batam, pemkot akan melakukan pendataan potensi pajak baru sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Tantangan yang dihadapi adalah masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui UU HKPD. Strategi implementasi perluasan basis pajak dilakukan dengan sosialisasi kepada wajib pajak terhadap potensi baru pengenaan pajak, melakukan validasi data agar akurat di lapangan, dan koordinasi dengan Samsat terkait data PKB dan BBNKB.

Potensi Perpajakan yang dapat digali di kota Batam adalah PBB-P2 dan BPHTB (potensi atas penyesuaian NJOP), Perizinan titik Reklame yang selama ini dilakukan oleh BP Kawasan sekarang sudah menjadi satu perizinan di Pemko Batam di Di DPMPTSP dan kenaikan NJOP dan NSR, Pajak dari Sektor Restoran, Jasa Boga dan Katering, dan Pajak dari Sektor Jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi : olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran serta rekreasi wahana air.

e. Pemerintah Kota Tanjungpinang

Ranperda PDRD dalam tahap pembahasan dengan Pansus DPRD. Tantangan yang dihadapi adalah baru diterbitkannya PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum PDRD yang menyebabkan Pemkot Tanjungpinang perlu melakukan penyesuaian dalam penyusunan Raperda PDRD. Strategi implementasi dilakukan dengan (1) pelaksanaan kegiatan sosialisasi sehingga penerapan Ranperda PDRD diharapkan lebih maksimal, (2)

perencanaan penyusunan Ranperwako tata cara pemungutan pajak sebagai turunan ranperda PDRD.

Skenario opsen pajak daerah telah diatur didalam batang tubuh raperda PDRD. Beberapa tantangan yang dihadapi, sebagai berikut (1) BPPRD Kota Tanjungpinang telah melakukan koordinasi dengan Samsat Kota Tanjungpinang melalui surat yang dilayangkan terkait permintaan data, namun hingga kini belum ada balasan, (2) Dampak pengenaan opsen PKB dan BBNKB terhadap Kota Tanjungpinang belum dapat dihitung, karena menunggu surat balasan dari Samsat Kota Tanjungpinang, (3) Dampak pengenaan opsen MBLB tidak berpengaruh terhadap PAD APBD Kota Tanjungpinang, karena tambahan opsen dibebankan kepada Wajib Pajak.

Strategi implementasi opsen pajak dilaksanakan melalui pelaksanaan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Samsat Kota Tanjungpinang. Sebagai tambahan informasi, potensi perpajakan di Tanjungpinang adalah Pajak Sarang Burung Walet yang baru mulai dipungut pada bulan Juni 2023. Selain itu potensi perpajakan yang dapat digali di Natuna adalah PBB-P2 dan BPHTB (potensi atas penyesuaian NJOP) dan Pajak Air Tanah (pembayaran belum dapat diuji karena belum adanya meteran listrik).

f. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Raperda PDRD Kab. Anambas masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD. Tantangan dalam penyusunan raperda adalah (1) masih ada beberapa OPD yang belum menyerahkan tarif perhitungan dikarenakan kajian yang belum selesai namun proses tetap berjalan dan (2) pembahasan agak terlambat dikarenakan menunggu pengesahan PP Nomor 35 tahun 2023, (3) tata cara untuk objek pajak baru terkait opsen masih kurang jelas. Implementasi ketentuan PDRD akan dilakukan dengan koordinasi bersama tim penyusunan Ranperda PDRD dan Pemerintah/Kabupaten/Kota lainnya. Skenario opsen pajak daerah masih dalam tahap pembahasan dengan Pansus DPRD.

Tantangan terkait opsen pajak daerah, yaitu (1) masih membutuhkan koordinasi dan konsultasi terkait data opsen pajak dengan samsat Provinsi, (2) Dampak dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB yaitu bertambahnya objek pajak daerah sedangkan dari sisi penerimaan, berkurangnya penerimaan daerah dikarenakan selama ini penerimaan PKB berasal dari bagi hasil provinsi, namun berikutnya perhitungan opsennya sesuai kendaraan yang ada di daerah sedangkan kendaraan di Kabupaten Kepulauan Anambas sedikit jumlahnya, (3) Opsen MBLB tidak berdampak bagi daerah, namun bertambahnya penerimaan untuk Provinsi.

Dalam memperluas basis pajak daerah, Pemkab anambas akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan tim penyusunan Ranperda PDRD dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota lainnya. Dalam pelaksanaan perluasan basis pajak daerah tantangan yang dihadapi yaitu masih membutuhkan koordinasi dan konsultasi terkait tarif dan pasal demi pasal dalam perluasan basis pajak daerah. Strategi implementasi perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan (1) melakukan koordinasi internal misalnya dengan PTSP terkait perizinan (2) melakukan pemutahiran data misalnya dengan pendataan ulang wajib pajak, (3) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan pengawasan.

Selanjutnya sehubungan dengan penyederhanaan retribusi, saat ini sedang dalam pembahasan dengan Pansus DPRD. Pemkab Anambas akan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan tim penyusunan raperda PDRD dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota Lainnya. Tantangan yang dihadapi oleh Pemkab Anambas sehubungan dengan penyederhanaan retribusi daerah adalah masih dibutuhkannya koordinasi dan konsultasi terkait skenario penyederhanaan retribusi daerah.

Potensi perpajakan yang dapat digali di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Sarang Burung Walet.

g. Pemerintah Kabupaten Lingga

Ranperda PDRD saat ini sudah disampaikan ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk evaluasi. Tantangan yang dihadapi adalah (1) penentuan besaran tarif retribusi daerah, (2) teknis pemberlakuan opsen pajak, (3) teknis pungutan retribusi baru sesuai dengan UU HKPD, (3) teknis penyusunan matrik raperda yang sudah diusulkan.

Rancangan opsen pajak daerah saat ini dalam proses hearing kedua bersama DPRD. Tantangan yang dihadapi terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang PDRD yang baru diundangkan pada tanggal 16 Juni 2023 membuat pemda Lingga sedikit merasa kesulitan dalam mengatur beberapa norma dalam Ranperda PDRD. Strategi Pemkab Lingga dalam implementasi opsen pajak, yaitu : (1) Opsen pajak merupakan pungutan tambahan pajak dengan persentase tertentu dimana sesuai dengan UU HKPD terdiri atas tiga jenis pajak daerah yakni opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan opsen MBLB yang mana sebelumnya untuk PKB dan BBNKB merupakan penerimaan daerah berdasarkan bagi hasil pajak Provinsi dengan sistem pemerataan. Dan sekarang sudah ditetapkan tarifnya sesuai dengan Perda berdasarkan UU HKPD, namun pungutan dan pengelolaannya tetap di Pemerintah Provinsi. (2) Dampak terhadap PAD APBD Kabupaten dengan adanya opsen PKB dan BBNKB dari sektor PAD akan meningkat namun dari sektor pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi mengalami penurunan.

Terkait dengan penyederhanaan retribusi daerah saat ini dalam proses hearing kedua bersama DPRD, penyederhanaan retribusi daerah berpengaruh terhadap beberapa jenis retribusi yang tidak dapat dilakukan pungutan lagi dan ini akan berdampak pada penurunan penerimaan daerah dari sektor PAD (seperti retribusi tera ulang dan retribusi Izin usaha perikanan).

Isu strategis terkait dengan LTP adalah Sinergi antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dalam pengelolaan dan Pemungutan Pajak. Terdapat beberapa tantangan dalam sinergi tersebut, yaitu (1) Kebijakan Kepala Daerah terhadap penghapusan dan atau pengurangan denda pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (2) Perubahan struktur organisasi di Badan Pendapatan Daerah (penambahan bidang teknis pengawasan) (3) Penyesuaian NJOP dengan Zona Nilai Tanah yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan telah disetujui oleh Pimpinan Daerah. (4) Pengusulan pembentukan Balai Karantina Hewan di Kabupaten Lingga (5) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan retribusi parkir secara berlangganan.

Potensi perpajakan yang dapat digali di Kabupaten Lingga adalah Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak MBLB.

h. Pemerintah Kabupaten Bintan

Penyusunan Raperda PDRD Kab. Bintan berdasarkan UU HKPD di Kabupaten Bintan sudah berjalan, penyampaian ranperda ke DPRD dan diparipurnakan oleh DPRD Kab. Bintan pada tanggal 28 April 2023. Sampai saat ini masih berproses dalam pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Bintan. Tantangan yang dihadapi adalah sehubungan dengan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru diundangkan pada 16 Juni tahun 2023, sehingga dibutuhkan penyesuaian kembali terkait norma-norma didalam Raperda PDRD.

Sehubungan dengan skenario opsen Pajak Daerah dan dampaknya terhadap PAD, secara ketentuan di Kab. Bintan akan berdampak terhadap PAD secara langsung, yaitu dari opsen pajak kendaraan bermotor, namun terjadi penurunan pada pajak MBLB sebesar 25% sebagai opsen ke Pemerintah Provinsi. Besaran opsen pajak kendaraan bermotor tergantung jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bintan. DBH pajak kendaraan bermotor yang biasa diterima Kabupaten/ Kota tidak lagi didapatkan karena menjadi ketentuan opsen pajak secara langsung menjadi PAD.

Pemkab Bintan akan memperluas basis data dengan beberapa strategi, yaitu (1) penghimpunan data dan informasi dilapangan guna melihat potensi pajak yang belum tergali, (2) menjaring pelaku usaha guna menambah wajib pajak baru, (3) peningkatan administrasi pajak terutama dari sisi pengawasan guna mendeteksi data sebenarnya dengan jelas terkait jumlah Wajib Pajak serta transaksi yang menimbulkan kewajiban perpajakan.

Sehubungan dengan isu strategis lainnya terkait penguatan LTP, optimalisasi pemungutan pajak daerah dilakukan melalui Kerjasama dengan Ditjen Pajak dan Pihak Ketiga dalam pengelolaan dan pemanfaatan data bersama yang diwujudkan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS). Selain itu, Penguatan *LTP* di Pemkab Bintan dilakukan dengan peningkatan fungsi pendataan, penagihan, pengawasan dan pelayanan perpajakan daerah serta penguatan regulasi. Potensi perpajakan di Kabupaten Bintan adalah PBB P2, BPHTB, Pajak Barang Jasa Tertentu, Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet.

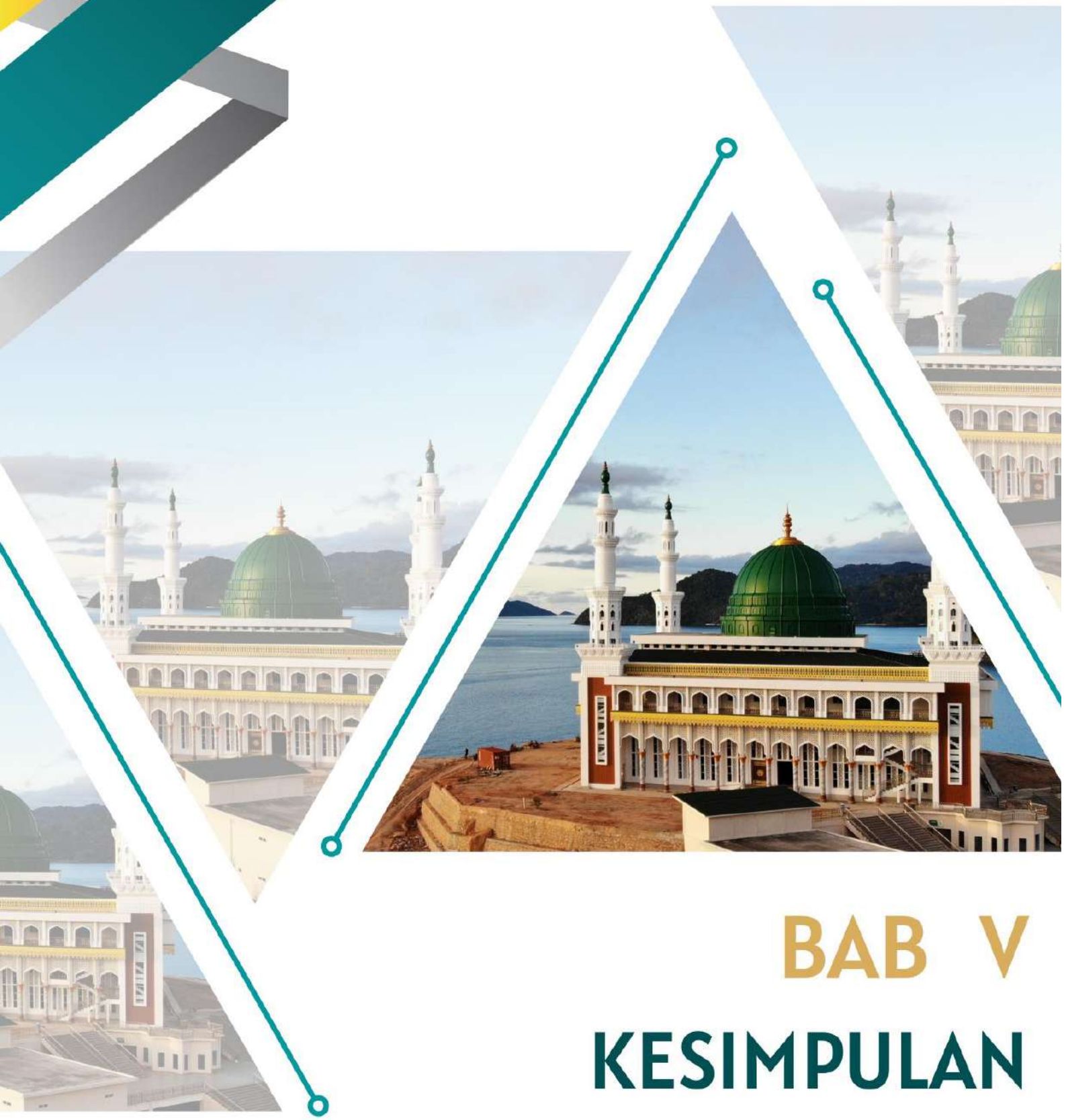

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Masjid Agung Baitul Ma'mur, Kab. Kep. Anambas
Sumber: Dinas Pariwisata Prov.Kepri

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Indikator Makro Ekonomi

1. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan II-2023 tumbuh sebesar 5,04% *(yoy)*. Jika dibandingkan dengan Triwulan I-2023, perekonomian Kepri triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,72% (*qtq*).
2. Bila membandingkan perekonomian Kepri pada triwulan II-2023 dengan triwulan I-2023, perekonomian tumbuh sebesar 0,72% (*qtq*) yang secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II-2023 adalah sebesar 5,77% (*ctc*).
3. Secara spasial di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan II-2023 lebih tinggi dibandingkan dari wilayah Sumatera yakni sebesar 4,90% *(yoy)* dan berada pada urutan kelima dari struktur perekonomian Sumatera dengan *share* sebesar 7,38%. Pertumbuhan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,24% *(yoy).*
4. Pada triwulan II-2023 PDRB (ADHB) mencapai Rp81,50 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp49,16 triliun. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Regional Kepri, yaitu Rp34,95 triliun (42,88%). PMTB juga mengalami pertumbuhan *year on year* sebesar 7,81% dibandingkan triwulan II tahun 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan investasi di provinsi Kepri secara *year on year* di triwulan II 2023.
5. Kontribusi terbesar kedua pada PDRB Regional Kepri adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang telah terealisasi Rp33,77 triliun (41,43%). Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan 3,46% *(yoy)*. Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah pada bulan April tahun 2023 turut mendorong kontribusi konsumsi terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau seiring dengan meningkatnya daya beli Masyarakat setelah Sebagian Masyarakat menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Selain itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 282.619 orang juga turut mendorong kontribusi konsumsi terhadap PDRB di Provinsi Kepri.
6. Berdasarkan data PDRB Triwulan II-2023 Perlapangan usaha atas harga berlaku, terdapat 3 sektor yang berkontribusi dominan terhadap perekonomian di Provinsi Kepri, yaitu Industri Pengolahan (38,23%), Konstruksi (19,26%), dan Pertambangan dan Penggalian (12,53%).

7. Pengeluaran konsumsi pemerintah berkontribusi sebesar 4,64% atau telah terealisasi Rp3,78 triliun. Capaian realisasi Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut mengalami pertumbuhan 10,35% secara *year on year*. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan belanja APBN di Kepri yang telah mengalami pertumbuhan sebesar 14,68%.
8. Pada bulan Juni 2023, tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,64%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 3,52%. Secara spasial, dari 24 kota IHK di Sumatera, tercatat seluruh kota mengalami inflasi *year-on-year* di bulan Juni 2023. Tingkat Inflasi IHK secara tahun kalender *(ytd)* Provinsi Kepulauan Riau tercatat menjadi yang terendah secara Nasional selama tiga bulan berturut-turut yaitu bulan Mei s.d. Juli 2023.
9. Neraca perdagangan luar negeri provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni tercatat menghasilkan kinerja positif dengan surplus sebesar US$107,75 Juta. Surplus diperoleh dari perhitungan nilai ekspor bulan Juni sebesar US$1.464,66 Juta yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor pada bulan Juni sebesar US$1.356,91 Juta. Namun demikian, nilai tersebut tumbuh negatif sebesar 37,58% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 *(yoy)*.
10. Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69% dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun dari persentasenya.
11. Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepri bulan Maret 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,55% poin atau menurun ±9,18 ribu jiwa *(yoy)* dan bila dibandingkan dengan bulan September 2022, Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepri mengalami penurunan sebesar 0,34% poin atau menurun ±6,4 ribu jiwa.
12. Beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan pada Maret 2023, diantaranya adalah turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2023 sebesar 0,41 poin bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022. TPT pada bulan Februari 2023 berada pada 7,61%. Penduduk yang bekerja pada Februari 2023 sebanyak 1.023 ribu orang, naik sebanyak 50 ribu orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Industri Pengolahan sebesar 41,8 ribu orang yang merupakan industri unggulan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan sinyalemen positif atas perkembangan Industri Pengolahan di Provinsi Kepri.
13. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepri yang diukur oleh *Gini Ratio* sebesar 0,340, masih dibawah angka Rasio Gini Nasional yang pada Maret 2023 berada di angka 0,388 Meningkat 0,015 *point* dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran melebar pada periode Maret 2023. Namun, bila dibandingkan dengan periode Maret 2022, Rasio Gini tercatat menurun sebesar 0,002 *point* (*yoy*).
14. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepri di bulan Juni 2023 adalah sebesar 105,66 dan menunjukkan tren yang meningkat di sepanjang tahun 2023. Nilai tersebut juga telah melebihi target NTP yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 99,91%. Namun demikian, bila dibandingkan dengan tahun 2022, NTP Provinsi Kepri s.d. bulan Juni 2023 cenderung mengalami penurunan sebesar 2,13% *(yoy)*.

15. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, NIlai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 110,64% dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTN Nasional yang berada pada angka 106,96%. Bila dilihat dari kurun waktu satu tahun terakhir, grafik NTN di Provinsi Kepri juga menunjukkan adanya peningkatan.
16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,88% menjadi 76,46 pada tahun 2022 dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 75,79. Capaian IPM Provinsi Kepulauan Riau tersebut mendapatkan peringkat ke 4 tertinggi tingkat nasional untuk tiga tahun berturut-turut.
17. IPM Provinsi Kepri masuk ke dalam IPM dengan capaian tinggi, namun apabila dilihat lebih rinci pada Kota/Kabupatennya, terjadi ketimpangan yang cukup lebar. Pada tahun 2022, capaian IPM Kota Batam sudah masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi yaitu 81,67, sedangkan IPM di Kabupaten Lingga baru mencapai kategori sedang dengan angka 66,57, selain itu Kepulauan Anambas juga masih masuk ke dalam kategori sedang dengan capaian 69,61, masih cukup jauh dengan capaian Kota Tanjungpinang, yaitu 79,64.

Analisis Fiskal Regional

1. Realisasi Pendapatan pada Semester I tahun 2023 sebesar Rp5.858 miliar atau 51,06% dari target tahun 2023. Pendapatan tersebut hanya bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri pada Semester I 2023, secara nominal mengalami pertumbuhan minus sebesar -6,30% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 (realisasi sebesar Rp6.252 miliar). Penerimaan Perpajakan memberikan kontribusi paling dominan yaitu sebesar 84,20% (Rp4.933 miliar) dibandingkan PNBP yang memberikan kontribusi sebesar 15,80% (Rp925 miliar).
2. Ditinjau dari sisi pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun 2022, Pajak Lainnya menjadi pos dengan pertumbuhan tertinggi (141,67%), kemudian diikuti oleh PBB (130,75%), Cukai (96,65%), PPN (17,93%). PPh bahkan mengalami pertumbuhan minus sebesar (-9,64%). Namun demikian, capaian PPh pada periode semester I tahun 2023 dinilai baik karena pertumbuhan negatif kurang dari 10% dibandingkan capaian semester I tahun 2022.
3. PNBP dapat direalisasikan sebesar Rp925 miliar atau 40,87% dari target. Capaian ini tumbuh sebesar 27,64% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022 (Rp725 miliar). PNPB terdiri dari Pendapatan BLU dan PNBP Lainnya. Realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp403 miliar atau 96,36% dari target sedangkan realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp522 miliar atau sebesar 28,29% dari target.
4. *Tax ratio* pada Semester I Tahun 2023 sebesar 2,71%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2022 sebesar 3,73%. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara total, karena sebagian penerimaan pajak di Semester I Tahun 2022 ditopang oleh penerimaan PPh Final yang berasal dari program pengungkapan sukarela yang berakhir di bulan Juni 2022, walaupun penerimaan PPh pada periode Semester I Tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan pajak pada semester I tahun 2023 sebesar Rp4.933 miliar, mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,75% dibandingkan dengan semester I tahun 2022, sedangkan Semester I tahun 2023 terdapat realisasi PDRB sebesar Rp161.824 miliar, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,04%.

5. Belanja Negara dapat direalisasikan sebesar Rp6.546 miliar atau 37,43% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat memberikan kontribusi sebesar 45,15% dari total Belanja Negara sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) memberikan kontribusi sebesar 54,85%. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.956 miliar atau sebesar 31,01% dari pagu, Belanja Pusat terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bantuan Sosial, dan Belanja Lainnya dengan realisasi masing-masing sebesar 50,78%, 29,71%, 18,68%, 32,91%, dan 21,73%.
6. Pagu TKD tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022, hal ini disebabkan oleh penurunan pagu DBH sebesar Rp869 miliar. Namun dari sisi penyerapan, pada semester I tahun 2023 TKD telah terserap sebesar Rp3.591 miliar (45,11%), lebih baik dibandingkan dengan semester I tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 2,36%.
7. Realisasi Belanja Negara tumbuh sebesar 14,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tumbuh 34,33% sedangkan realisasi TKD tumbuh 2,36% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
8. Seluruh pos BPP tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun 2022, kecuali untuk Belanja Lainnya yang tumbuh minus -0,85%. Pertumbuhan positif realisasi BPP, walaupun pagu belanja naik, menunjukkan bahwa terdapat perbaikan disisi penyerapan belanja.
9. Dari sisi TKD, Dana Insentif Daerah (DID) tumbuh negatif sebesar -34,31%. Hal ini dikarenakan pagu anggaran DID tahun 2023 turun sebanyak 59,88% dibandingkan tahun 2022. Kinerja realisasi DID tahun 2023 telah baik, yaitu mencapai 50%, atau sebesar Rp31,56 miliar. Pada tahun 2022, persentase realisasi DID lebih rendah, yaitu 30,54% atau sebesar Rp48,05 miliar.
10. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp5.504 miliar atau sebesar 39,97% dari pagu anggaran. Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp3.521 miliar (64% dari pendapatan daerah) dibandingkan PAD sebesar Rp1.975 miliar (36% dari pendapatan daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.
11. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumpang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp1.647,79 miliar. Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp244 miliar) dan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp206 miliar). Disisi retribusi daerah, retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi penyumbang realisasi terbesar, yaitu Rp21 miliar.
12. Pajak reklame naik signifikan pada Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Pada Kota Batam, pajak reklame meningkat sebesar Rp4,88 miliar atau 121%, sedangkan pada Kota Tanjungpinang meningkat sebesar Rp524 juta atau 58%.
13. Pemerintah Kota Batam mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan tarif pajak reklame yang berlaku efektif pada 1 Januari tahun 2023. Pemerintah Kota Batam melakukan penyesuaian tarif karena pengenaan tarif reklame masih menggunakan peraturan Wali Kota Batam tahun 2011 sehingga tarif reklame yang berlaku dinilai terlalu rendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan tarif reklame Kota Tanjung Pinang. Pada peraturan baru tersebut, tarif reklame meningkat hingga 60%.

14. Peningkatan pajak reklame Kota Tanjung Pinang merupakan buah dari kebijakan Pemko Tanjung Pinang untuk menertibkan reklame liar pada triwulan IV tahun 2022. Pemko Tanjung Pinang menertibkan sebanyak 190 unit kontruksi papan reklame illegal. Hal ini efektif dapat meningkatkan pajak reklame Kota Tanjung Pinang hingga 58%.

Pengembangan Ekonomi Daerah

1. Sesuai dengan analisis sektor unggulan daerah yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau pada KFR Tahunan 2022 dengan menggunakan metode *Location Quotient*, *Shift-Share* (*Differential Shift*), dan analisis Tipologi *Klassen*, sektor unggulan daerah pada Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor Industri Pengolahan sedangkan sektor potensial adalah sektor Perdagangan.
2. Sampai dengan Semester I tahun 2023, Industri Pengolahan menyumbangkan 40,32% dari total PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, jauh lebih tinggi dari sektor penyumbang kedua yaitu sektor Konstruksi dengan persentase sebesar 19,20%. Sektor Industri Pengolahan terdiri dari beberapa sub sektor, dengan subsektor penyumbang PDRB terbesar adalah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Logam Dasar dan Industri Alat Angkutan.
3. Pada Provinsi Kepulauan Riau, terdapat dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mendukung perkembangan industri pengolahan, yaitu KEK Galang Batang yang berada pada Kabupaten Bintan dan KEK Batam Aero Technic yang berada pada Kota Batam. Galang Batang merupakan KEK yang memiliki akses langsung dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan yang resmi beroperasi pada tanggal 8 Desember 2018. KEK Galang Batang diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang serta berpotensi untuk menciptakan *multiplier effect* di Kawasan sekitar. Nilai investasi pembangunan KEK Galang Batang diperkirakan akan mencapai Rp36,25 triliun hingga tahun 2027.
4. KEK Batam Aero Technic merupakan KEK yang terintegrasi dengan bandara Hang Nadim. KEK Batam Aero Technic merupakan KEK yang di Kelola oleh PT. Batam Teknik yang berkegiatan utama sebagai Industri MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) Pesawat. Kehadiran KEK Batam Aero Technic bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi negara, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam jangka pendek, keberadaan KEK Batam Aero Technic mampu menghemat devisa 65-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional atau senilai Rp26 triliun per tahun yang selama ini mengalir ke luar negeri.
5. Terdapat pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada Industri Pengolahan yang cukup tinggi sebesar 41,8 ribu orang pada tahun 2023 (yoy). Hal ini turut didukung dengan penyerapan tenaga kerja dari kedua KEK (KEK BAT dan KEK Galang Batang) yang berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2023 sebesar 0,41 poin.
6. Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat konektivitas dan perdagangan antar wilayah. Maka dari itu, dukungan

pemerintah dalam meningkatkan industri pengolahan tidak hanya dukungan secara langsung, namun dukungan secara tidak langsung seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program pengembangan kawasan strategis.

7. Terkait sektor potensial, sampai dengan semester I tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Kepri sebesar 9,22%. Capaian kontribusi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,07% dibandingkan dengan semester I tahun 2022. Jika dilihat pada beberapa tahun sebelumnya di periode yang sama kontribusi sektor perdagangan mengalami tren cenderung stabil walaupun terdapat penurunan kontribusi di tahun 2021.
8. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, berdasarkan hasil Sakernas Februari tahun 2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor masuk didalam tiga sektor usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak, dengan kontribusi sebesar 17,24% (176.387 orang) dari total penduduk bekerja (1.023.235 orang). Namun jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2022, jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan mengalami penuruanan sebanyak 19,06 ribu orang.

Analisis Tematik

1. Perkembangan PAD Pemprov Kepri selama 6 tahun terakhir (2017-2022) mengalami tren peningkatan walaupun terdapat anomali yang terjadi khususnya di tahun 2020 akibat pandemi *COVID-19*.
2. Secara akumulasi dari tahun 2017 sampai dengan triwulan II tahun 2023, kontributor terbesar PAD Konsolidasi Kabupaten/Kota adalah Pajak Daerah (72,56%), lalu LLPAD yang sah (19,46%), Retribusi Daerah (5,98%), dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (2,00%).
3. Pajak Daerah Pemprov Provinsi Kepri mengalami perkembangan tren yang meningkat cukup baik dari tahun 2017 s.d 2022. Walaupun terdapat kontraksi karena pandemi *COVID-19* di Tahun 2020, di tahun 2021-2022 tren Pajak Daerah terus konsisten meningkat.
4. Penerimaan daerah dari retribusi mengalami tren yang fluktuatif. Dengan capaian realisasi tertinggi di tahun 2018 (Rp 13,54 miliar) dan terendah ditahun 2017 (Rp3,19 miliar). Pertumbuhan retribusi daerah tertinggi berada pada tahun 2018 (325,01%).
5. Pajak Daerah Konsolidasi Pemda Kab/Kota mengalami tren pertumbuhan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, walaupun mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020, tren Pajak daerah Kembali mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, namun realisasi tahun 2022 belum dapat mencapai realisasi pajak daerah ditahun 2019 (sebelum pandemi *COVID-19*).
6. Rata-rata *Local Tax Ratio* Pemerintah Provinsi Kepri dari tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2023 sebesar 0,50%, sedangkan rata-rata *Local Tax Ratio* Konsolidasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 0,76%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah provinsi dan Kab/Kota di Kepri masih sangat rendah.
7. Sehubungan dengan progress Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terdapat tiga pemda yang saat ini sedang dalam tahap evaluasi

di Kemendagri dan Kemenkeu, yaitu Pemkab Natuna, Pemkab Karimun, dan Pemkab Lingga. Sedangkan lima pemda lainnya sedang dalam tahapan pembahasan dengan Pansus DPRD.

8. Salah satu tantangan dalam proses penyusunan Ranperda PDRD adalah penyesuaian Draft Raperda tersebut terhadap PP 35 tahun 2023 tentang Pedoman PDRD.

5.2 Rekomendasi

Kepada Pemerintah Pusat

1. Penurunan Harga CPO dipasar global menurunkan penerimaan Bea Keluar. Pemerintah perlu mendorong komoditas lain yang dapat meningkatkan ekspor yang akhirnya meningkatkan bea keluar. Misalnya dengan terus mendukung dan memfasilitasi agar pengusaha ayam yang melakukan ekspor perdana di Bulan Mei 2023 dapat melakukan ekspor secara rutin bulanan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan potensi komoditas ekpor lainnya, seperti hasil budidaya perikanan (ikan bawal bintang) karena karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan.
2. Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, perlu adanya dukungan bantuan jangka panjang yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, seperti pemberian permodalan dan pelatihan untuk memulai usaha, disamping pemberian bantalan bantuan perlindungan sosial yang bersifat sementara (jangka pendek).
3. Keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam mengumpulkan penerimaan pajak di tahun 2022, data wajib pajak dari PPS dapat digunakan secara optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penggalian potensi perpajakan.

Kepada Pemerintah Daerah

1. Kebijakan untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif dan dapat dituangkan didalam rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
2. Kebijakan untuk menertibkan reklame illegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjung Pinang juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame illegal, misalnya penertiban izin Perizinan Bangunan Gedung.
3. Saat ini tiap pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait perpajakan untuk disahkan dan menjadi dasar pemungutan perpajakan, sesuai dengan undang-undang HKPD. Penetapan peraturan perpajakan dan retribusi disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing sehingga pendapatan pajak dan retribusi dapat optimal. Pemerintah daerah agar terus secara intensif melakukan percepatan penyelesaian peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat segera diimplementasikan, yang akhirnya dapat meningkatkan PAD daerah masing-masing.

4. Realisasi Belanja Daerah, khususnya Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer masih rendah, karena masih berada di angka 15%. Agar dapat memberikan dampak sebagai stimulus bagi perekonomian, pemerintah daerah agar melakukan upaya percepatan penyerapan Belanja tersebut. Upaya percepatan juga perlu dilakukan untuk menghindari belanja tersebut tidak terserap maksimal hingga akhir tahun.
5. Untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah agar memperkuat *linking and matching* kebutuhan pekerja di Kepulauan Riau dengan lulusan perguruan tinggi, sekolah vokasi, serta balai pendidikan dan sertifikasi profesi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang intensif kepada siswa dan mahasiswa terkait dengan *skill set* yang dibutuhkan dunia kerja. Sehingga kedepannya masyarakat Kepulauan Riau mampu untuk bekerja dan memiliki daya saing yang tinggi di industri yang sesuai dengan kebutuhan industri Kepulauan Riau.
6. Perlunya optimalisasi peran 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau *Free Trade Zone* (FTZ), yakni Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu KEK Nongsa, KEK Galang Batang dan KEK Batam Aero, untuk mendorong peningkatan penanaman modal dalam upaya menurunkan angka TPT.
7. Pemerintah Daerah perlu melakukan optimalisasi dalam meningkatkan kemandirian fiskal di Kepri melalui reformasi pendapatan daerah yang terdiri dari 4 aspek: Restrukturisasi Pajak Daerah, Kewenangan Pemungutan Opsen Pajak, Peluasan Basis Pajak Daerah, dan Penyederhanaan Retribusi Daerah.
8. Pemerintah Daerah agar dapat menganggarkan dana untuk membuat kajian potensi daerah di masing-masing wilayahnya. Kajian tersebut merupakan salah satu upaya dalam meyakinkan investor dalam menanamkan investasinya di daerah, sehingga dapat mengakselerasi ekonomi regional.

Kepada Pusat dan Daerah

1. Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Provinsi Kepri, sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat digunakan untuk memperkecil *Human Capital Gap* dan *Infrastructure Gap* yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepulauan Riau. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dalam mendukung sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, Pemerintah telah menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan daerah *Free Trade Zone* (FTZ) dengan berbagai kemudahan dan insentif fiskal yang diberikan. Saat ini hanya kota Batam yang merupakan wilayah FTZ secara menyeluruh, sehingga dalam upaya mengoptimalisasikan dukungan fiskal dan kemudahan berusaha untuk sektor unggulan, diharapkan pemerintah dapat memperluas FTZ di keseluruhan wilayah Kabupaten Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang agar dapat meningkatkan realisasi investasi dan mendorong pemerataan perekonomian di provinsi Kepri.

3. Untuk menekan biaya logistik, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman laut/*shipping* yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Selain itu, hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepada Kanwil DJPb Prov Kepri

1. Untuk meningkatkan PNBP, Kanwil DJPb sebagai Pembina BLU di daerah agar dapat segera melakukan pembinaan terhadap tiga BLU baru di Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan percepatan peningkatan penerimaan BLU dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLU.
2. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau dapat secara berkala melakukan FGD Raperda PDRD dengan mengundang unit eselon 1 Kementerian Keuangan lain dan Bapenda seluruh kabupaten kota dan provinsi untuk saling bertukar informasi dan memperoleh *progress* penyusunan serta kendala yang dihadapi masing-masing daerah. Forum tersebut diharapkan akan memacu seluruh pemda untuk dapat mengakselerasi penyelesaian Raperda PDRD yang selaras dengan UU HKPD dan kebijakan fiskal nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Sekretariat Negara. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

----------. 2020. *Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Nomor 87*.Jakarta: Sekretariat Negara.

----------. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020, Nomor 94*. Jakarta: Sekretariat Negara.

----------. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

----------. 2021. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

----------. 2021. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016*. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1181. Jakarta:Kementerian Keuangan.

----------. 2020. *PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang InsentifPajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Berita Negara RI Tahun 2020,Nomor 277*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

----------. 2020. *PMK Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berita Negara RI Tahun 2020, Nomor 736*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

----------. 2014.Surat Edaran Nomor SE-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pusat Statistik. 2022. *Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau*

DAFTAR PUSTAKA

2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2022*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2022. *Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2022. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2022*.

Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan II-2023*. Tanjungpinang: BadanPusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2023. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. Tanjungpinang: BadanPusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2023. *Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2023. *Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan Riau, Juni 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juni 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2023. *Perkembangan Nilai Tukar Petani Kepulauan Riau Juni 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Juni 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Februari 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2023. *Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Kepulauan Riau Juni 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2022. *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Mei 2023. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.*

BP Batam. 2022. *Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun Anggaran 2022 (Definitif).* Batam: BP Batam.

Intan Andriyani Wijaya dan Marseto, *Analisis potensi sektor ekonomi (location quotient, shift share, dan tipology klassen)*. KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 19 (1) 2022.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT Dana Desa) Juni 2020*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2016. Informasi APBN 2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022*. Tanjungpinang: Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2022. *Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022*. Tanjungpinang: Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2022. *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022*. Tanjungpinang: Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Yulianto Pamungkas dan Ririt iriani (2022), *Analisis Lq, Shift Share Serta Tipologi Klassen Pada Pegeseran Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Potensi Sektor Di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur*. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.1, No.5, Agustus 2022.

Anggaran Subsidi dan Kompensasi Rp502,4 triliun, Wamenkeu: Bisa Bangun 3.000 Rumah Sakit. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 15 Januari 2023, melalui: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Subsidi-dan-Kompensasi-Rp502,4-triliun

Herry Setyawan (2022*), Mengoptimalkan Insentif Fiskal Untuk Menggerakkan Investasi di Masa Normal Baru*. Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 8 Februari 2022, melalui:

https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/mengoptimalkan-insentif-fiskal-untuk-menggerakkan-investasi-di-masa-normal-baru

KEK Galang Batang. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Diakses pada 17 Januari 2023, melalui: https://kek.go.id/kawasan/KEK-Galang-Batang

Lida Puspaningtyas dan Nidia Zuraya (2022), *Suku Bunga Acuan BI Naik Lagi jadi 5,5 Persen*. Republika. Diakses pada 19 Januari 2023, melalui:

https://www.republika.co.id/berita/rnaa6i383/suku-bunga-acuan-bi-naik-lagi-jadi-55-persen

Siaran Pers Bank Indonesia (2022), *Bi 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 3,50%: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Memperkuat Pemulihan*. Bank Indonesia. Diakses pada 18 Januari 2023, melalui: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2419522.aspx

Siaran Pers Bank Indonesia (2022), *Bi 7-Day Reverse Repo Rate Naik 25 Bps Menjadi 3,75%: Sinergi Menjaga Stabilitas Dan Memperkuat Pemulihan*. Bank Indonesia. Diakses pada 18 Januari 2023, melalui: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2422622.aspx

Sinergi Penanganan Dampak Inflasi Melalui Belanja Wajib Perlindungan Sosial. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 15 Januari 2023, melalui: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Sinergi-Penanganan-Dampak-Inflasi

Viva Budy Kusnandar (2022), *Naik 7 Kali, Suku Bunga The Fed Capai Level Tertinggi dalam 15 Tahun*. Databoks. Diakses pada 6 Februari 2023, melalui: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/16/naik-7-kali-suku-bunga-the-fed-capai-level-tertinggi-dalam-15-tahun#:~:text=Dewan%20Gubernur%20bank%20sentral%20Amerika,tertingginya%20dalam%2015%20tahun%20terakhir

Chairani, Tri, *FGD Pembangunan Kota, Pemko Dorong Pengembangan UMKM dan Pariwisata*. Pemerintah Kota Tanjungpinang. Diakses pada 29 Agustus 2023 melalui: https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/fgd-pembangunan-kota-pemko-dorong-pengembangan-umkm-dan-pariwisata

DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaandan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD,perubahan APBD (APBD-P), dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN (APBN-P), dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Badan Layanan Umum (BLU) instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU memilikifleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLU Perguruan Tinggi Negeri, BLU Rumah Sakit Pemerintah, dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalammelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah/RKUD) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

Bagian Anggaran (BA) adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga (K/L) dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara (Contoh: 001 = Majelis Permusyawaratan Rakyat; 015: Kementerian Keuangan; 054 = Badan Pusat Statistik 999 = Bendahara Umum Negara).

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) adalah bagian anggaran yangtidak dikelompokkan dalam bagian anggaran K/L seperti subsidi, pembayaran utang, penerusan pinjaman, investasi pemerintah dan dana transfer.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Basis Poin/Basis Point (BPS) adalah unit pengukuran suku bunga dan persentase lainnya di bidang keuangan. Satu basis poin sama dengan 1/100 dari 1% atau 0,01%, dan digunakan untuk menunjukkan perubahan persentase.

Bea Masuk (BM)/Impor Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pengenaan bea masuk biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, memberikan proteksi terhadap produksi local, dan/atau untuk menghukum negaratertentu dengan mengenakan

tarif yang sangat tinggi untuk negara tersebut.

Bea Keluar (BK)/Export Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean. Saat ini, pengenaanbea keluar sudah jarang diterapkan karena tidak sejalan dengan kebijakan berorientasiekspor yang membutuhkan harga kompetitif di pasar internasional.

Belanja Diskresi/Discretionary Spending adalah belanja yang alokasinya didasarkanpada tujuan pemerintah, rencana program untuk mencapainya, serta dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Kebutuhan tersebut diusulkan oleh pemerintahuntuk ditelaah dan disetujui oleh DPR/DPRD. Perbedaan utama dengan belanja non- diskresi (mandatory spending), yang jumlah atau porsi alokasinya sudah ditentukan, adalah pada belanja diskresi porsi yang dialokasikan pada setiap awal tahun anggaran dapat berubah-rubah tergantung pada prioritas yang ingin dilaksanakan pemerintahan saat itu dan persetujuan DPR/DPRD.

Belanja Non-Diskresi atau Belanja Wajib/Non-Discretionary Spending atauMandatory Spending adalah belanja yang besarannya sudah diatur sebelumnya seperti alokasi anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasanminimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD yang diatur dalam Undang-UndangNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Contoh: minuman beralkohol dan tembakau).

Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

Cumulative to Cumulative (C to C) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I

s.d Triwulan IV 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2021)

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik. (Contoh penggunaan: gedung sekolah, infrastruktur irigasi, energy skala kecil, prasarana pemerintah daerah, infrastruktur jalan, transportasi perdesaan sarpras pasar,dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikanuntuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan non fisik. (Contoh penggunaan: bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadisalah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAFTAR ISTILAH

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dariDBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. kenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM,

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

Dana Perimbangan/Dana Transfer merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitasperekonomian di daerah

Dekonsentrasi (DK) pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana dekonsentrasi tidaktermasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Defisit/Surplus Anggaran adalah kebijakan atau realisasi pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran lebih besar dari penerimaan disebut sebagai defisit anggaran, sedangkan pengeluaran lebih kecil dari penerimaan disebut sebagai surplusanggaran.

E-Government merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Earmarked Tax/Spending dalam ranah keuangan publik adalah kebijakan untuk mengalokasikan penggunaan atas jenis penerimaan tertentu pada tujuan-tujuan tertentuyang biasanya berkaitan. (Contoh: pajak kendaraan bermotor dialokasikan khusus untukanggaran perbaikan jalan; cukai rokok dialokasikan khusus untuk anggaran kesehatan).

Federal Government Spending (FGS) adalah pengeluaran pemerintah federal (pemerintah pusat) di amerika. Padanan dari FGS di Indonesia adalah Belanja pada APBN.

Free Trade Zone (FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.

Grace Period dalam ranah keuangan adalah ketentuan masa tenggang dalam suatu kewajiban pembayaran dimana dalam masa tersebut, kewajiban pembayaran dapat ditunda tanpa dikenakan penalti.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKD) merupakanpendapatan

asli daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Independent Power Producer (IPP) merupakan entitas yang memiliki fasilitas pembangkit listrik dan menjual energi listrik yang dihasilkan ke PLN.

Industri Kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memilikinilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri Menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus- menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Nega Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu..

Keunggulan Komparatif/Comparative Advantage adalah kondisi ekonomi dimana suatu daerah dapat memproduksi suatu barang dengan lebih sedikit opportunity cost. Kondisi tersebut berasal dari teori yang dikemukakan oleh David Ricardo dalam menjelaskan perdagangan antar negara.

DAFTAR ISTILAH

Keunggulan Kompetitif/Keunggulan Bersaing/Competitive Advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan atau wilayah untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan atau wilayah lain pada industri atau pasar yang sama.

Kredit Program merupakan program kredit/pembiayaan pemerintah dengan berbagai skema yang ditujukan untuk pengembangan sektor prioritas,

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skema kredit program yang sumber dananya berasal dari bank dengan suku bunga rendah yang disubsidi oleh pemerintah. Secara umum, KUR bertujuan untuk mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada Lembaga Keuangan.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD) merupakan pos penganggaran penerimaan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKD. LLPAD meliputi jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda retribusi, pendapatan BLUD, dan lain sebagainya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) merupakan pos penerimaan Pemdauntuk menampung penerimaan selain PAD dan Dana Perimbangan. Pos LLPD meliputihibah, dana darurat, DBH dari provinsi, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

Leverage dalam ranah finansial adalah penggunaan berbagai macam instrumen pembiayaan untuk meningkatkan keuntungan dari investasi. Perusahaan dengan porsi pembiayaan (utang) yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekuitasnya disebut dengan perusahaan dengan leverage yang tinggi. Perusahaan dengan leverage yang terlalu tinggi biasanya tidak terlalu diminati investor karena resiko kebangkrutannya tinggi.

Location Quotient (LQ) merupakan metode kuantifikasi tingkat konsentrasi suatusektor pada suatu wilayah dalam suatu negara dibandingkan dengan negara itu sendiri.Dengan LQ, keunikan suatu wilayah dibandingkan rata-rata nasional dapat terlihat. NilaiLQ lebih besar dari 1 dapat diartikan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif.

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah perbandingan pertumbuhan suatu sektorr antara skala yang lebih luas dan skala yang lebih kecil

MRP Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) adalah MRPyang membandingkan pertumbuhan sektor dalam suatu wilayah yang lebih kecil dengan wilayah yang lebih besar (contoh: kabupaten dengan provinsi, provinsi dengan negara).

Month on Month (MoM) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis bulanan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada bulan September 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada bulan Agustus 2022.

Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF) dalam perbankan adalah kredit bermasalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Okun's Law merupakan teori dari Arthur Melvin Okun yang menyebutkan bahwaterdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan Produk DomestikBruto (PDB). Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka pertumbuhan PDB akan menurun, dan begitu pula sebaliknya.

DAFTAR ISTILAH

Overlay dalam analisis ekonomi merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggabungkan beberapa analisis lainnya sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif.

Pagu Anggaran merupakan plafon atau batasan tertinggi belanja yang dialokasikan pada entitas pemerintah untuk dibelanjakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Property Tax adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pajak Daerah/Local Tax adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan sebagainya.

Pajak Penghasilan (PPh)/Income Tax adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Pajak Perdagangan Internasional (PPI) adalah semua penerimaan negara yangberasal dari bea masuk dan bea keluar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT)/Goods and Services Tax (GST) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasadalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pelabuhan Transshipment/Transshipment Port adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat singgah dalam proses pengiriman barang atau kontainer sebelummencapai tujuan akhir.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kelompok pendapatan pemerintah daerahyang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan LLPAD.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusatyang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum (PNBP Umum) adalah PNBP yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi entitas penerima PNBP. Contoh PNBP Umum adalah hasil penjualan barang inventaris kantor, hasil penyewaan BMN, jasa giro,penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional (PNBP Fungsional) penerimaan yang berasal dari hasil hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Contoh PNBP Fungsional meliputi PNBP dari pendidikan, kejaksaan dan peradilan, badan layanan umum, dan lain sebagainya.

DAFTAR ISTILAH

Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA) merupakan metodepembiayaan berupa pinjaman oleh pemerintah pusat yang diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemerintah Daerah/BUMD.

Pengeluaran Konsumsi - Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT.

Pengeluaran Konsumsi – Rumah Tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Penyertaan Modal Daerah (PMD) merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas

Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan bentuk investasi pemerintah pusat pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas

Phillips Curve merupakan model ekonomi dari Alban William Phillips yang menggambarkan hubungan berkebalikan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Artinya, ketika tingkat pengangguran menurun, tingkat inflasi meningkat, dan begitu pula sebaliknya.

PNBP Ratio/Non-Tax Ratio adalah rasio yang membandingkan antara realisasi PNBP dengan PDB/PDRB pada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalian potensi PNBP.

Private Power Utility (PPU) adalah pembangkit listrik swasta terintegrasi yang biasanya menyediakan listrik untuk kawasan industri tertentu.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari semua barang danjasa (output) yang diproduksi oleh suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada periode waktu tertentu

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, PDRB ADHK murni menghitung nilai tambah output tanpa memperhitungkan kenaikan/penurunan harga.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB/Kapita) merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB/Kapita digunakansebagai indikator standar hidup penduduk suatu wilayah.

Purchasing Power Parity (PPP) merupakan metode penyesuaian PDB/PDRB dengan menggunakan konversi nilai berdasarkan daya beli mata uang masing-masing negara. Penyesuaian dengan PPP menghasilkan PDB/PDRB yang lebih riil dalam konteks nilai output yang dihasilkan.

Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah

pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. PLB diselenggarakan oleh badan hukum yang melakukan kegiatan penyediaan dan pengelolaan kawasan PLB.

Quarter to Quarter (Q-to-Q) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kuartalan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan II 2022)

Rasio Belanja Kesehatan adalah rasio perbandingan belanja untuk kesehatan dengantotal belanja. Rasio ini digunakan untuk melihat pemrioritasan pemerintah pada sektor kesehatan.

Rasio Belanja Infrastruktur adalah rasio perbandingan belanja untuk infrastruktur dengan total belanja. Rasio ini digunakan untuk melihat pemrioritasan pemerintah pada pembangunan infastruktur.

Rasio Belanja Pendidikan adalah rasio perbandingan belanja untuk pendidikan dengantotal belanja. Rasio ini digunakan untuk melihat pemrioritasan pemerintah pada sektor pendidikan.

Rasio Belanja Sektoral Terhadap Kontribusi Sektor Kepada PDRB adalah perbandingan indikatif antara fokus anggaran pemerintah dengan kontribusi sektor unggulan. Rasio ini digunakan untuk melihat pemrioritasan pemerintah pada sektor- sektor unggulan pada suatu wilayah.

Rasio Utang Terhadap Ekuitas/Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan antara utang dan ekuitas (aset bersih) suatu entitas. DER yang tinggi menunjukkan bahwa entitas tersebut memiliki derajat leverage yang tinggi sehingga memiliki resiko yang tinggi dan dapat menjadi kurang menarik di mata investor.

Rasio Utang Terhadap Pendapatan/Debt to Income Ratio (DTI) adalah rasio yang membandingkan antara pembayaran utang dan pendapatan bersih pada suatu periode.DTI yang tinggi menunjukkan bahwa pembayaran utang menggerus keuntungan perusahaan sehingga dapat menjadi kurang menarik di mata investor.

Rebound dalam perekonomian adalah fase dimana kondisi yang kurang baik atau bahkan negatif, mulai berubah menjadi lebih baik. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, rebound berarti pertumbuhan ekonomi mulai meningkat atau mengalamipercepatan.

Regresi dalam ekonometrika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel(-variabel) yang lain

Regresi dalam ekonometrika dengan Fixed Effect adalah metode regresi untuk datapanel dimana karakteristik masing-masing variabel dependen (contoh: variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi beberapa kabupaten/kota)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan rencana tahunan pemerintah pusat yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKP memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakanfiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada prinsipnya, RKPD serupa dengan RKP, namun dengan lingkup wilayahyang

lebih kecil (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPN terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJPN.

Renewable Energy/Energi Terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber energi yang secara alami dapat dipulihkan seiring berjalannya waktu seperti sinar matahari, angin, air, pasang surut gelombang, ombak, panas bumi, dan bioenergi. Saatini, negara-negara maju mulai mengalihkan sumber energinya ke energy terbarukan karena tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sedikit polusi yang dapat berkontribusi terhadap global warming.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminaldan sebagainya.

Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam konteks akuntansi, kata Satker ini bisa dipersamakan dengan entitas.

Shale Oil adalah minyak non konvensional yang diproduksi dari serpihan batu yang mengandung shale oil. Teknologi untuk mengekstraksi minyak dari batuan tersebut relatif baru ditemukan dan memiliki biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan minyak konvensional.

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selisih positif (sisa lebih) dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Skala Ekonomi/Economy of Scale merupakan fenomena turunnya biaya produksi perunit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output). Dalam konteks industrialisasi, skala ekonomi menciptakan efisiensi bagi suatu unit produksi sampai dengan titik tertentu.

Spesialisasi dalam ekonomi adalah metode produksi dimana suatu negara, daerah, atau unit produksi memproduksi beberapa jenis barang atau jasa saja untuk meningkatkan efisiensi pada sistem produksi secara keseluruhan

DAFTAR ISTILAH

Tax Ratio adalah rasio yang membandingkan antara realisasi pajak dengan PDB/PDRBpada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalian potensi pajak.

Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/Head Count Index (HCI-Po)

adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia 15 tahunkeatas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahundan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator penganggguranterbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk pelaksanaanya, diberikan danatugas pembantuan dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakupsemua penerimaan dan pengeluaran.

Urusan Bersama (UB) merupakan kegiatan bersama pusat dan daerah yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat bantuan langsung ke masyarakat dan biasanya dialokasikan dalam bantuan sosial. Pendanaan UB berasal dari APBN dan disertai dengan Dana Pendamping dari APBD.

Vokasional dalam konteks pendidikan/pelatihan merupakan pendidikan/pelatihan yanglebih terfokus pada sisi keahlian atau kemahiran praktis dalam berkerja dibandingkan sisi akademik. Di era cepatnya perubahan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan keahlian seorang pekerja seringkali berubah-ubah sehingga permintaan akan pendidikan/pelatihan vokasional terus meningkat.

Volatilitas/Volatility dalam konteks ekonomi merupakan kecenderungan suatu variabel untuk berubah-ubah. Semakin tinggi volatilitas, semakin sering suatu variabel berubah-ubah.

Year on Year (YoY) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2021).

LAMPIRAN

Lampiran I	Tabel Investasi Kepri Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023
Lampiran II	Tabel Perkembangan Neraca s.d. 30 Juni 2022, 31 Desember 2022, dan 30 Juni 2023
Lampiran III	Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Anambas
Lampiran IV	Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kota Batam
Lampiran V	Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Bintan
Lampiran VI	Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Karimun
Lampiran VII	Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Lingga
Lampiran VIII	Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Natuna
Lampiran IX	Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Lampiran X	Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Pemerintah Kota Tanjungpinang

Lampiran I

Tabel Investasi Kepri Triwulan II Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023

PMDN		2022		2023		*Growth*
		Triwulan II		Triwulan II		
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	
Sektor Primer	**Kehutanan**	1	55,5	4	56,9	2,52%
	Perikanan			29	657,4	
	Pertambangan	29	21.163,8	150	61.632,8	191,22%
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	6	305,2	15	903,9	196,17%
	Total (Sektor)	**36**	**21.524,5**	**198**	**63.251,0**	193,86%
Sektor Sekunder	**Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam**	1	0,0	19	112.773,5	
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki			1	0,0	
	Industri Karet dan Plastik	1	0,0	14	1.641,4	
	Industri Kayu			2	0,0	
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	10	59.163,9	47	97.601,0	64,97%
	Industri Kertas dan Percetakan	3	32.550,0	19	785,5	-97,59%
	Industri Kimia Dan Farmasi	8	15.775,1	14	45.414,3	187,89%
	Industri Lainnya	13	2.475,4	41	6.596,2	166,47%
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	15	6.992,1	37	8.380,0	19,85%
	Industri Makanan	8	1.296,6	41	33.066,3	2450,23%
	Industri Mineral Non Logam	6	5.200,0	9	22.248,9	327,86%
	Industri Tekstil			5	0,0	
	Total (Sektor)	**65**	**123.453,1**	**249**	**328.507,1**	166,10%
Sektor Tersier	**Hotel dan Restoran**	27	52.488,0	154	306.770,2	484,46%
	Jasa Lainnya	35	33.196,2	228	141.050,0	324,90%
	Konstruksi	57	3.953,3	446	77.580,1	1862,41%
	Listrik, Gas dan Air	10	26.014,7	44	7.619,1	-70,71%
	Perdagangan dan Reparasi	243	125.282,0	854	238.942,5	90,72%
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	21	157.395,8	146	293.747,7	86,63%
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	36	126.742,4	225	304.781,8	140,47%
	Total (Sektor)	**429**	**525.072,4**	**2.097**	**1.370.491,4**	161,01%
Total (Sektor Utama)		**530**	**670.050,0**	**2.544**	**1.762.249,5**	**163,00%**

Sumber: NSWI BKPM, 2023 (diolah)

Lampiran II

Tabel Perkembangan Neraca s.d. 30 Juni 2022, 31 Desember 2022, dan 30 Juni 2023

Uraian	Semester I 2022	2022	Semester I 2023	Growth
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	28,893,014,697	-	62,500,218,447	116.32%
Kas di Bendahara Penerimaan	291,159,325	13,319,978	602,684,825	106.99%
Kas Lainnya dan Setara kas	159,206,918,579	203,016,179,113	169,603,175,395	6.53%
Kas Pada Badan Layanan Umum	1,027,103,508,901	1,373,597,165,340	1,897,538,838,095	84.75%
Jumlah Kas dan Setara Kas	**1,215,494,601,502**	**1,576,626,664,431**	**2,130,244,916,762**	**75.26%**
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	15,849,607,762	37,631,911,012	15,849,607,762	0%
Uang Muka Belanja (Prepayment)	-257,250	-	3,511,853,814	-1365252.11%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	18,786,615,757	15,969,233,856	22,493,463,775	19.73%
Piutang Perpajakan	1,495,598,146,016	1,353,397,449,174	1,495,598,146,016	0.00%
Piutang Bukan Pajak	138,552,191,643	146,783,915,218	167,152,311,769	20.64%
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	11,548,550	21,548,550	11,548,550	0.00%
Piutang dari Kegiatan BLU	700,889,732,738	557,781,931,042	656,705,921,259	-6.30%
Jumlah Piutang (Bruto)	2,335,051,618,947	2,057,984,843,984	2,319,467,927,594	-0.67%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-1,152,882,158,916	-1,037,550,497,227	-1,160,891,167,341	0.69%
Jumlah Piutang (Bersih)	**1,182,169,460,031**	**1,020,434,346,757**	**1,158,576,760,253**	**-2.00%**
Persediaan	933,841,287,247	860,025,339,869	932,906,560,414	-0.10%
Persediaan yang Belum Diregister	8,883,726,590	-	9,435,021,149	6.21%
Jumlah Aset Lancar	**3,375,025,041,639**	**3,510,687,495,925**	**4,273,018,183,929**	**26.61%**
Aset Tetap				
Tanah	49,187,384,565,808	47,315,961,803,874	49,186,804,286,808	0.00%
Peralatan dan Mesin	16,714,283,337,054	16,798,315,557,274	16,717,251,128,949	0.02%
Gedung dan Bangunan	8,188,744,111,175	8,433,775,709,208	8,203,718,170,990	0.18%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18,431,329,475,161	18,710,756,212,069	18,712,363,103,825	1.52%
Aset Tetap Lainnya	1,273,746,944,481	1,115,867,158,289	1,273,976,443,481	0.02%
Konstruksi dalam Pengerjaan	1,377,569,634,248	1,042,331,789,062	1,330,968,915,614	-3.38%
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	74,877,085,148	-	62,284,011,023	-16.82%
Aset Konsesi Jasa	-	3,314,318,784,424	-	N/A
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	**95,247,935,153,075**	**96,731,327,014,200**	**95,487,366,060,690**	**0.25%**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(20,521,762,258,485)	(22,179,602,893,682)	(20,965,407,401,662)	2.16%
Jumlah Aset Tetap	**74,726,172,894,590**	**74,551,724,120,518**	**74,521,958,659,028**	**-0.27%**
Properti Investasi	-	122,068,810,000	-	N/A
Jumlah Properti Investasi (Bruto)	**-**	**122,068,810,000**	**-**	**N/A**
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-585,523,730	-	N/A
Jumlah Properti Investasi (Bersih)	**-**	**121,483,286,270**	**-**	**N/A**
Piutang Jangka Panjang				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	22,000,000	-	43,000,000	95.45%
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)	22,000,000	-	43,000,000	95.45%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	-	-	-110,000	#DIV/0!

Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	**22,000,000**	**-**	**42,890,000**	**94.95%**
Aset Lainnya	**-**	**39,015,979,867**	**-**	**#DIV/0!**
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	72,437,831,953	859,294,902,109	72,437,831,953	0.00%
Aset Tidak Berwujud	778,100,428,961	14,276,182,961	782,206,376,756	0.53%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	41,699,378,810	-	41,699,378,810	0.00%
Dana Jangka Panjang	-	506,156,195,549	-	#DIV/0!
Aset Lain-lain	579,768,326,648	-	579,777,528,865	0.00%
Aset Lainnya yang Belum Diregister	59,388,000	1,418,743,260,486	55,820,000	-6.01%
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	1,472,065,354,372	-474,121,270,655	1,476,176,936,384	0.28%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-529,745,079,298	-126,161,014,575	-530,051,311,020	0.06%
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	-103,242,334,230	818,460,975,256	-104,255,180,809	0.98%
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	**839,077,940,844**		**841,870,444,555**	**0.33%**
JUMLAH ASET	**78,940,297,877,073**	**79,002,355,877,969**	**79,636,890,177,512**	**0.88%**
KEWAJIBAN				
Utang kepada Pihak Ketiga	372,681,016,985	247,909,663,841	406,247,014,604	9.01%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	9,080,017,185	11,213,753,217	9,080,017,185	0.00%
Pendapatan Diterima Dimuka	3,149,543,390,857	3,861,406,358,883	3,477,489,012,945	10.41%
Utang Jangka Pendek Lainnya	49,161,105,656	5,332,510	32,017,367,099	-34.87%
Hibah Yg Belum Disahkan	294,709,815	294,709,815	294,709,815	0.00%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**3,580,760,240,498**	**4,120,829,818,266**	**3,925,128,121,648**	**9.62%**
Jumlah Kewajiban	**3,580,760,240,498**	**4,120,829,818,266**	**3,925,128,121,648**	**9.62%**
Ekuitas	**75,359,537,636,575**	**74,881,526,059,703**	**75,711,762,055,864**	**0.47%**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**78,940,297,877,073**	**79,002,355,877,969**	**79,636,890,177,512**	**0.88%**

Sumber: GFS Semester I Tahun 2023 (diolah)

Lampiran III

Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Anambas

No	Komponen Checklist	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1	Ranperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	Masih dalam tahap pembahasan dengan Pansus DPRD	Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi dan pembahasan pasal demi pasal dalam Ranperda PDRD	1. Masih ada beberapa OPD yang belum menyerahkan tarif perhitungan dikarenakan kajiannya belum selesai namun prosesnya tetap berjalan 2. Pembahasan agak terlambat karena menunggu PP Nomor 35 Tahun 2023 disahkan	Koordinasi dengan Tim Penyusunan Ranperda PDRD dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya
2	Skenario Opsen Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap PAD APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pembahasan dengan Pansus DPRD	Koordinasi dan Konsultasi dengan Samsat Provinsi mengenai Data Opsen Pajak yang akan dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	1. Masih membutuhkan koordinasi dan konsultasi terkait Data Opsen Pajak dengan Samsat Provinsi 2. Dampak dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB yaitu bertambahnya objek pajak daerah sedangkan dari sisi penerimaan, berkurangnya penerimaan daerah dikarenakan selama ini penerimaan PKB berasal dari bagi hasil provinsi, namun berikutnya perhitungan opsennya sesuai kendaraan yang ada di daerah sedangkan kendaraan di Kabupaten Kepulauan Anambas sedikit jumlahnya 3. Opsen MBLB tidak berdampak bagi daerah, namun bertambahnya penerimaan untuk Provinsi	Koordinasi dengan Samsat Provinsi
3	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Pembahasan dengan Pansus DPRD	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Penyusunan Ranperda PDRD dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kot a lainnya	Masih membutuhkan koordinasi dan konsultasi terkait tarif dan pasal demi pasal dalam Perluasan Basis Pajak Daerah	1. Melakukan koordinasi internal misalnya dengan PTSP terkait Perizinan 2. Melakukan pemutakhiran data misalnya dengan pendataan ulang Wajib Pajak 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan pengawasan
4	Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah	Pembahasan dengan Pansus DPRD	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Penyusunan Ranperda PDRD dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kot a lainnya	Masih membutuhkan koordinasi dan konsultasi terkait skenario penyederhanaan Retribusi Daerah	Koordinasi dengan Tim Penyusunan Ranperda PDRD dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya
5	Isu Strategi Lainnya terkait penguatan Local Taxing Power	Masih focus dengan Ranperda PDRD	Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Penyusunan Ranperda PDRD dan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kot a lainnya	Tata cara untuk Objek Pajak baru terkait opsen masih kurang jelas	Koordinasi dengan Tim Penyusunan Ranperda PDRD dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya

Sumber: Bapenda Anambas, 2023

Lampiran IV

Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kota Batam

No.	Komponen Check List	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1.	Ranperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	Dalam Pembahasan Pansus DPRD Kota Batam	05 Januari 2024	Penetapan Potensi	Melakukan Pendekatan Makro Ekonomi
2.	Skenario Opsen Pajak Daerah dan DampaknyaTerhadap PAD APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dampak pengenaan opsen MBLB, PKB, BBNKB ada sedikit peningkatan terhadap PAD APBD Kota Batam	Tahun 2025	Sistem	Melakukan Pembahasan Bersama antara Pemko Batam dan Pemprov Kepulauan Riau
3.	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Tahap Pendataan potensi Pajak Baru sesuai UU No. 1 Tahun 2022	05 Januari 2024	Masih Banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD	- Melakukan Sosialisasi kepada Wajib Pajak terhadap Potensi yang baru di kenakan pajak - Melakukan validasi data agar akurat di lapangan - Koordinasi dengan Samsat terkait data PKB dan BBNKB
4.	Skenario Penyerdehanaan Retribusi Daerah	Dalam Pembahasan Pansus DPRD Kota Batam	05 Januari 2024	Dibutuhkan waktu yg cukup lama untuk membuat Perda	-Penyederhanaan Retribusi Daerah dilakukan melalui Penetapan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
5.	Isu Strategis Lainnya Terkait Penguatan Local Taxing Power	Penguatan data Potensi Pajak Daerah	Tahun 2024	Masih Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak dalam Memberi data yang Ril	Melakukan Sosialisasi kepada Wajib Pajak Terhadap UU No 1 Tahun 2022
		Pembagian serta mekanisme pemungutan opsen masih dalam pembahasan dengan Provinsi	-	-	-

Sumber: Bapenda Batam, 2023

Lampiran V

Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Bintan

No	Komponen Check List	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1.	Raperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	Penyusunan Ranperda PDRD berdasarkan UU HKPD di Kabupaten Bintan sudah berjalan, penyampaian ranperda ke DPRD dan di paripurnakan oleh DPRD Kab. Bintan pada tanggal 28 April 2023. Sampai saat ini masih berproses dalam pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Bintan	Januari 2024	1. Sebagaimana disebutkan pada pasal 187 huruf b UU HKPD menyebutkan bahwa Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang HKPD. UU HKPD diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022, sehingga daerah hanya diberikan waktu paling lambat 2 tahun untuk menyelesaikan Perda PDRD sesuai UU HKPD. 2. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru diundangkan pada 16 Juni tahun 2023. 3. Beberapa ketentuan dalam penyusunan Perda PDRD harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pasal 84 dan pasal 89 UU HKPD. Target penyelesaian Ranperda sesuai ketentuan UU HKPD selambatnya diundangkan pada tanggal 5 Januari tahun 2024	Penerapan pajak secara adil, kepastian hukum melalui Perda dan Perkada, memberikan kemudahan pelayanan.
2.	Skenario Opsen Pajak Daerah dan Dampaknya Terhadap PAD APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pembahasan Ranperda PDRD dengan DPRD	Januari 2025	Penerapan opsen bagi daerah mengoptimalkan penerimaan PAD	1. Ketentuan mengenai opsen pajak daerah diatur pada pada pasal 83 ayat 1 tentang besaran tarif opsen pajak dan pasal 84 ayat 1 UU HKPD, 2. Dampak terhadap PAD Kabupaten Bintan, secara ketentuan akan berdampak peningkatan terhadap PAD secara langsung yaitu dari opsen pajak kendaraan bermotor, namun terjadi penurunan pada mata pajak MBLB sebesar 25 % sebagai opsen ke Pemerintah Provinsi, 3. Besaran opsen pajak kendaraan bermotor tergantung jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Bintan. 4. DBH pajak kendaraan bermotor yang biasa diterima Kabupaten/ Kota

					tidak lagi didapatkan karena menjadi ketentuan opsen pajak secara langsung menjadi PAD.
3.	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Basis Pajak Daerah sudah tetapkan sesuai dengan adanya UU HKPD	Januari 2024	Penyesuaian regulasi implementasi terhadap UU HKPD dan PP terkait PDRD	1. Penghimpunan data dan informasi dilapangan guna melihat potensi pajak yang belum tergali, 2. Menjaring pelaku usaha guna menambah wajib pajak baru, 3. Peningkatan administrasi pajak terutama dari sisi pengawasan guna mendeteksi data sebenarnya dengan jelas terkait jumlah Wajib Pajak serta transaksi yang menimbulkan kewajiban perpajakan.
4.	Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah	Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan dalam 3 jenis retribusI	Januari 2024	Penyesuaian regulasi implementasi terhadap UU HKPD dan PP terkait PDRD	Berdasarkan pasal 88 UU HKPD terdapat 18 jenis retribusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dibandingkan pada UU 28 tahun 2009 terdapat 32 jenis retribusi daerah. Ini berarti beberapa jenis retribusi tidak lagi dapat dilakukan pemungutan. Pasal 88 ayat 8 dipertegas untuk penambahan jenis retribusi selain yang tercantum pada ketentuan ayat 1, 3 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5.	Isu Strategis Lainnya terkait penguatan *Local Taxing Power*	Optimalisasi pemungutan Pajak daerah melalui kerjasama dengan DJP dan Pihak kegita dalam pengelolaan dan pemanfaatan data bersama yang diwujudkan melalui PKS.	Januari 2024	Penyesuaian regulasi implementasi terhadap UU HKPD dan PP terkait PDRD	Penyesuaian tarif ke dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan UU HKPD dan PP tentang PDRD
		1. Untuk penambahan jenis pajak selain yang sudah diatur di UU HKPD tidak diperkenankan, 2. Penguatan Local Taxing Power dilakukan	-	-	-

		dengan peningkatan fungsi pendataan, penagihan, pengawasan dan pelayanan perpajakan daerah serta penguatan regulasi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Petugas Pajak Daerah.			

Sumber: Bapenda Bintan, 2023

Lampiran VI

Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Karimun

No	Komponen Check List	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1	Ranperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	Ranperda PDRD dalam pembahasan bersama PANSUS DPRD	02 Januari 2024	1. Belum disahkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah	1. Pelaksanakan sosialisasi Perda PDRD kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi . 2. Koordinasi bersama OPD terkait. 3. Melaksanakan Forum Group Discusion (FGD).
2	Skenario Opsen Pajak Daerah dan DampaknyaTerhadap PAD APBD Kabupaten	Ranperda PDRD dalam pembahasan bersama PANSUS DPRD	Untuk Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen MBLB mulai berlaku 05 Januari 2025 sesuai dengan Undang - Undang HKPD	1. Belum memiliki juknis pembagian Opsen. 2. Koordinasi dengan Provinsi belum optimal. 3. Tata cara perhitungan Opsen yang belum pasti	1. Melaksanakan koordinasi bersama pemerintah provinsi terkait pemberlakuan Opsen 2. Membuat Juknis perhitungan dan pembagian Opsen
3	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	-	02 Januari 2024	1. Mempersiapkan formulir SPTPD PBJT. 2. Mempersiapkan Juknis Opsen Pajak sebagai salah satu basis Pajak Daerah baru. 3. Melaksanakan pendataan atas Objek hasil perluasaan basis Pajak Daerah	1. Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
4	Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah	-	02 Januari 2024	1. Kehilangan beberapa jenis retribusi yang potensial seperti, Retribusi Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Trayek. 2. Menyusun dasar penetapan tariff retribusi	1. Melaksanakan sosialisasi tarif retribusi baru kepada Wajib Retribusi
5	Isu strategis lainnya terkait penguatan *Local Taxing Power* a. Mendorong kemudahan berusaha di daerah; b. Penyederhaan retribusi dan diprioritaskan hanya pada retribusi atas layanan wajib; c. Perluasan Basis pajak (Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota)) d. Melaksanakan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain	1. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. (Pasal 190) 2. Pelayanan yang diberikan oleh BLUD merupakan bagian dari objek Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan layanan yang dihasilkan. 3. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang selanjutnya dapat ditetapkan dengan Perkada. 4. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi. 5. Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto, Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.			

Sumber: Bapenda Karimun, 2023

Lampiran VII

Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Lingga

No	Komponen Check List	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1	Ranperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	sudah disampaikan ke Kemendagri dan Kemenkeu dan masih dalam tahap evaluasi	Oktober 2023	- Penentuan Besaran Tarif Retribusi Daerah - Teknis pemberlakuan opsen pajak - Teknis pungutan retribusi baru sesuai dengan Undang – Undang HKPD - Teknis Penyusunan Matrik Ranperda yang sudah diusulkan	Tahun 2024
2	Skenario Opsen Pajak Daerah dan Dampaknya Terhadap PAD APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hearing kedua bersama DPRD	Oktober 2023	Peraturan Pemerintah tentang PDRD yang baru diundangkan pada tanggal 16 Juni 2023 membuat pemda Lingga sedikit merasa kesulitan dalam mengatur beberapa norma dalam Ranperda PDRD	- Opsen pajak merupakan pungutan tambahan pajak dengan persentase tertentu dimana sesuai dengan UU HKPD terdiri atas tiga jenis pajak daerah yakni opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan opsen MBLB yang mana sebelumnya untuk PKB dan BBNKB merupakan penerimaan daerah berdasarkan bagi hasil pajak Provinsi dengan system pemerataan. Dan sekarang sudah ditetapkan tarifnya sesuai dengan Perda berdasarkan UU HKPD, namun pungutan dan pengelolaannya tetap di Pemerintah Provinsi. - Dampak terhadap PAD APBD Kabupaten dengan adanya opsen PKB dan BBNKB dari sector PAD akan meningkat namun dari sector pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi mengalami penurunan.
3	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Mou antara pemerintah Kabupaten Lingga dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Tahun 2022	Tahun 2022	Peraturan Pemerintah tentang PDRD yang baru diundangkan pada tanggal 16 Juni 2023 membuat pemda Lingga sedikit merasa kesulitan dalam mengatur beberapa norma dalam Ranperda PDRD	dengan melakukan kegiatan pemutakhiran data yang berkesinambungan.
4	Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah	Hearing kedua bersama DPRD	Oktober 2023	Skenario penyederhanaan retribusi daerah sesuai UU HKPD terdapat beberapa jenis retribusi yang tidak dapat dilakukan pungutan lagi dan ini akan berdampak pada penurunan penerimaan daerah dari sector PAD (seperti retribusi Tera Ulang dan retribusi Izin Usaha Perikanan)	Tahun 2024

5	Isu Strategis Lainnya terkait penguatan Local Taxing Power	Sinergi antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dalam pengelolaan dan Pemungutan Pajak	Oktober 2023	- Kebijakan Kepala Daerah terhadap penghapusan dan atau pengurangan denda pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Perubahan struktur organisasi di Badan Pendapatan Daerah (penambahan bidang teknis pengawasan) - Penyesuaian NJOP dengan Zona Nilai Tanah yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan telah disetujui oleh Pimpinan Daerah. - Pengusulan pembentukan Balai Karantina Hewan di Kabupaten Lingga - Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan retribusi parkir secara berlangganan	Tahun 2024

Sumber: Bapenda Lingga, 2023

Lampiran VIII

Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Kabupaten Natuna

No	Komponen Check List	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1	Ranperda PDRD Sesuai dengan UU HKPD	Sedang dalam proses Evalausi di Kemendagri dan Kemenkeu RI	Sebelum Tahun 2024	3 Kali melakukan Rapat Pansus bersama DPRD	Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak secara berkala
2	Skenario Opsen Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap PAD APBD	Masih Dalam Proses Koordinasi ke Pemerintah Propinsi	Tahun 2024	Dampaknya terhadap PAD APBD Kemungkinan akan berdampak Terhadap Pajak PKB dan BBNKB	Dengan telah disahkan Perda Pajak dan Rertribusi Daerah berdasarkan UU HKPD, Kami akan melakukan proses koordinasi dengan Pihak Pemerintah Propinsi terkai Skenario Opsen Pajak ini
3	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Dalam Pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstentifikasi Pajak Daerah	Sudah dilaksanakan	Wajib Pajak Masih belum mengetahui terhadap aturan dan enggan untuk memberi keterangan atau data yang sebenarnya	Melakukan Pemuktahiran data dan Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah
4	Skenario Peneyederhanaan Retribusi Daerah	Sudah diatur dalam Perda Pajak Dan Retribusi Daerah	Tahun 2024	Menunggu selesai Evaluasi dari Kemendagri dan Kemenkeu RI	Sudah diatur dalam Perda Pajak Dan Retribusi Daerah, dengan telah disahkan Perda Pajak dan Rertribusi Daerah berdasarkan UU HKPD, Kami akan melakukan koordinasi dengan Pihak OPD Penghasil Retribusi
5	Isu Strategi lainnya terkait Local Taxing Power	Melakukan Pemuktahiran data dan Sistem Penagihan Pajak Daerah, Menaikan Tarif Pajak Daerah	Tahun 2023	Geografis Natuna yang mana kecamatannya terdiri dari beberapa pulau, yang membuat jarak atau rentang kendali yang jauh	Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara On line

Sumber: Bapenda Natuna, 2023

Lampiran IX

Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Komponen Check List	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1.	Raperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	Progres RANPERDA PDRD sudah selesai pembahasan dengan Bapemperda dan saat Ini sudah disampaikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan Pembahasan	Januari 2024	Tantangan penyusunan anatara lain adalah lambatnya penerbitan PP 35 tahun 2023 tentang pedoman PDRD yang menyebabkan dilakukan penyesuaian dan pembahasan ulang draf ranperda yg telah disusun. target penyelesaian ranperda diharapkan disahkan diakhir bulan September 2023	Ranperda disusun sesuai UU HKPD
2.	Skenario Opsen Pajak Daerah dan Dampaknya Terhadap PAD APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar 66% dari Pajak Terutang	Januari 2025	Penerimaan Bagian Provinsi Menurun, sementara Bagian Kabupaten Kota Bertambah, namun terjadi ketimpangan antar Kab/Kota, tergantung banyaknya populasi kendaraan pada Kab/Kota bersangkutan	Skenario opsen dilaksankan sesuai uu hkpd namun ada wacana untuk sedikit menaikkan tarif pajaknya. dampak bagi WP akan ada sedikit penambahan beban, bagi provinsi akan menurunkan PAD dom APBD dan bagi kab kota sangat tergantung populasi jumlah kendaraan yg terdaftar di kab kota
3.	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Mengidentifikasi dan menginventarisasi data potensi Pajak Alat Berat, MBLB dan Kendaraan diatas Air	Januari 2024 dan 2025	Keterbatasan Akses mendapatkan data yang diperlukan	Strategi penguatan basis data antara lain adalah melakukan pendataan dan updating,peningkatan sinergi dengan kab kota dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak lainnya dalam pertukaran data perpajakan
4.	Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah	Menidentifikasi pelayanan yang tidak lagi menjadi objek Retribusi	Januari 2024	Pelayanan masih harus dilakukan namun tidak dapat dipungut retribusi	Penyederhanaan Retribusi dilaksanakan sesuai UU HKPD dan pelayanan yang disediakan daerah
5.	Isu Strategis Lainnya terkait penguatan *Local Taxing Power*	UU HKPD dengan Opsennya akan mereduksi PAD Provinsi Kepri. Untuk meminimalisir penurunan perlu dilakukan Optimalisasi.	Januari 2024 dan 2025	lambatnya penerbitan PP 35 tahun 2023 tentang pedoman PDRD yang menyebabkan, sehingga Daerah kesulitan dalam mengidentifikasi potensi yang ada. Seperti kepastian objek kendaraan di air yang boleh dipungut dengan batasan berapa ? dsb	UU HKPD lebih berpihak kepada kab kota, khususnya kab kota yang jumlah kendaraannya banyak

Sumber: Bapenda Pemerintah Provinsi Kepualuan Riau, 2023

Lampiran X

Tabel Progress Implementasi UU HKPD di Pemerintah Kota Tanjungpinang

No	Komponen *Check List*	Status Progres	Target Implementasi	Tantangan	Strategi Implementasi
1.	Ranperda PDRD sesuai dengan UU HKPD	Sedang dalam tahap pembahasan dengan Pansus DPRD	Tahun 2024	Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU HKPD yang baru saja terbit membuat proses pembahasan dengan Tim Pansus DPRD berjalan lambat	1. Pemerintah Kota Tanjungpinang berencana akan melakukan Kegiatan Sosialisasi sehingga penerapan Ranperda PDRD diharapkan dapat lebih maksimal. 2. Perencanaan penyusunan ranperwako tata cara pemungutan pajak sebagai turunan Ranperda PDRD
2.	Skenario Opsen Pajak Daerah dan Dampaknya Terhadap PAD APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terkait opsen telah diatur pada batang tubuh Ranperda PDRD	Tahun 2025	- BPPRD Kota Tanjungpinang telah melakukan koordinasi dengan Samsat Kota Tanjungpinang melalui surat yang dilayangkan terkait permintaan data, namun hingga kini belum ada balasan - Dampak pengenaan opsen PKB dan BBNKB terhadap Kota Tanjungpinang belum dapat dihitung, karena menunggu surat balasan dari Samsat Kota Tanjungpinang - Dampak pengenaan opsen MBLB tidak berpengaruh terhadap PAD APBD Kota Tanjungpinang, karena tambahan opsen dibebankan kepada Wajib Pajak.	Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Samsat Kota Tanjungpinang
3.	Skenario Perluasan Basis Pajak Daerah	Terkait Perluasan Basis Pajak Daerah telah diatur pada batang tubuh Ranperda PDRD	Tahun 2024	Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU HKPD yang baru saja terbit membuat proses pembahasan Ranpera PDRD dengan Tim Pansus DPRD berjalan lambat	1. Melakukan validasi data agar akurat di lapangan 2. Koordinasi dengan Samsat terkait data PKB dan BBNKB
4.	Skenario Penyederhanaan Retribusi Daerah	Terkait Penyederhanaan Retribusi Daerah telah diatur pada batang tubuh Ranperda PDRD	Tahun 2024	Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU HKPD yang baru saja terbit membuat proses pembahasan Ranpera PDRD dengan Tim Pansus DPRD berjalan lambat	Penyederhanaan Retribusi Daerah dilakukan melalui penetapan retribusi yang dipungut dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
5.	Skenario BLUD menjadi objek retribusi daerah	Terkait BLUD menjadi objek retribusi daerah telah diatur pada batang tubuh Ranperda PDRD	Tahun 2024	- Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU HKPD yang baru saja terbit membuat proses pembahasan Ranpera PDRD dengan Tim Pansus DPRD berjalan lambat - Pengaturan norma BLUD di Ranperda dianggap belum	Melakukan Koordinasi dengan BLUD Kota Tanjungpinang

				memberikan arah yang jelas untuk daerah	

Sumber: Bapenda Kota Tanjungpinang, 2023

DJPb
Indonesian Treasury

InTress

HAnDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU